
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>



JQ
779
A15
I54
1973
Supp II
2



BUKU PELENGKAP II PEMILIHAN UMUM 1971

DJAWABAN/PENDJELASAN

Mengeri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum
atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DPR-GR yang
berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 1971

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM



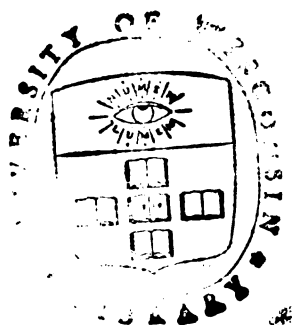


B U K U P E L E N G K A P - I I
P E M I L I H A N U M U M 1 9 7 1

DJAWABAN/PENDJELASAN

**Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum
atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DPR-GR yang
berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 1971**

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM



JQ
779
A15
I54
1973
Supp. II
2

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pendjelasan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Komisi III DPR-GR pada tanggal 8 Agustus 1970	9
2. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanyaan jang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 jang diadakan oleh Anggota-anggota Komisi III DPR-GR pada tanggal 8 Agustus 1970	97
3. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanyaan jang diadakan oleh Anggota-anggota Komisi III DPR-GR, pada tanggal 13 Agustus 1970	124
4. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanyaan-pertanyaan/saran-saran jang diadakan dalam rapat kerdja Komisi III DPR-GR bersama dengan Pemerintah pada tanggal 8 September 1970 ..	143
5. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanyaan-pertanyaan jang diadakan oleh Anggota-anggota Komisi III DPR-GR tanggal 26 September 1970 nomor : 01.02/K/3465/1970	153
6. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemi-	

lihan Umum atas pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh Anggota-anggota Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal 29 September 1970 nomor : C1-02/K/3501/DPRGR/1970	165
7. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanjaan-pertanjaan/saran jang diadjukan oleh Anggota-anggota Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal 29 Oktober 1970 nomor : C1.01/K/3922/DPRGR/1970	170
8. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan setjara lisan oleh Anggota-anggota Komisi III DPR-GR pada tanggal 5 November 1970	195
9. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanjaan-pertanjaan/saran jang diadjukan oleh Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal 14 Djanuari 1971 nomor : C1.09/K/106	209
10. Pendjelasan/Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas saran-saran/kritik-kritik dari Komisi III Bagian B dan Komisi II DPR-GR terhadap peragaan pemungutan suara dan penghitungan suara jang diselenggarakan di Complex PTIK Tjiputat pada tanggal 17 Pebruari 1971 disampaikan dalam Rapat Kerdja pada tanggal 8 April 1971	228
11. Pendjelasan/Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanjaan-pertanjaan/saran-saran jang diadjukan oleh Komisi III DPR-GR dalam	

Rapat Kerdja pada tanggal 8 April 1971	234
12. Djawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanyaan-pertanyaan/saran-saran yang diajukan oleh Anggota Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR, tanggal 19 April 1971 nomor : C1.02/K/1179/DPRGR/1971	248
13. Djawaban dan tanggapan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanyaan-pertanyaan/saran-saran dan laporan yang diajukan oleh Komisi III DPR-GR, sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan Komisi III DPR-GR, tanggal 22 Mei 1971 nomor : C1.10/K/1391/1971	266
14. Djawaban dan tanggapan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas pertanyaan-pertanyaan/saran-saran dan laporan yang diajukan oleh Komisi III DPR-GR, pada tanggal 24 Mei 1971	289
15. Tanggapan Menteri Penerangan atas laporan yang diajukan oleh Komisi III DPR-GR, sebagaimana tertjantum dalam lampiran-lampiran surat Pimpinan DPR-GR, tanggal 10 Djuni 1971 nomor : C1.02/K/1494/DPRGR/1971	298

PENDJELASAN

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
KEPADA KOMISI III DPR-GR PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 1970**

P E N D J E L A S A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM
KEPADA KOMISI III DPR-GR
PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 1970

I. PENDAHULUAN.

Saudara Pimpinan dan anggota Komisi III Jth.

Pertama-tama kami utjapkan terima kasih dan penghargaan kami atas inisiatif dari Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi - III Jth untuk mengadakan rapat kerdja dengan Pemerintah, walaupun sebenarnja pada saat ini Dewan sedang dalam keadaan reces.

Pendjelasan dengan alat penolong.

Terima kasih pula kami utjapkan atas kesediaan Saudara-saudara jth untuk mengadakan rapat kerdja di gedung Departemen Dalam Negeri, dengan maksud agar pendjelasan-pendjelasan dari Pemerintah dapat diberikan lebih mantap lagi serta diperintji dengan mempergunakan alat-alat penolong yang tersedia yakni dengan mempergunakan

bagan-bagan.

Telah menjadi konsensus nasional bahwa dalam rangka mewujudkan tjita-tjita, aspirasi serta keinginan nasional, kita akan menempuh djalan dan tjara yang demokratis, konstitusionil dan berlandaskan hukum yang kesemuanya itu akan kita laksanakan berdasarkan landasan yang telah kita setudjui dan tetapkan bersama, jaitu Pantja Sila yang merupakan landasan serta falsafah hidup kita bersama sebagai Bangsa dan Rakjat Indonesia.

Dialog antara
Pemerintah
dan DPR da-
lam rangka me-
realisasikan ta-
ta-kehidupan
demokrasi yang
sehat.

Sedjak bertiupnja angin Orde Baru di Tanah Air kita, dengan sekuat tenaga kita telah berusaha keras untuk merealisasikan tata-kehidupan demokrasi yang sehat dan murni sebagaimana diamanatkan oleh mutiara hidup kita Pantja Sila, dan dalam rangka itu pula antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Badan-badan Perwakilan Rakjatnja, antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dan semua kekuatan sosial-politik bahkan antara golongan-golongan dalam masyarakat sendiri, telah timbul dan terdjadi dialog-dialog yang sehat dan konstruktif yang kesemuanya itu merupakan suatu pertanda yang positif bagi kehidupan serta penghidupan demokrasi di tanah air kita.

Prinsip check
and balance di
tetapkan demi
suksesnja Pe-
milihan Umum.

Dengan ditugaskannja Komisi-III yang diperkuat dengan duduknja pula Ketua-ketua Fraksi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah, maka Pemerintah merasa lebih mantap lagi dalam memenuhi tanggung-djawabnja, karena prinsip "check and balance" antara lembaga eksekutif dengan legislatif khususnja, dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diterapkan demi suksesnja Pemilihan Umum, prinsip mana kalau dapat diwujudkan setjara objektif akan dapat lebih menjehatkan lagi penyelenggaraan

ketatanegaraan kita yang menganut sistim demokrasi Pantja Sila.

Dialoog-dialoog seperti ini wadjib dipelihara, dipupuk serta dikembangkan karena memanifestasikan kontrol antara kita dengan kita, bukan sadja kontrol masyarakat terhadap Pemerintah, melainkan djuga kontrol antara sesama kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat sendiri.

Dialoog-dialoog yang bersopan-santun yang menganut dasar-dasar aturan permainan, berpidjak atas landasan kedjudjuran, lapang dada, bernilaikan kebenaran dan mentjari kebenaran, mendengarkan dan menghormati pendapat pihak lain serta selalu berorientasi kepada tudjuan bersama, adalah tjiri-tjiri chas daripada Demokrasi Pantja Sila yang kesemuanja itu telah diletakkan dalam kerangka konstitusionil jaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pendjelmaan dari kepribadian Bangsa dan Rakjat Indonesia. Mendjadi djelaslah bagi kita bahwa orientasi dari Demokrasi Pantja Sila adalah tidak lain tetap terpeliharanja kesatuan, keutuhan, keselamatan serta tertjapainja tudjuan kita bersama.

**Memfaatkan
rapat kerdja**

Pemerintah menjadari, seperti djuga dirasakan oleh Saudara-saudara, sekalian jth, bahwa dalam hal penjelenggaraan Pemilihan Umum baik dibidang peraturan perundangan (misalnja ; materinja, dasar-dasar pemikiran, maksud dan tudjuan) maupun dibidang operasionilnja masih terdapat hal-hal yang perlu di-clearkan.

Oleh karenanja rapat-rapat kerdja sematjam ini akan merupakan sarana yang baik untuk menghilangkan gaps yang masih dirasakan ada, dan semoga rapat kerdja ini dapat kita manfaatkan untuk lebih melantjarkan lagi usaha-usaha kita bersama dalam rangka melaksanakan tugas yang telah dibe-

rikan oleh MPRS dengan TAP MPRS No. XLII/68.

Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pendjelasan-pendjelasan jang agak terperinci sebelum Saudara-saudara jang terhormat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan ada kemungkinan pendjelasan-pendjelasan kami sudah akan memberikan djawaban terhadap pertanyaan jang akan Saudara adjukan.

Sistimatika pendjelasan kami atur dengan urutan sebagai berikut :

1. Hasil karya nasional, chususnja dibidang usaha pemantapan stabilisasi politik.
 2. Pendjelasan sekitar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 6 dan Kokarmindagri.
 - c. Pengelompokan partai-partai politik.
 3. Pendjelasan sekitar pelaksanaan Pemilihan Umum jang meliputi bidang-bidang :
 - a. Landasan fundamentil, sebagai pangkal tolak dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan.
 - b. Proses pembuatan peraturan-peraturan pelaksanaan,
 - c. Penjusunan struktur organisasi dan personalia.
 - d. Pelaksanaan tehnis.
 - e. Bantuan administrasi.
 4. Penutup dan kesimpulan.
- II. HASIL KARJA NASIONAL CHUSUSNJA DIBIDANG USAHA STABILISASI POLITIK PEMERINTAH.**
1. Bahwasanja setiap masalah jang timbul atau terdjadi

Korelasi dan interrelasi antara tata-kehidupan dibidang politik dan bidang ekonomi serta dibidang - bidang lain.

dalam tata-kehidupan kita selalu ada kait-hubungannya yang erat sekali dengan masalah-masalah lainnya, baik hubungan yang bersifat kausal maupun fungsional.

Masalah-masalah dalam bidang politik akan membawa pengaruh yang langsung terhadap tata-kehidupan dibidang ekonomi, demikian pula sebaliknya problema-problema yang timbul dibidang ekonomi akan mempengaruhi langsung tata-kehidupan politik; korelasi serta interrelasi antara bidang-bidang tersebut adalah sedemikian erat intensifnya sehingga pada hakekatnya masalah-masalah tersebut walaupun dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Oleh karenanya dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut tidaklah dapat kita selesaikan setjara "an sich", akan tetapi harus diadakan penyelesaian setjara menjeluruh dalam segala bidang.

Penyelesaian-penyelesaian dalam bidang ekonomi merupakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan politik yang positif dan sehat, dan sebaliknya pula kehidupan politik yang serasi dan positif akan memberikan iklim yang menguntungkan bagi perkembangan serta pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif kearah pembangunan-pembangunan yang pesat.

Stabilisasi politik dalam rangka pelaksanaan Pantja Krida

2. PELITA akan berdjalan dengan sukses apabila berbarengan dengan itu prasarana lainnya dibangun pula. Prasarana ini adalah krida pertama, krida keempat dan krida kelima daripada Pantja Krida Kabinet Pembangunan atau jelasnya adalah stabilisasi politik dan ekonomi; ketertiban dalam masyarakat serta penjempurnaan dan pembersihan Aparatur Pemerintahan.

Demikian pula penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah dalam rangka pelaksanaan Pantja Krida, sehingga tidak

dapat dipisahkan dari krida-krida jang lain.

PELITA tahun pertama telah kita lampau dan berhasil baik, walaupun setjara fisik belum terpenuhi 100%.

Meskipun banjak kesulitan dan hambatan jang dihadapi dalam pelaksanaan PELITA tahun pertama ini jang umumnja terletak dibidang administrasi, keuangan, management dan birokrasi, akan tetapi achirnja dapat djuga dibuktikan dengan hasil-hasil jang njata.

3. Sedjalan dengan kemadjuan-kemadjuan jang telah ditjapai dibidang pemantapan stabilisasi ekonomi maka dibidang stabilisasi politik dalam rangka mewujudkan tata-kehidupan Orde Baru, usaha-usaha dilaksanakan untuk ditudjukan kepada tertjapainja normalisasi keadaan, agar dengan demikian kita dapat segera membangun Bangsa ini, mengisi tjita-tjita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta menikmati hasil kemerdekaan dengan kesedjahteraan bersama. Meskipun usaha normalisasi ini menurut sementara pihak dirasakan berdjalan agak lambat, namun kita semua wadajib menjadari bahwa terwujudnja Orde Baru itu tidaklah dapat dipaksakan begitu sadja, karena perwujudannja itu haruslah melalui suatu proses jang rumit serta penghidupan Bangsa.

**Perwujudan
tata-kehidupan
Orde Baru me-
lalui proses ber-
tahap.**

Proses ini tidaklah dapat dilakukan setjara "sprongsewigs" akan tetapi harus melalui tahap-tahap tertentu, dan saling berurutan jaitu tahap transisi dimana kita selandjutnja di-susul dengan tahap pembentukan prasarana untuk kemudi-an dikembangkan kearah kegiatan-kegiatan normalisasi.

4. Ikatan Pantja Sila menjuruh kita memupuk persahabatan dan persaudaraan antara warga sebangsa dan antara sesama Manusia.

Sebagai makhluk jang sama dihadapan Tuhan Jang Maha

Esas dan yang pada akhirnya kita bertanggung-jawab kepadaNya, pengakuan terikat pada Pantja Sila menjuruh kita bersikap toleransi harga-menghargai, dan bekerdja sama, bertolong-tolongan dengan mendjauhkan sikap dan sifat bermusuhan dalam berbeda pendapat.

Pengakuan itupun menjuruh kita membela kebenaran, dan menentang yang batil; berlaku djujur dan membasmi ketjuran; berlaku adil dan menentang ketidak-adilan; berlaku (sekurang-kurangnya berusaha berlaku) sutji dan mendjauhkan serta menentang yang kotor.

Pantja Sila menjuruh melaksanakan demokrasi dalam politik, ekonomi

Pantja Sila pun menjuruh kita melaksanakan demokrasi dalam politik, ekonomi dan sosial karena didalamnya terkandung unsur keadilan yang harus ditegakkan merata dalam segala bidang hidup.

Semuanya dalam rangka usaha menudju masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil.

Nilai-nilai moral seperti dikemukakan diatas lebih terletak pada diri pribadi yang harus ditumbuhkan sendiri serta ditumbuhkan oleh sistim yang dimuat dalam Undang-undang Dasar.

Oleh sebab itu Undang-undang Dasar merupakan perlembagaan daripada nilai moral tadi.

5. Masalah stabilisasi politik di Indonesia bukanlah masalah perimbangan kekuatan, dimana kekuatan-kekuatan sosial-politik dihadapkan dan dipertentangkan satu sama lainnya untuk saling mengintai, halang-menghalangi serta bergerak dalam suasana tjuriga-mentjuri.

Suasana yang demikian itu djelas tidak memungkinkan dilaksanakannya pembinaan, serta pemupukkan dinamika masyarakat.

Suasana yang demikian itu merupakan iklim yang subur bagi timbulnya ketegangan serta konflik didalam masyarakat.

Stabilitas politik yang statis tidak dapat mengembangkan dinamika masyarakat.

Suatu stabilitas politik yang statis yang tidak dapat memupuk serta mengembangkan dinamika masyarakat tidaklah akan dapat bertahan lama, sebab akan ketinggalan dari meningkatnya tuntutan-tuntutan baru (rising demands) dari masyarakat itu sendiri.

Stabilitas politik itu sendiri tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh lingkungan, yang jelas adalah bahwa pembangunan yang cukup besar dan yang berlangsung selajara kontinu merupakan syarat mutlak bagi tercapainya stabilitas politik yang mantap.

Tiap kematjetan dalam pembangunan akan segera membawa akibat timbulnya kegontjangan-kegontjangan serta ketegangan dalam masyarakat yang membawa akibat lanjut terganggunja kestabilan itu sendiri apabila tidak segera diadakan penjelesaian yang tjepat dan tepat.

Pimpinan harus mampu menjalankan dinamika masyarakat kearah sasaran nasional.

6. Satu masalah yang "markant" dalam soal stabilisasi politik, adalah masalah leadership atau kepemimpinan. Rakjat pada hakikinja hanjalah berbuat "woordloos denken", tidak mampu untuk meng-expressikan apa yang dikehendaki serta diinginkannya, oleh karena itu adalah tugas dan kewajiban dari pimpinanlah untuk mampu menjalankan kehendak dari Rakjat, ia harus mampu menjalankan dinamika masyarakat kearah sasaran yang hendak kita tjapai jaitu stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi.

Adalah mendjadi keharusan bagi pimpinan untuk mampu mengadjak serta mendorong masyarakat kearah pembangunan yang merupakan syarat mutlak bagi tercapainya stabilitas politik, oleh karena itu hanya kepemimpinan yang ber-orientasi kepada pembangunanlah yang dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut diatas. .

Suatu leadership yang ber-orientasi diluar pembangunan pasti akan gagal untuk melaksanakan missienja dibidang stabili-

tas politik ekonomi.

7. Dewasa ini kita berada dalam keadaan politik yang memberi harapan tertjapainja stabilisasi.

Namun demikian, sekedjappun kita tidak boleh lengah dan bersikap lèkas puas karena dalam mentjapai stabilitas politik yang mantap, masih memerlukan ketekunan dan kewaspadaan kita semua, yang dalam implementasinja akan tetap mendapat antjaman dari kekuatan anti-Pantja Sila yang masih latent, disamping adanja pengaruh-pengaruh yang kuat, antara lain dari keadaan ekonomi yang masih belum memuaskan dan dari kegiatan-kegiatan politik dan pertentangan-pertentangan kepentingan mendjelang Pemilihan Umum yang akan datang.

8. Dengan menjadari sepenuhnya, bahwa dalam taraf stabilisasi politik sekarang ini selalu ada kekuatan-kekuatan latent anti Pantja Sila yang akan terus menerus berusaha menginfiltrir kekuatan-kekuatan Orde Baru, maka dalam bidang pembinaan stabilisasi politik harus tetap dipelihara dan dipupuk kewaspadaan dan kesiap-siagaan.

Untuk pembinaan stabilisasi politik Presiden telah mempertjajakannja kepada Menteri Dalam Negeri yang dimanifestasikan dalam bentuk diadakannja suatu Direktorat Djenderal baru pada Departemen Dalam Negeri, ialah Direktorat Djenderal Khusus yang tugasnja pada pokoknja adalah:

Direktorat
Djenderal Khusus
pada Departemen
Dalam Negeri.

- a. Pembinaan Ideologi dan Kesatuan Bangsa.
- b. Pembinaan sosial politik didalam negeri.
- c. Mengadakan hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara.

9. Dalam rangka mengemban tugas tersebut maka kami berusaha sekuat tenaga dan fikiran agar dapat terpelihara

inertia dan momentum gerak-langkah Kabinet Pembangunan dalam mewujudkan :

- a. Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- b. Konsensus Nasional berdasarkan program Nasional yang telah diresapkan dan dihajati sebagai milik bersama.
- c. Aparatur Negara yang sehat sebagai hasil dari stabilisasi integrasi kekuatan-kekuatan Orde Baru.

10. Tertjapai dan terpeliharanya suatu stabilitas politik merupakan tjermanan sudah tertjapai atau terpeliharanya suatu konsensus nasional, suatu ketjotjokan faham tentang dasar-dasar pokok perikehidupan bangsa kita, baik tentang apa yang mendjadi tudjuan-tudjuan nasional maupun tentang tjara-tjara bagaimana mentjapai tudjuan-tudjuan tersebut.

Konsensus nasional ini dengan sendirinja harus sebagai realita "actual and behavioral", sebagai suatu kenyataan yang dihajati dan diamalkan, tidak hanya sekedar "dilafalkan", harus merupakan suatu pengikatan diri (commitment) yang idil dan konkrit dalam penghajatan.

Kegiatan-kegiatan Menteri Dalam Negeri dalam rangka mentjapai stabilitas politik adalah sebagai upaja mengusahakan tertjapainja commitment kita, ialah Masyarakat Pantja Sila sebagai Tudjuan Nasional.

Kegiatan-kegiatan Mendagri dalam bidang pembinaan sosial-politik bukan bertudjuan membuka suatu "front

Kegiatan-kegiatan Menteri Dalam Negeri itu bukanlah bertudjuan membuka suatu "front baru", melainkan sebaliknya, ialah menghajati setjara konkrit fungsi integrasi, terpeliharanya pola-pola hubungan baik antara golongan-golongan dan kekuatan-kekuatan politik serta fungsi adaptasi atau penjesuaian diri kehidupan politik dengan kondisi dan situasi yang berlaku.

Kesemuanja itu adalah sebagai daja-upaja mentjapai tudjuan-

baru". tudjuan nasional dalam rangka melaksanakan Pantja Krida Kabinet Pembangunan.

Integrasi kekuatan-kekuatan Orde Baru itu harus terus-menerus diusahakan, agar supaja setjara bulat dapat memberikan :

- dukungan kepada,
- pengawasan terhadap,
- partisipasi dengan, serta
- ikut bertanggung-djawab bersama Pimpinan Nasional jang ada dalam tangan Bapak Presiden sekarang sebagai pembina Orde Baru.

III. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 12 TAHUN 1969.

1. Dalam pada itu, dalam rangka pelaksanaan Pantja Krida sebagai program nasional jang pelaksanaannja ditugaskan kepada Kabinet Pembangunan oleh MPRS antara lain memuat :

"melanjutkan penjempurnaan dan pembersihan setjara menjeluruh aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah".

2. Bertitik tolak pada kewadajiban tersebut, maka usaha-usaha kami bukan hanya terbatas pada penertiban dibidang "executif", tetapi djuga dibidang "legislatif", karena kedua unsur tersebut merupakan bahagian dari tubuh Pemerintahan didaerah-daerah, jang satu sama lain tak dapat dipisahkan dalam rangka penjelenggaraan Pemerintahan jang menganut sistim demokrasi.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 bukanlah kebidjaksanaan baru, jang sementara orang meni-

PERMEN 12
tidak bermak-
sud memperke-
tjil peranan
partai politik,
melainkan dju-
tru menggalang
kesatuan tin-
dak untuk me-
ngamankan
Pantja Sila
U.U.D. 1945.

lai hanja untuk keuntungan golongan Karya.

Peraturan tersebut sekedar menertibkan, jang daja preven-
tifnja (pentjegahannja) diutamakan, dihubungkan dengan
pengamanan idiil (Pantja Sila), pengamanan struktural (U.U.
D. 1945), beserta peraturan-peraturan lainnja.

Peraturan tersebut tidaklah bermaksud untuk memperketjil
peranan Partai Politik dalam kehidupan demokrasi, akan te-
tapi djustru menggalang "kesatuan tindak" untuk menga-
mankan Pantja Sila dan Undang-Undang Dasar 1945, jang
diatasnja kita tegak tumbuhkan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai wadah untuk memenuhi aspirasi hidup
daripada Bangsa.

4. Ikut sertanja semua kekuatan sosial jang diatur de-
ngan Peraturan tersebut dalam Lembaga Perwakilan ketjuali
menambah representatifnja kedudukan Lembaga djuga akan
tertijptalah suatu "check and balance" dalam tubuh Lemba-
ga itu sendiri jang besar pengaruhnja terhadap "sosial ba-
lance".

"Meerderheid van stemmen" setjara subjektif adalah me-
meng penting bagi kehidupan demokrasi, akan tetapi adalah
lebih penting pengutamaan "kwalitas idiil dan kwalitas
intelektuil" jang akan memberikan djaminan terhadap pe-
ngamanan pentjapaian tudjuan.

Kalau seandainja ada jang merasa dirugikan, maka kerugian
itu mempunjai "nationale waarde" jang tinggi, karena akan
membuka djalan jang terang bagi keselamatan Pantja Sila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketjuali Beng-
kulu (jang be-
lum ada DPR-
nja), seluruh

5. Pada dewasa ini seluruh Daerah telah melaksanakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 terse-
but, dan sungguh pada tempatnja kalau kami menjampaikan
penghargaan dan rasa terima kasih jang tidak taranja kepada

**Daerah telah
melaksanakan
PERMEN 12**

semua pihak yang dalam menghadapi dan melaksanakannya senantiasa berpindah kepada satu landasan idiil Pantja Sila, satu landasan struktural UUD 1945 dan satu landasan program Pantja Krida, sehingga tidak perlu ditijptakan suatu kondisi yang dapat mengganggu stabilitas politik, karena baik Pemerintah maupun masyarakat sendiri tidak menghendaki adanya suatu suasana yang selalu diliputi dengan kembalinya "instabilitas politik".

Sebaliknya stabilitas politik yang kita tiptakan dengan pengorbanan yang cukup besar, hendaknya dipertahankan dan diperkembangkan.

**PERMEN 12
berlaku sampai
terbentuknya
DPRD hasil
Pemilu yang
akan datang.**

6. Kiranya masih perlu kami tandaskan, bahwa berlakunya Peraturan tersebut hanyalah sampai kepada terbentuknya DPRD baru hasil PEMILU yang akan datang.

Kemudian daripada itu dalam menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat, kita telah maju selangkah lagi yaitu dengan telah selesainya Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD.

Djalan kearah kehidupan demokrasi kita telah makin terang, kaki langit demokrasi telah nampak makin gamblang.

Landasan idiil serta strukturalnya telah jelas dan sudah ada yaitu Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945, hanya tergantung kepada kita semuanya, bagaimana demokrasi tersebut akan kita dirikan, kita arahkan serta kita manfaatkan. Demokrasi bukanlah suatu tujuan akhir, Demokrasi hanyalah merupakan jembatan emas untuk menuju keantai tujuan akhir dari Bangsa dan Rakyat Indonesia yaitu masyarakat Adil dan Makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentram karta-rahardja.

7. Masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin

Harapan Presiden kepada PARPOL, ORMAS dan GOLKAR untuk meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan.

ditjapai tanpa suatu Pembangunan.

Djusteru dalam rangka itulah kini kita sedang berkiprah untuk meng-sukseskan Pembangunan Lima Tahun sebagaimana diamanahkan oleh Rakjat Indonesia melalui TAP—M.P. R.S. No. XLI/1968 juncto TAP—M.P.R.S. No. XLII/1966.

Sehubungan dengan itu, maka melalui forum ini kami ingin mengingatkan kembali akan harapan dari Bapak Presiden Suharto, kepada kita semuanya dan khususnya kepada PARPOL, ORMAS maupun GOLKAR untuk dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan Pembangunan sekarang ini.

Besar dan ketijlnja partisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan sekarang ini hendaknya djangan di-ukur dari besar ketijlnja djumlah perwakilan dari Organisasi jang terdapat dalam Lembaga-Lembaga Kenegaraan baik eksekutip maupun legislatip, akan tetapi hendaknya didasarkan kepada suksesnja Pembangunan itu sendiri jang merupakan keharusan bagi kita dalam rangka hendak melepaskan diri dari belenggu penderitaan, kepahitan dan kegetiran baik lahir maupun bathin sebagai warisan dari penjelewengan dan pengchianatan dimasa-masa lalu terhadap Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Djusteru disinilah batu udjian diletakkan oleh Rakjat kepada kita, Rakjat akan memberikan evaluasi serta penilaian terhadap kita semuanya.

Apakah memang benar-benar kita ini melaksanakan satunja kata dan perbuatan.

IV. PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1970 DAN KOKARMINDAGRI.

1. Sehubungan dengan keluarnja P.P. No. 6/1970 tentang pengaturan kehidupan politik pedjabat-pedjabat negeri

Tidak benar
Mendagri melarang
pedjabat negeri dalam
lingkungan Departemen Da-
agri memasuki
keanggotaan
PARPOL.

Harus dapat di-
laksanakan
prinsip "clean
government."

dalam rangka pembinaan sistim kepegawaian negeri Repu-
blik Indonesia, dimana banjak dikabarkan bahwa Menteri
Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan atau Insruksi
jang melarang pedjabat Negeri dalam lingkungannya untuk
mendjadi atau memasuki keanggotaan Parpol, dapat kami
njatakan bahwa berita-berita jang demikian itu tidak benar.

2. Memang, kami selalu mengandjurkan dan mengadjak
kepada seluruh warga slagorde Korps Karyawan Pemerintah
Dalam Negeri (KOKARMINDAGRI), bahwa untuk mentje-
gah agar seorang pedjabat negeri dalam melaksanakan dja-
batannya tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik jang
tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai pedjabat negeri.

a. Peranan pegawai negeri dalam mewujudkan stabilisa-
si nasional dan pembangunan adalah sangat besar
terutama karena kedudukan pegawai negeri sebagai
pelaksana-pelaksana kebidjaksanaan Pemerintah.

Dalam kedudukannya sebagai pelaksana tugas-tugas
pemerintah, maka pegawai negeri harus dapat berdiri
diatas semua kepentingan golongan, sehingga dengan
demikian dapat dilaksanakan prinsip "clean govern-
ment".

b. Oleh karena itu, dalam periode transisi dewasa ini pe-
gawai negeri memang tidak ada alternatif lain ketjuali
setjara konsekwen berpegang langsung kepada sema-
ngat dan norma-norma Pantja Sila, Undang-undang
Dasar 1945 dan memahami benar-benar tudjuan-tu-
djuan Nasional; sebab pelaksanaan tugas-tugas peme-
rintahan belum waktunya untuk sekedar dilakukan
setjara routine-konvensional.

- c. Serba kekurangan dan keterbatasan yang masih kita hadapi dewasa ini, memerlukan adanya pegawai-pegawai Negeri bekerja dan melaksanakan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintah dengan penuh inisiatif dan jiwa Kors (Corp-geest) yang berkesadaran tinggi.

V. PENGELOMPOKAN PARTAI-PARTAI POLITIK.

1. Sebelum uraian-uraian khusus mengenai masalah-masalah pelaksanaan PEMILU kami kemukakan, perlu lebih dahulu kami jelaskan sekitar prakarsa Bapak Presiden tentang pengelompokan partai-partai politik dalam rangka tetap menjaga stabilisasi Nasional dalam menjamin kelanjutan pelaksanaan PEMILU dan Pembangunan. Mengingat adanya kenyataan bahwa terdapat persamaan-persamaan prinsipil yang dapat dijadikan dasar pengelompokan partai-partai politik, yaitu :

Diantara partai politik ada persamaan-persamaan yang prinsipil yang dapat dijadikan landasan kerja yang berorientasi kepada program.

- ber-ideologi Pantja Sila
 - merupakan partai-partai Nasional
 - perjuangannya didasarkan atas dan menjunjung tinggi azas-azas demokrasi.
 - mempunyai satu tujuan yang sama ialah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila;
- maka pengelompokan bertujuan :

a. Djangka pendek.

(1). Untuk menjamin stabilisasi dalam pelaksanaan PEMILU, sehingga kesimpang-siuran dalam kampanye dapat ditekan sampai batas-batas minimal.

"stembus accord.

(2). Mengadakan stembus accord sehingga suara yang

tertjetjer dapat digabungkan mendjadi satu

b. Djangka pandjang.

- (1). Untuk melaksanakan penjederhanaan partai sesuai dengan TAP MPRS No. XXII, diarahkan:
 - bukan hanja berarti mengurangi djumlah partai-partai melainkan terutama djuga perombakan pola berfikir dan pola bekerdja menudju kepada orientasi program.
 - sangat ideal apabila penjederhanaan itu melalui Undang-undang tentang Kepartajan, Keormasan dan Kekaryaan.
 - tidak harus menunggu-nunggu sampai Undang-undang itu selesai, dapat diambil langkah-langkah persiapan kearah proses penjederhanaan tersebut.
- (2). Untuk membina persatuan Bangsa dalam melaksanakan Pembangunan, dalam bentuk :
 - persamaan stress pada aspek-aspek pembangunan dan atas dasar persamaan program yang akan dapat lebih djelas menjusun program Pembangunan maupun pelaksanaannja.

2. Adapun dasar pengelompokannja diharapkan :

pengelompokan PARPOL2 tidak atas dasar ideologi masing2, melainkan atas persamaan tekanan

- a. djangan pada ideologi masing-masing, seperti misalnja atas dasar "agama", "sosialisme" dan sebagainja (ingat dulu Nasakom yang tidak membawa hasil yang baik);
- b. pembangunan yang kita tudju adalah kesedjahteraan lahir dan bathin (materiil dan spirituil),

dari aspek pembangunan nasional.

karenanya harus didasarkan atas persamaan tekanan dari aspek pembangunan itu.

Misalnya, partai-partai yang ada dapat mengelompok dalam dua golongan, yaitu :

- (1). Kelompok materiil-spirituil, artinya menekan aspek pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spirituilnya.
- (2). Kelompok spirituil-materiil, artinya menekan pada aspek pembangunan spirituil tanpa mengabaikan aspek materiilnya.
- (3). Selanjutnya oleh Bapak Presiden diharapkan agar bentuk dan organisasi pengelompokan itu digunakan dasar-dasar :
 - a. Konstitusionil dalam arti berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Demokrasi dalam arti atas dasar kesadaran partai-partai sendiri dan pengelompokan ini tidak akan dilakukan melalui "Dekrit" atau penggunaan wewenang TAP MPRS NO. IX.
 - c. Sederhana dalam arti dapat tcepat diadakan pengelompokan atas dasar persamaan-persamaan prinsip yang telah ada dan bukannya terlalu "ndjelimet" (ingewikkeld).

Dasar2 demokrasi dan konstitusionil tetap dipegang teguh dalam usaha pengelompokan PAR-
POL2.

Dengan demikian pada tahap sekarang ini dalam pengelompokan itu nanti masing-masing

partai tetap ada, tetap memiliki kedaulatan dan kepribadiannya sendiri.

Tentu saja, atas dasar suka rela partai dapat meleburkan diri dalam partai lain atau bergabung.

Dalam sambutannya pada pembukaan Kongres ke XII Partai Nasional Indonesia di Semarang Bapak Presiden menegaskan bahwa : Sambil menunggu penyelesaian Undang-Undang-Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan yang dewasa ini telah berada di DPRGR dan diperkirakan akan memakan waktu lama untuk penyelesaiannya, maka usaha-usaha nyata dari kita semua partai-partai sendiri untuk menjederhanakan kehidupan politik dan kepartaian, antara lain dengan "menjederhanakan kerdja-sama dan menjatukan sikap dan pendirian diantara sekelompok partai-partai, sungguh merupakan langkah-madju dalam usaha penjederhanaan tersebut.

3. Dengan demikian jelas pula, bahwa usaha pengelompokan partai-partai ini bukanlah untuk membubarkan partai-partai ini atau merombaknya setjara paksaan, yang bertentangan dengan demokrasi.

Berulang-ulang beliau menegaskan : "Merombak struktur politik dengan paksaan, lebih-lebih dengan membubarkan partai-partai politik jelas tidak akan kita tempuh.

Tindakan demikian, apapun alasannya, bukan langkah yang baik, bahkan merupakan benih-benih tumbuhnja diktatur."

4. Lebih dari kejakinan beliau, prinsipnja tadi adalah kewajiban setiap demokrasi; prinsip tadi adalah perdjongan

Tidak akan ditempuh merombak struktur politik dengan paksaan.

orde baru.

Tetapi, dilain pihak Bapak Presiden djuga merasa memikul kewadajiban untuk tidak membiarkan setiap partai politik maupun jang menghalang-halangi pelaksanaan tugas-tugas Nasional kita, chususnja pelaksanaan Pembangunan.

Disamping itu gagasan pengelompokan partai-partai mendjadi dua kelompok itu sama sekali bukanlah usaha-usaha bipolarisasi dalam ideologi.

5. Oleh karena itu beliau menandakan bahwa dasar kehidupan kepartaian jang sehat untuk sekarang dan seterusnya haruslah pada kesamaan programnja.

Dasar program dapat membawa kehidupan politik kearah pertumbuhan jang sehat, dapat membawa kompetisi jang konstruktif diantara semua partai, dapat membawakan angin segar dalam proses pembaharuan jang harus mendjadi bagian daripada Pembangunan Bangsa kita dewasa ini. Tugas Nasional jang dewasa ini sedang kita hadapi chususnja pembangunan sungguh merupakan tugas berat.

Oleh karena itu semua kekuatan masjarakat, terutama partai-partai politik berkewadajiban untuk turut serta setjara aktif - berpartisipasi - untuk suksesnja pelaksanaan program Nasional jang telah digariskan itu.

6. Dengan membimbing dan menggerakkan Rakjat dalam pembangunan dari bawah ini, maka partai politik bukan sadja akan dapat ikut melaksanakan pembangunan fisik; tetapi bersamaan itu djuga membawa pembaharuan dalam pola berfikir dan pola bekerdja Rakjat banjak.

Pola berfikir dan pola bekerdja partai2 politik diarahkan

Dan jang lebih penting lagi, merobah - pola berfikir dan pola bekerdja partai-partai politik sendiri, jang menudju pada orientasi program.

Pemerintah memang memikul kewadajiban jang besar dalam

kepada orien-
tasi program.

melaksanakan Pembangunan Lima Tahun yang sekarang ini; Pemerintah berkewajiban membangun prasarana-prasarana ekonomi yang benar-benar diperlukan.

Akan tetapi, sama pentingnja dengan kewajiban Pemerin-
tah membangun prasarana ekonomi tadi, adalah prasarana
sosial politik yang djuga harus dibangun oleh partai-partai
politik dan ikut sertanja seluruh Rakjat dalam gerak Pem-
bangunan itu.

7. Alchamdulillah, prakarsa Bapak Presiden ini menda-
pat tanggapan yang positif sekali dari semua partai, sehingga
dewasa ini telah ada pengelompokan yang berbentuk :

- a. Kelompok Persatuan, terdiri atas :
Partai N.U., Partai Muslimin Indonesia, P.S.I.I. dan
Partai Islam PERTI.
- b. Kelompok Demokrasi Pembangunan, terdiri atas :
P.N.I., MURBA, I.P-K.I., Partai Katholik dan Parkin-
do.
Pelaksanaan realisasinja sedang dalam pengembangan.

VI. SEKITAR PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM.

Apa yang diuraikan diatas tidak dapat dilepaskan dari
pada aspek-aspek yang akan mempengaruhi pelaksanaan Pe-
milihan Umum.

Sukses tidaknja Pemilihan Umum yang akan datang untuk
sebagian besar tergantung pada matang tidaknja persiapan-
persiapan mulai ditingkat pusat sampai didesa-desa.

Ketentuan-ketentuan tehnik yang harus dilaksanakan ditu-
angkan dalam peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi
yang telah dan akan dikeluarkan.

Jang sangat memerlukan perhatian kita semua adalah dibi-
dang pelaksanaannja supaja benar-benar dilaksanakan keten-
tuan-ketentuan jang te'ah digariskan menurut djadwal wak-
tu jang telah ditentukan.

Sistimatika pendjelasan kami sekitar pelaksanaan Pemilihan
Umum ini kami sadjikan dengan urut-urutan sebagai beri-
kut :

1. Landasan fundamentil

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kabinet Pem-
bangunan sesuai dengan TAP MPRS No. XLII/MPRS/
1968 chususnja Krida ke-3 (Pemilihan Umum), Peme-
rintah berpegang teguh pada 2 Landasan Fundamen-
til ja'ni :

- Landasan konstitutionil dan
- Landasan idiil.

a. Landasan Konstitutionil.

(1). TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang
Pemilihan Umum, dengan ketentuan :

- (a). harus dilaksanakan selambat-lam-
batnja pada tanggal 5 Djuli 1968
dengan mempergunakan azas-azas
langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (b). Undang-undang Pemilihan Umum
dan Undang-undang Susunan MPR,
DPR dan DPRD harus selesai di-
undangkan selambat-lambatnja 6
bulan sedjak penetapan Ketetapan
tersebut.
- (c). susunan DPR dan DPRD terdiri dari
golongan Politik dan Karya, dan

- (d). menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan tersebut.

Diktum TAP
MPRS No.
XLII/1968

- (2). TAP MPRS No. XLII/MPRS/1968 jang pada intinja merobah diktum TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 pasal 1 dan pasal 2 dan menugaskan kepada Presiden/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan No. XLII tersebut (pasal 4).

- (3). Untuk melaksanakan TAP MPRS No. XLII/1968 telah diundangkan Undang-undang No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dan Undang-undang No. 16/1969 tentang Susunan dan Kudukan MPR, DPR dan DPRD.

Tanggung - dja-
wab Pemerin-
tah jang diten-
tukan dalam
Undang - un-
dang.

Karena kedua Undang-undang tersebut telah tjukup difahami oleh Saudara-saudara sekalian, jang ingin kami stress dalam kesempatan ini adalah hal-hal jang berhubungan dengan "tanggung-djawab Pemerintah" menurut ketentuan dalam Undang undang antara lain :

Pertama.

Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden (tersebut pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 15/1969).

Kedua.

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri (ajat 3).

Ketiga.

Susunan, Tata Kerdja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ajat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah (ajat 10).

Keempat.

Segala sesuatu yang belum diatur didalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 35 Undang-undang No. 15/1969) disamping adanja beberapa pasal yang tegas-tegas harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selandjutnja Ketentuan Peralihan dan Penutup (Bab VII) Undang-undang No. 16/1969 tersebut pada pasal 46 menjatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini, akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Landasan Idiil.

**Sasaran pokok
perdjoangan
Orde Baru, jang
merupakan tu-
djuan Pemilih-
an Umum.**

Landasan idiil jang disinggung dalam beberapa pasal Undang-undang, tetapi lebih tegas diuraikan dalam Pendjelasan Resmi Undang-undang No. 15 tahun 1969 merupakan landasan jang prinsipil dan fundamental jang harus mendijwai setiap peraturan pelaksanaannya, dan harus menjamin "suksesnja perdjoangan Orde Baru", jaitu tetap tegaknya Pantja Sila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan azas-azas Pantja Sila terutama "dasar kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan", maka lembaga-lembaga permusjawaratan/perwakilan rakjat jang dibentuk dengan melalui Pemilihan Umum harus mampu membawakan hati nurari rakjat jang tertuang dalam perdjoangan Orde Baru, dan dengan demikian maka :

- (1). Pemilihan Umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakjat untuk duduk dalam lembaga permusjawaratan/perwakilan saja, dan djuga tidak memilih wakil-wakil rakjat untuk menjusun negara baru dengan dasar falsafah baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakjat oleh rakjat jang membawakan isi hati nurani rakjat dalam melanjutkan perdjoangan, mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ber-sumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945

guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat.

- (2). Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat.

2. Pembuatan Peraturan-peraturan Pelaksanaan.

a. Pembuatan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya pembuatan peraturan-peraturan pelaksanaan bertujuan untuk mempermanatkan dan memperlancar pelaksanaan Operasional dari pada persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

5 Prinsip sebagai pedoman pembuatan Peraturan Pemerintah.

- (1). Pengaturan materi yang diperintahkan harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Materi-materi, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.
- (3). Memperhatikan fleksibilitas dalam pelaksanaan.
- (4). Materi pasal-pasal yang diperlukan penggunaan pelaksanaannya, dan
- (5). Menghindarkan timbulnya kegontjangan dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang

- b. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut diatas Pemerintah dengan memperhatikan -

mengatur pelaksanaan Undang - Undang No. 15 + 16/ 1969.

"sisa waktu jang relatif terbatas" untuk mengadakan persiapan-persiapan, telah berhasil membuat Peraturan Pemerintah jang terdiri dari:

- (1). Peraturan Pemerintah No. 1/1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15/1969.
- (2). Peraturan Pemerintah No. 2/1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16/1969.
- (3). Peraturan Pemerintah No. 3/1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15/1969 dan 16/1969 untuk daerah Irian Barat.

- c. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut timbul beberapa pertanyaan jang melalui saluran atau diforum resmi dan djuga melalui mass media, baik jang berhubungan dengan proses pembuatannya, maupun materi jang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam kesempatan rapat kerdja ini, ingin kami sampaikan pendjelasan-pendjelasan sebagai berikut :

- (1). Menurut TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia (dalam hal ini lihat lampiran Bab. II. B. 3 dan 4), dinjatakan dengan tegas bahwa Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-undang, dan hanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang harus mendapat persetujuan DPR-GR dalam persidangan berikutnya, dan djika tidak mendapat persetujuan,

maka Peraturan Pemerintah itu harus di-
tjabut.

- (2). Adanja pendapat bahwa pembuatan Peraturan Pemerintah fihak Pemerintah tidak mengadakan konsultasi dengan DPR-GR sesuai dengan konsensus antara Wakil Pemerintah dengan Panitia Khusus 3 R.U.U., dapat kami djelaskan sebagai berikut :

Dalam pembi-
tjaraan RUU
Pemilu ada 2
konsepsi.
jaksi dari NU,
PNI dan PSII
jang tidak da-
pat diambil ka-
ta mufakat da-
lam permusja-

Dalam membitjarkan RUU PEMILU dalam Panitia Khusus 3 RUU dengan wakil Pemerintah cq. Menhak/Menpen/Menpenghubung MPR-DPR-DPA/Mendagri, chususnja mengenai masalah sistem pemilihan "Proportional Representation" dengan mendjamin setiap Daerah Tingkat II mempunjai sekurang-kurangnya seorang wakil, mengingat adanja 2 (dua) konsepsi jang tidak dapat diambil kata mufakat dalam permusjawaratan, jaitu konsepsi NU-PNI dan konsepsi PSII, maka Panitia Khusus 3 RUU minta kepada Pemerintah untuk mengadakan "pendekatan/kombinasi" antara 2 konsepsi jang tidak sedjalan itu. Dalam hal ini wakil Pemerintah bersedia menuangkannja dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Pemilu apabila RUU Per-

waratan.

Panitia Chusus 3 RUU minta kepada Pemerintah untuk mengadakan "pendekatan/kombinasi" antara 2 konsepsi tersebut.

undangan Pemilu sudah dapat diselesaikan oleh DPR-GR, dengan pengertian bahwa kepada Panitia Chusus 3 RUU akan diberikan pendjelasan mengenai "sistem pendekatannya" itu.

Achirnja setjara non-stop tidak ada waktu jang terluang, baik bagi Panitia Chusus 3 RUU maupun bagi wakil Pemerintah, sampai 3 hari sebelum reses DPR-GR dan sebelum 2 RUU disahkan/diselesaikan oleh DPR-GR, tanggal 20 Nopember 1969 Panitia Chusus 3 RUU mengadakan rapatnja jang terachir dan tanggal 24 Nopember 1969 DPR-GR mengesahkan 2 RUU jang esok harinja disusul dengan reses DPR-GR.

Mengingat TAP MPRS No. XLII/MPRS/1969 antara lain bahwa pungutan suara untuk pemilihan umum harus dilaksanakan oleh Pemerintah selambat-lambatnja 5 Djuli 1971, sedangkan diperkirakan persiapan untuk pungutan suara dihitung dari saat adanja Undang-undang Pemilu adalah 1½ tahun, maka dengan mengedjar waktu untuk menjelesaikan atau menetapkan Undang-undang Pemilu plus Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya selambat-lambatnja 1 Djanuari 1970,

"Sistim pendekatan" jang diminta Pansus 3 RUU, oleh Pemerintah telah dituang dalam pasal 93, 94 dan 96 P.P. No. 1 tahun 1970.

tidak dilihat adanya waktu cukup lama bagi Pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang "sistim pendekatan" jang dimaksud diatas kepada Panitia Khusus 3 RUU.

Pendekatan itu telah tertantum dalam pasal 93 sampai dengan pasal 96, terutama dalam pasal 94, jaitu bahwa penetapan terpilih didasarkan kepada suara terbanyak jang diperoleh suatu organisasi didaerah jang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (2) b Undang-undang No. 15 tahun 1969. Hal ini sesuai dengan sistim perwakilan berimbang. Dalam pasal 95 ditentukan bahwa kursi diberikan kepada terpilih berdasarkan urutan nomor penempatan dalam daftar tjalon dan hal ini adalah untuk memenuhi stelsel daftar.

- (3). Dalam Panitia Khusus 3 RUU di DPR-GR, setjara konkrit telah dikemukakan 2 (dua) matjam pendapat mengenai pelaksanaan: "Sistim Perwakilan Berimbang (Evenredige vertegenwoordiging/Proportional Representation) per Daerah Pemilihan (Daerah Tingkat I) dengan mendjamin tiap Daerah Tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil". (ini hanya untuk pemilihan D.P.R.).

Kedua pendapat itu adalah dari P.S.I.I.
dan dari N.U.-P.N.I. :

Usul Konsep P.S.I.I. :

- (a). Mulai pentjalonan sudah diatur: Tjalon-tjalon untuk Daerah Pemilihan (Daerah Tingkat I) sudah ditentukan/dialokasikan untuk Daerah Tingkat II mana masing-masing ditjalonkan.
Djumlah tjalon untuk Daerah Tingkat II sebanjak-banjaknja 2 kali djumlah anggota jang (menurut perhitungan) dapat dipilih/mewakili Daerah Tingkat II.
Penempatan tjalon-tjalon dalam daftar untuk Daerah Tingkat II dengan nomor urutan untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II (nomor urut tjalon tidak per Daerah Pemilihan).
- (b). Dalam penetapan hasil pemilihan, jang dilakukan menurut sistim Perwakilan Berimbang per Daerah Pemilihan : Sedjumlah kursi jang dimenangkan oleh suatu organisasi, dialokasikan satu demi satu kepada Daerah Tingkat II dimana organisasi itu memperoleh suara terbanyak, dibandingkan dengan organisasi lain dalam Daerah Tingkat II masing-masing.
- (c). Kursi jang dialokasikan kepada Daerah Tingkat II diberikan kepada tjalon nomor 1 dalam daftar organi-

Dalam Pansus
3 RUU sistim
jang diusulkan

oleh PSII tidak/belum kelihatan jang menjokong.

sasi untuk Daerah Tingkat II bersangkutan.

Sistim ini diusulkan oleh P.S.I.I. dan belum/tidak ada jang kelihatan menjokong (dalam Panitia Khusus 3 R.U.U.).

Usul Konsep N.U. – P.N.I. :

- (a). Dalam pentjalonan tiap-tiap organisasi menentukan prioritas (urutan keinginan/pilihan organisasi untuk menempatkan tjalon-tjalonnja jang terpilih) untuk Daerah Tingkat II. Dalam hal ini Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah Pemilihan diberi nomor urut jang untuk masing-masing organisasi berlainan. Nomor urut ini menentukan nomor prioritas organisasi dalam mengalokasikan tjalon-tjalonnja untuk Daerah Tingkat II dalam rangka mendjamin wakil untuk Daerah Tingkat II.
- (b). Nama-nama tjalon ditandai dengan nomor prioritas Daerah Tingkat II. Lebih dari satu nama dapat ditandai dengan nomor prioritas jang sama. Nomor prioritas pada nama tjalon itu menunjukkan pengalokasian tjalon untuk Daerah Tingkat II.
- (c). Dalam penetapan hasil pemilihan, jang dilakukan menurut sistim Per-

wakilan Berimbang per Daerah Pemilihan (=jumlah kursi yang diperoleh tiap-tiap organisasi seimbang/ evenredig dengan jumlah suara yang diperoleh organisasi dalam daerah pemilihan itu); Sedjumlah kursi yang dimenangkan oleh suatu organisasi, dialokasikan satu demi satu berturut-turut menurut nomor prioritas Daerah Tingkat II dan diberikan kepada tjalon organisasi itu yang sesuai dengan nomor prioritas tersebut.

- (d). Dalam pengalokasian tersebut pada sub (c), mungkin terdjadi satu Daerah Tingkat II mendapat lebih dari satu wakil dari beberapa organisasi (tidak dari satu organisasi).

Dalam hal yang demikian, maka organisasi yang memperoleh suara terbanyak untuk Daerah Tingkat II itu (untuk mewakili Daerah Tingkat II itu) dari pada organisasi yang lain, yang menurut nomor prioritasnja dapat menempati Daerah Tingkat II itu pula.

Organisasi yang tersebut terakhir ini harus menggeserkan penempatan tjalonnja yang terpilih (kursinja) kepada Daerah Tingkat II berikutnya menurut nomor prioritas.

Penggeseran ini berdjalan terus sampai tiap Daerah Tingkat II menda-

Sistim jang diusulkan oleh NU-PNI telah memperoleh perhatian beberapa partai lainnja, walaupun belum ada jang menjatakan setuju.

pat sekurang-kurangnja seorang wakil. Setelah tiap Daerah Tingkat II mempunjai sekurang-kurangnja seorang wakil, tidak dilakukan penggeseran, meskipun ada Daerah Tingkat II jang memperoleh lebih dari satu orang wakil dari beberapa organisasi atau dari satu organisasi.

Sistim ini diusulkan bersama oleh NU dan PNI dan sudah mendjadi perhatian beberapa partai lainnja, meskipun belum ada jang menjatakan menjetudjui atau tidak menjetudjui. Soalnya karena kelihatan sangat "ingewikkeld".

(4). Pendekatan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 :

- (a). Kedua sistim jang diusulkan itu menggunakan dasar SUARA TERBANJAK di Daerah Tingkat II dalam menempatkan wakil untuk Daerah Tingkat II. (NU-PNI mendahulukan prioritas, baru kemudian djika perlu untuk penggeseran didasarkan atas suara terbanjak). Prinsip menggunakan dasar "suara terbanjak" itu dipakai sebagai prinsip sistim pemilihan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
- (b). Djaminan sekurang-kurangnja seorang wakil untuk Daerah Tingkat

II ditentukan oleh banjaknja suara jang diperoleh suatu organisasi untuk Daerah Tingkat II.

Hal ini adalah wadjar/objektif, bahwa jang mewakili Daerah Tingkat II itu adalah organisasi jang mempunyai pendukung terbanjak dari rakjat pemilih di Daerah Tingkat II itu.

Keppres No. 40/1970 lebih landjut mengatur, bahwa "wakil Daerah Tingkat II" selajaknja disetudjui oleh "massanja" di Daerah Tingkat II itu dan diketahui Kepala Daerah untuk legalisasi dan eksistensi riil organisasi jang bersangkutan.

(5). Pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Barat.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Barat menurut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 diatur berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dibagian wilayah Republik Indonesia lainnja.

Hal ini didasarkan atas usul salah seorang anggota Panitia Khusus 3 RUU jang dinjatkan dalam rapat-rapat terachir Panitia Khusus tersebut dalam bulan Nopember 1969 mendjelang disahkannya RUU Pemilihan Umum oleh DPR-GR dan lama sesudah diterimanja RUU Pemilu oleh Panitia Khusus 3 RUU (RUU Pemilu se-

benarnja sudah dapat disahkan DPR-GR tanggal 10 Nopember 1967, tetapi ditunda untuk dapat disahkan bersama-sama dengan RUU Susunan MPR, DPR dan DPRD).

Dalam Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 20/Pimp/II/67-68 tanggal 16 Desember 1967 diputuskan antara lain "RUU Pemilu akan disahkan bersama-sama dengan RUU Susunan MPR, DPR dan DPRD" dan "Materi RUU Pemilu tidak dipersoalkan lagi."

Dengan mengingat Keputusan Pimpinan DPR-GR tersebut, Panitia Khusus 3 RUU tidak membitjarkan usul tentang pelaksanaan Pemilu di Irian Barat itu, karena ini berarti mempersoalkan lagi materi RUU Pemilu.

Dalam pada itu Panitia Khusus 3 RUU setjara musjawarah telah bermufakat, demikian pula wakil Pemerintah, untuk memasukkan soal tersebut dalam notulen rapat Panitia Khusus 3 RUU tanggal 19 Nopember 1969, bahwa : "Dengan mengingat bahwa kondisi dan situasi di Irian Barat memerlukan untuk memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPRD I dan DPRD II, tetapi materinja tidak dirumuskan/dimasukkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum, maka Presiden dapat membuat ketentuan-ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilihan

Dalam notulen
rapat Pansus 3
RUU tanggal
19 - 11 - 1969

ditentukan, bahwa Presiden dapat membuat ketentuan-ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilu di Irian Barat.

Umum di Irian Barat”.

Hal ini oleh Pimpinan Panitia Khusus 3 RUU dilaporkan dalam sidang Paripurna DPR-GR tanggal 21 Nopember 1969 dan laporan itu setjara keseluruhan diterima oleh Sidang Paripurna. DPR-GR tersebut. Dengan demikian maka bentuk peraturan pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Barat itu dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Meskipun Undang-Undang No. 15 tahun 1969 dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tidak memberikan perintah untuk mengatur hal itu dalam Peraturan Pemerintah, tetapi mengingat Keputusan Pimpinan DPRD-GR tanggal 21 Nopember 1969 dalam rangka mensahkan Rantjangan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 itu, maka pembuatan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum untuk Irian Barat itu tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 15 dan 16 tersebut.

- (6). Adanja perbedaan lampiran-lampiran yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 1/1970 dengan lampiran-lampiran yang terdapat pada Keputusan Presiden No. 40/1970 (lampiran-lampiran dimaksud berupa formulir pentjalonan), dapat kami jelaskan sebagai berikut :

KEPPRES No.

— Keppres No. 40 tahun 1970 tentang

40 tahun 1970
tentang peng-
aturan lebih
landjut pentja-
lonan untuk
pemilihan ang-
gota2 DPR,
DPRD I dan
DPRD II. da-
pat dibenarkan
oleh pasal 115
PP No. 1 tahun
1970.

tata-tjara pentjalonan untuk pemi-
lihan anggota-anggota DPR, DPRD
I dan DPRD II dibuat untuk "me-
ngatur lebih landjut" pentjalonan
untuk pemilihan anggota-anggota
DPR, DPRD I dan DPRD II jang
diatur dalam Bab V Peraturan Pe-
merintah No. 1 tahun 1970. Lan-
dasan Pengaturan lebih landjut itu
adalah antara lain pasal 115 Per-
aturan Pemerintah No. 1 tahun 1970,
jang berbunyi : "Hal-hal jang belum
tjukup diatur dalam Peraturan Pe-
merintah ini, akan diatur dengan
Keputusan Presiden".

Lampiran-lampiran jang terdapat
pada Peraturan Pemerintah No. 1
tahun 1970, chususnja jang berupa
tjontoh-tjontoh formulir untuk pen-
tjalonan ternjata belum tjukup be-
nar dan belum tjukup diatur, se-
hingga perlu diatur lagi atau diatur
lebih landjut, dan pasal 115 itu me-
mungkinkan jang sedemikian itu.
Apabila terdapat perbedaan antara
formulir-formulir pada Peraturan
Pemerintah No. 1 tahun 1970 dan
pada Keppres No. 40 tahun 1970,
maka jang berlaku adalah jang di-
atur dan diberikan tjontohnja pada
Keppres No. 40 tahun 1970.

- (7). Adanja Keputusan Presiden dan atau Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum jang dikeluarkan tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan dari Lembaga Pemilihan Umum cq Dewan/anggota Pertimbangan, maka perkenankan kami djelaskan sebagai berikut :

Pembuatan Keputusan Presiden Republik Indonesia adalah kewenangan penuh Kepala Negara, dengan atau tanpa meminta pertimbangan dari Lembaga-lembaga bidang eksekutif Pemerintahan, meskipun sifat Keputusan Presiden adalah pengaturan khusus dalam bidang eksekutif. Dalam hal ini termasuk pembuatan Kepres-Keppres mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum, jang dilakukan dengan minta atau tanpa minta pertimbangan dari Lembaga Pemilihan Umum cq. Dewan/anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum.

Pembuatan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia sampai pada waktu ini ada jang tidak dimintakan pertimbangan lebih dahulu dari Dewan/anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum mengingat :

Keputusan2
Mendagri / Ke-
tua LPU / Ke-
tua PPI. jang

- (a). Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum/
Ketua Panitia Pemilihan Indonesia
jang sampai pada waktu ini sudah

hingga saat ini sudah diterbitkan adalah berupa pengaturan penyelenggaraan Pemilu yang sifatnya teknis dan/atau administratif.

dibuat adalah berupa peraturan penyelenggaraan pemilihan umum yang sifatnya khusus teknis dan/atau administratif, sedangkan Pendjelasan pasal 8 ayat (7) dan (8) Undang-undang No. 15 tahun 1969 menentukan antara lain : "Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum atas permintaan atau atas prakarsa sendiri memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan yang pokok sifatnya kepada Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum, terdiri dari Anggota-anggota Pemerintah".

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia yang sampai pada waktu ini sudah dibuat, berhubung ketatnya ketentuan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum 1971 ini, harus dibuat dengan memperhatikan faktor waktu dan kebutuhan yang sangat mendesak.

- (c). Setiap Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia yang sudah dibuat, selalu disampaikan juga kepada Dewan/anggota-anggota Pertimbangan; apabila kemudian ada pertimbangan dari Dewan/anggota-anggota Pertim-

bangan jang dipandang perlu untuk diadakannya penindjauan/perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, maka hal itu akan dilaksanakan sewadjarnya.

Dewan / anggota Pertimbangan LPU atas prakarsa sendiri dapat memberikan pertimbangan mengenai hal2 pelaksanaan Pemilu jang perlu dituangkan dalam suatu keputusan Ketua LPU.

Selanjutnja diharapkan Dewan/anggota-anggota Pertimbangan atas prakarsa sendiri memberikan pertimbangan mengenai hal-hal atausoal-soal penjelenggaraan pemilihan umum jang dipandang perlu untuk dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, mendahului dibuatnja Keputusan-keputusan itu. Pertimbangan-pertimbangan itu akan diminta pula, apabila untuk pembuatan suatu Keputusan tjukup tersedia waktunya.

- (8). Kiranja perlu djuga didjelaskan kepada Saudara-saudara jth tentang hak kewenangan Panitia Pemilihan Indonesia dan/atau Panitia-panitia Pemilihan Daerah-daerah dibidang pembuatan peraturan-peraturan jang dapat dibuat/mendjadi hak kewenangan Panitia Pemilihan Indonesia dan/atau P.P.D. (Daerah) adalah membuat "ketentuan, produk hukum atau peraturan" mengenai tata tjara penjelenggaraan jang bersifat tehnik-administratif un-

tuk disesuaikan dengan situasi/kondisi
sedaerah/setempat, meskipun ketentuan-
ketentuan umum yang lebih tinggi status-
nya sudah dibuat dengan memperhatikan
situasi/kondisi objektif daerah-daerah da-
lam scope nasional.

3. Penjusunan struktur organisasi dan personalia.

**Pedoman dasar
Pembentukan
aparatur. Pemi-
lu didaerah.**

- a. Pedoman dasar dalam pembentukan aparatur
Pemilihan Umum adalah pasal 8 ayat (1) Un-
dang-undang No. 15 tahun 1969, yang menjata-
kan :

Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah
dibawah pimpinan Presiden.

Karena pelaksanaan Pemilihan Umum dipertang-
gung djawabkan kepada Pemerintah dan de-
ngan memperhatikan pula faktor partisipasi ke-
kuatan sosial-politik dalam hal membantu apa-
ratur Pemilihan Umum, maka pengisian per-
sonalia dalam rangka pembentukan aparatur
pemilihan umum didaerah-daerah diutamakan
prinsip efisiensi dan efektivitas dengan keten-
tuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1). susunan serasionil mungkin, tidak terlalu
log, tetapi tjukup flexible dalam menang-
gulangi berbagai matjam tugas;
- (2). dalam mengikut sertakan kekuatan sosial
politik untuk menjusun Panitia Pemilih-
an Daerah Tingkat I, Tingkat II dan
Panitia Pemungutan Suara, mengingat ter-
batasnja djumlah yang ditetapkan dalam

**Kekuatan sosi-
al politik di-
ikut sertakan
dalam keanggo-
taan PPD—I**

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, tidak semua partai politik dapat diikuti sertakan, sehingga diambil sebagai pedoman hanya memasukkan unsur-unsur politik (nasional dan agama) dan unsur golongan karya;

- (3). anggota Sekretariat disemua tingkat organisasi terdiri dari Pegawai Pemerintah dan bila dipandang perlu dapat mengangkat pekerdja-pekerdja lepas yang diatur dengan keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum;
- (4). anggota Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah;

Sebagai tambahan pendjelasan bahwa : aparaturnya Pemilihan Umum didaerah-daerah hanya merupakan unsur pelaksana, tidak menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan sendiri, sehingga dengan demikian faktor preventifnya sudah terjamin.

Terbatasnya jumlah anggota Panitia Pemilihan didaerah-daerah menurut ketentuan pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, memaksa tidak semua partai politik dapat didudukkan dalam Panitia-panitia tersebut, Berhubung dengan itu diambil kebijaksanaan untuk hanya memasukkan unsur-unsur politik (nasional dan agama) dan golongan karya.

- b. Dalam hal penjurusan komposisi personalia Panitia-penitia pelaksana didaerah, terutama di Ketjamatari dan Desa, timbul pertanyaan-pertanyaan dalam kalangan masyarakat, apakah yang dijadikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk menetapkan bahwa Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah saja. Dalam hal ini kami jelaskan, bahwa oleh karena Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah (pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969), maka sebagai akibat logisnya adalah pertanggungan jawab terakhir terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum ada pada Pemerintah, walaupun partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Pendaftaran pemilih merupakan kegiatan operasional yang sangat vital.

Pendaftaran pemilih merupakan kegiatan operasional yang sangat vital sebagai dasar untuk menentukan besarnya dukungan kepada golongan-golongan yang ikut dalam Pemilihan Umum dalam pemungutan suara nanti.

Disamping faktor pertanggungan-jawab tersebut, juga dipertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas dalam rangka pengisian personil Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pengawasan masyarakat dapat dilakukan, karena daftar pemilih akan setiap saat dapat dibatja pada papan pengumuman di setiap Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pemisahan antara Sekretariat Umum dan Badan Perbekalan & Perhubungan di Lembaga Pemilu.

c. Mengenai adanya pemisahan antara Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum, dapatlah kami terangkan sebagai berikut :

- (1). Lembaga Pemilihan Umum dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden No. 3 tahun 1970, dimana didalamnya terdapat sebuah Sekretariat Umum yang bertugas:
 - merentjanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dan menjelenggarakan administrasi Lembaga (pasal 14 ayat 1).
- (2). Badan Perbekalan dan Perhubungan dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden No. 4 tahun 1970 dengan tugas :
 - mengadakan barang-barang yang diperlukan menurut jumlah, bentuk, jenis dan kualitas yang direntjanakan oleh Sekretariat Umum dan yang telah disahkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum;
 - mengirim barang-barang tersebut;
 - dan menjelenggarakan hubungan pos telekomunikasi (pasal 2).
- (3). Mengingat besarnya jumlah barang-barang yang harus disediakan dan banyaknya jenis serta Complex-nja pengurusan Administrasi, pengiriman kedaerah-daerah dan pengawasannya, maka dipandang per-

lu untuk membentuk badan tersendiri.

- (4). Meskipun badan-badan tersebut dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden yang berlainan, tidak berarti bahwa kedua badan tersebut terpisah setjara rigid satu sama lain.

Adanya dua badan ini merupakan pembagian pekerjaan antara 2 unit didalam Lembaga Pemilihan Umum, dan masing-masing bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga (pasal 14 ayat (3) Surat Keputusan Presiden No. 3 tahun 1970 dan pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Presiden No. 4 tahun 1970).

- d. Mengenai screening terhadap anggota-anggota Panitia Pemilihan di daerah-daerah, kami terangkan bahwa clearance test itu diberikan kepada semua pegawai termasuk pegawai Daerah. Karena aparaturnya Pemilihan Umum di daerah-daerah adalah pelaksana-pelaksana yang bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah yang berhubungan dengan Pemilihan Umum pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969), maka wajarlah bagi mereka untuk diwajibkan pula mengisi formulir clearance test dari Team Screening Pusat (Daerah), karena mereka dalam kedudukannya sebagai anggota Panitia-panitia Daerah menjalankan tugas Pemerintah. Dengan demikian, mereka yang berasal dari kekuatan soshopol tidak akan dikurangi integritasnya.

Screening terhadap anggota-anggota Panitia Pemilihan.

Aparatur Pemilihan di IRBAR.

- e. Khusus mengenai aparaturnya Pemilihan Umum di Irian Barat diadakan ketentuan-ketentuan yang berlainan karena pada hakekatnya menurut ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 tidak ada perbedaan antara aparaturnya pemilihan umum di Irian Barat dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Satu-satunya perbedaan disebabkan karena struktur pemerintahan Irian Barat yang berlainan dengan daerah-daerah lainnya, sehingga untuk menempatkan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih harus diisikan ketentuan-ketentuan :

- a. Wilayah Kepala Pemerintahan Setempat disamakan dengan Ketjamatan/Tjamat.
- b. Distrik/Kepala Distrik disamakan dengan Desa/Kepala Desa.

4. Pelaksanaan Tehnis.

4.1. Pendaftaran Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih.

- a. Pada umumnya pelaksanaan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih berdjalan dengan lantjar, walaupun di beberapa Daerah mengalami sedikit kelambatan, karena :

- (1). sangat ketatnya pelaksanaan penelitian daftar Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih oleh Penguasa setempat.
- (2). belum tersedianya daftar lengkap da-

Kelambatan pelaksanaan pendaftaran.

**Djumlah Warga
Negara jang ti-
dak berhak me-
milih.**

**Daftar Warga
Negara Indone-
sia jang tidak
berhak memi-
lih jang sedang
dalam peneliti-
an.**

ri anggota-anggota ex P.K.I.

- (3). waktunja relatif terbatas.
 - (4). faktor-faktor geografis/keadaan medan.
 - (5). terbatasnja fasilitas angkutan dan komunikasi.
- b. Atas dasar bahan-bahan jang tersedia, maka sampai pertengahan bulan Djuli 1970 djumlah Warga Negara Indonesia jang tidak berhak memilih ialah 2.059.965 orang.
- Daftar-daftar jang akan menjusul kemudi-
an masih tetap dipergunakan, dan de-
ngan demikian djadwal operasionil pe-
njelenggaraan Pemilihan Umum akan da-
pat ditepati.
- c. Pelaksanaan tjara pendaftaran Warga Ne-
gara Indonesia jang tidak dapat didaftar
sebagai pemilih jang daftarnja sedang
dalam penelitian PANGKOPKAMTIB
dan jang belum disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri, pelaksanaannja diatur se-
bagai berikut :

1. Bagi Warga Negara Indonesia jang digolongkan kategori A.B. dan C tetap tidak didaftar dalam formulir Model A1, dan model A.
2. Bagi Warga Negara Indonesia jang masih diragukan akan disahkan atau tidaknja oleh Menteri Dalam Negeri dapat didaftar dalam formulir Mo-

Kechawatiran
Kepala Desa
untuk melaksa-
nakan pendaf-
taran.

del A1.

3. Bagi keluarga ex anggota P.K.I./Ormasnja tetap didaftar dalam Daftar Pemilih, ketjuali apabila mereka mendjadi anggota ex P.K.I./Ormasnja seperti Gerwani, Pemuda Rakjat dan lain-lainnja.

Karena masih ada kechawatiran dibeberapa daerah terhadap keamanan petugas2 maka Semua Petugas Panitia Pendaftaran Pemilih tetap dilindungi dan dijamin dari antjaman dan balas dendam orang-orang jang tidak bertanggung-djawab dan diantjam dengan hukuman menurut hukum.

4.2. Pendaftaran pemilih/penduduk.

- a. Sesuai dengan bunji pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.24/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970 telah ditetapkan saat dimulainja pendaftaran pemilih pada tanggal 5 Djuli 1970, dan teh-nis pelaksanaannja diatur dalam pelbagai peraturan perundangan jang berhubungan dengan pendaftaran pemilih/penduduk.
- b. Pendaftaran pemilih/penduduk Warga Negara Indonesia dalam rangka persiapan Pemilihan Umum serta pendaftaran rumah tangga dalam rangka persiapan sen-

Pelaksanaan
pendaftaran.

sus penduduk, pelaksanaannya diintegrasikan dan dikerdjakan bersama-sama oleh Petugas-petugas dari Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kantor Sensus dan Statistik Daerah.

- c. Baik kegiatan pendaftaran pemilih/penduduk Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, maupun kegiatan dalam rangka melaksanakan pembentukan Blok Sensus dan pendaftaran Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Petugas Kantor Sensus dan Statistik Daerah kedua-duanya dimulai pada tanggal 5 Djuli 1970.

4.3. Sensus penduduk dalam asrama atau kesatrian A.B.R.I. dan pendaftaran pemilih/penduduk anggota keluarga A.B.R.I. yang bertempat tinggal diluar asrama.

Sensus penduduk dalam asrama ABRI dan pendaftaran pemilih anggota keluarga ABRI diluar asrama.

Tjara pendaftaran atau sensus penduduk didalam asrama atau kesatrian ABRI dilakukan oleh Petugas dari ABRI sendiri yang ditundjuk oleh Instansi ABRI yang bersangkutan, sedang pendaftaran pemilih/penduduk bagi anggota/keluarga ABRI yang bertempat tinggal diluar asrama, pendaftarannya dilakukan oleh Petugas Sensus biasa/sipil dan Petugas Panitia Pendaftaran Pemilih.

4.4. Pendaftaran pemilih terhadap Warga Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang berstatus Persiapan Pensiun dan Pensiun.

ABRI yang ber-

Anggota ABRI yang sekarang (pada saat pendaf-

status persiapan
an Pensiun dan
Pensiun.

taran pemilih) berada dalam masa persiapan pensiun dan pada waktu pemungutan suara tanggal 5 Djuli 1971 telah dipensiunkan berhak untuk didaftar sebagai pemilih maupun sebagai tjalon dalam Pemilihan Umum.

Pemilih diatas
perahu / rakit.

4.5. Pendaftaran pemilih/penduduk jang bertempat tinggal diatas perahu/rakit.

Pemilih/penduduk jang bertempat tinggal diatas perahu atau rakit mendaftarkan diri pada Panitia Pendaftaran Pemilih jang wilayah kerdja' nja meliputi pelabuhan/pangkalan dari perahu/rakit pemilih tersebut.

Pendaftaran
gelandangan.

4.6. Pendaftaran Pemilih/penduduk jang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Pendaftaran pemilih/penduduk jang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dilakukan pada saat terachir mendjelang berachimja pendaftaran pemilih.

Pemilih dikumpulkan pada satu atau beberapa tempat sehingga merupakan satu atau beberapa rumah tangga khusus.

4.7. Pendaftaran pemilih bagi Warga Negara Indonesia Turunan Asing.

a. Warga Negara Indonesia turunan Asing meliputi keturunan Eropa, India, Arab, Tjina Taiwan dan R.R.T.

Apabila pendaftar mendjumpai warga negara Indonesia turunan Asing India, Arab, dan Tjina Taiwan apabila ia lahir di Indonesia, maka ditanjakan apakah ia menolak

Warga Negara
Indonesia tu-
runan Asing.

kewarganegaraan Indonesia.

Apabila ia lahir di Indonesia serta tidak menolak dan menundukkan surat keterangan seperti pengangkatan menjadi pegawai Negeri, kartu keanggotaan DPR/ DPRD, ijazah sekolah yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, kartu penduduk dan surat keterangan lainnya dimana ditunjukkan bahwa ia warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan dapat didaftar sebagai pemilih.

- b. Apabila menemui orang kulit putih (berdasarkan asal atau keturunan) yang sekarang mengaku warga negara Indonesia, maka orang tersebut harus menundukkan surat bukti memilih kewarganegaraan Indonesia.
- c. Apabila pendaftar menemui warganegara Indonesia keturunan Tjina R.R.T., maka bukti yang harus ditunjukkan adalah salah satu formulir I/I-A s/d VI/VI-A formulir C dan D. Dan apabila seorang keturunan Tjina R.R.T. itu tidak mempunyai bukti karena katanja hilang maka orang tersebut dapat meminta salinan formulir pada Pengadilan Negeri. Apabila orang tersebut tidak dapat menundukkan bukti-bukti yang diperlukan maka orang tersebut boleh juga didaftar dengan menambah tanda-tanja (?) pada ladjur 8 formulir Model A dan A1.

Apabila sebelum daftar Pemilih Tambahan disahkan orang yang bersangkutan tidak dapat menundukkan salinan formulir, namanya ditjoret sebagai pemilih.

**Pemilih tjatjad
badan.**

4.8. Pendaftaran pemilih yang tjatjad badan.

Pendaftaran pemilih yang tjatjad badan (buta, tidak dapat menggunakan kedua tangan/kakinya) dilaksanakan dengan ditolong oleh anggota keluarga dari pemilih tersebut.

**Pemilih diluar
negeri.**

4.9. Pendaftaran Pemilih/penduduk diluar negeri.

- a. Pendaftaran pemilih/penduduk diluar negeri dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri yang daerah Pemungutan suaranya meliputi tempat tinggal warganegara Indonesia yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan tentang Pendaftaran Pemilih yang tertjantum dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 berlaku pula terhadap pendaftaran pemilih warganegara Indonesia diluar negeri.
- b. Apabila terpaksa karena keadaan dan kondisi dinegara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada, Kepala Perwakilan yang bersangkutan dengan pengesahan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri dapat mengatur tjara pendaftaran pemilih menjimpang dari ketentuan tentang Pendaftaran Pemilih yang tertjantum dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 misalnja:
 - a. tidak dilakukan sensus warganega-

**Penentuan
umur 17 tahun.**

- ra Indonesia.
- b. petugas pendaftar tidak mendatangi rumah-rumah tetapi pendaftaran dilakukan digedung Perwakilan Republik Indonesia.
- c. pendaftaran dilakukan melalui pos bagi mereka yang bertempat tinggal diluar kota.

4.10. Saat penentuan umur 17 tahun untuk didaftar pada Daftar Pemilih.

- a. Jang dapat didaftarkan pada Daftar Pemilih adalah Warganegara Indonesia jang sudah genap berusia 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu.
Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, maka warganegara Republik Indonesia jang telah mentjapai umur 17 tahun ternyata sudah mempunyai pertanggungan-djawab politik terhadap Negara dan masjarakat, sehingga sewadjar-nja diberikan hak untuk memiliki wakil-wakilnja dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakjat.
- b. Apabila menghadapi ketiadaan/kekurangan bukti-bukti mengenai tanggal kelahiran seseorang maka sebagai langkah kebidjaksanaan pendaftar dapat membenarkan pernyataan seseorang bahwa ia telah berusia 17 tahun pada waktu pendaftaran pemilih, apabila menurut kejakinan pendaftar pernyataan itu diberikan setjara sungguh-sungguh dan dengan maksud ba-

ik. Apabila pendaftar masih ragu-ragu maka Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih jang memutuskan.

4.11. Penetapan djumlah anggota jang dipilih.

Djumlah ang-
gota DPR jang
dipilih.

- a. Djumlah anggota DPR adalah sebanyak 460 orang terdiri dari 360 orang anggota dari Golongan Politik dan Golongan Karya jang dipilih dan 100 orang anggota dari golongan Karya jang diangkat.

Djumlah anggota sebanyak 360 orang dipilih dalam 26 daerah pemilihan, jaitu sedjumlah Daerah Tingkat I dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnja 400.000 orang penduduk mendapat seorang wakil.

- b. Djumlah anggota DPR jang dipilih di Djawa ditentukan seimbang dengan djumlah anggota jang dipilih diluar Djawa. Adapun dasar untuk menetapkan djumlah anggota DPR jang dipilih bagi tiap-tiap Daerah Pemilihan ialah imbangan djumlah penduduk jang terdapat dalam daerah pemilihan jang tidak mengurangi ketentuan :

- (a). djumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnja sama dengan djumlah Daerah Tingkat II jang ada dalam daerah pemilihan jang bersangkutan.
- (b). tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnja mempunyai seorang wakil.

Djumlah anggota DPRD—I.

- c. djumlah anggota DPRD—I sekurang-kurangnya 40 dan sebanjak-banjaknja 75 orang dengan perhitungan sekurang-kurangnya untuk 200.000, orang penduduk mendapat seorang wakil.

Djumlah anggota DPRD untuk Daerah Tingkat I Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur masing-masing 75 orang, dan Daerah Tingkat I lainnja masing-masing sebanjak 40 orang.

Perubahan djumlah anggota DPRD-I ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Djumlah anggota DPRD—II.

- d. Menteri Dalam Negeri menetapkan djumlah anggota DPRD—II jang sekurang-kurangnya 20 dan sebanjak-banjaknja 40 orang dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 10.000 orang penduduk mendapat seorang wakil.

Perubahan djumlah anggota DPRD—II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

4.12. Pengadjuan nama dan tanda gambar Organisasi.

- a. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 kami telah menjampaikan surat kepada Pengurus-pengurus Besar Partai Politik dan Sekber Golkar agar mengadakan nama dan tanda gambar dengan memperhatikan jadwal waktu operasional penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971 dan tata tjara sebagai berikut :

Nama dan tanda gambar.

- (1). Jang mengadjudkan nama dan tanda gambar Organisasi untuk semua djenis pemilihan ialah Pengurus Besar Organisasi.
- (2). Nama jang diadjudkan oleh Organisasi itu adalah Nama Organisasi atau singkatan daripadanja.
- (3). Tanda gambar jang diadjudkan harus terang, sederhana dan hanja berwarna hitam dan putih.
- (4). Tanda gambar dalam persegi empat jang berukuran 2,5 cm pandjang dan 2,5, cm lebar dan gambarnya diatas kertas putih persegi pandjang jang berukuran 5 cm pandjang 2,5 cm lebar sehingga dibawah gambar itu tersedia persegi empat kosong jang berukuran 2,5 pandjang dan 2,5 cm lebar.
Tanda gambar itu disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum dalam rangkap 7.

- b. Sembilan Partai Politik dan Sekber Golkar telah mengadjudkan nama dan tanda gambarnya masing-masing, dan sekarang sedang dalam proses penelitian oleh Lembaga Pemilihan Umum.

4.13. Tata-tjara Pentjalonan.

- a. Dengan Keputusan Presiden No. 40 tahun 1970 telah ditetapkan tata-tjara pentjalonan untuk pemilihan anggota-anggota

Keputusan Presiden No. 40 tahun 1970.

DPR, DPRD—I dan DPRD—II sebagai berikut :

- tingkatan Organisasi jang mengadju-
kan tjalon.
- model surat formulir pentjalonan.
- tjara-tjara memperoleh surat formu-
lir pentjalonan.

Keharusan disebutnja pada daftar tjalon (untuk DPR) untuk Daerah Tingkat II mana tjalon itu diadjukan (conform pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 15 tahun 1969), merupakan akibat logis daripada suatu pengertian, bahwa seseorang jang memiliki sesuatu Daerah seharusnya dikenal oleh masjarakat didaerah itu.

- b. Ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 40 tahun 1970 tentang "tjalon jang diadjukan untuk Daerah Tingkat II" dan tentang "tjalon untuk Daerah Tingkat II perlu mendapat persetujuan dari Pengurus Organisasi Daerah Tingkat II", serta perlu diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan, adalah dalam rangka pengaturan lebih landjut/pelengkap karena adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 jang "belum tjukup diatur", jaitu pasal 94 dan 95, tentang "Daftar tjalon Organisasi dalam Daerah Tingkat II" jang dalam Bab V (Pentjalonan) belum diatur. Dan hal ini djuga untuk mengatur pelak-

sanaan pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 15 tahun 1969 bahwa "tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil untuk DPR".

Untuk representatifnya wakil Daerah Tingkat II itu, maka tjalon DPR dari Daerah Tingkat II perlu disetudjui, bahkan diusulkan kepada Pengurus Pusatnya oleh Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat II masing-masing, dan untuk legalisasinya (tentang eksistensinya Organisasi yang bersangkutan dan Pengurusnya di Daerah Tingkat II) perlu diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II.

Dengan demikian Pemerintah tidak melihat hal-hal tentang Pentjalonan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 jo Keputusan Presiden No. 40 tahun 1970 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 15 tahun 1969 dalam hal ini stelsel daftar dan perwakilan berimbang.

- c. Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 berbunyi : "Organisasi dilarang mentjalonkan seseorang untuk lebih dari satu daerah pemilihan yang sejenis".

Untuk pemilihan DPR Daerah Tingkat II adalah bukan daerah pemilihan, sehingga pasal 47 ayat (3) tersebut tidak melarang ditjalonkannya seseorang untuk lebih dari satu Daerah Tingkat II dalam satu Daerah

Pengadjuan tjalon.

Pemilihan Tingkat II untuk DPR.

Tetapi demi ketegasan, Pemerintah mengharapkan seseorang tjalon untuk DPR, selain tidak ditjalonkan untuk lebih dari satu daerah pemilihan juga tidak ditjalonkan untuk sebanjak-banjaknja/semua Daerah Tingkat II dalam suatu Daerah Pemilihan.

- d. Tidak ada ketentuan peraturan perundangan tentang pembatasan minimum djumlah tjalon jang boleh diadjukan dalam pemilihan.

Namun dari djiwa ketentuan peraturan perundangan mengenai pentjalonan, dapat diketahui, bahwa harus ada tjalon jang dikemukakan untuk tiap-tiap daerah pemilihan, selain harus diadjukan Nama & tanda gambar dalam pentjalonan.

Hal ini disebabkan, karena jang akan menjadi wakil baik untuk DPR maupun DPRD I/II adalah orang-orang jang sudah ditjalonkan (bukan nama dan tanda gambar) dan bagi para pemilih pada hakekatnja jang dipilih bukanlah tanda gambar, akan tetapi orang-orang/tjalon-tjalon jang ada "dibelakang" tanda gambar itu.

Mengingat hal tersebut diatas, maka selain harus ada (angka minimumnja dapat ditentukan) tjalon jang diadjukan untuk tiap-tiap daerah pemilihan, untuk pemilihan DPR harus pula ada (angka minimumnja dapat ditentukan) tjalon jang

diadjudkan untuk Daerah Tingkat II dalam setiap Daerah Pemilihan DPR.

4.14. Penelitian tjalon.

Dalam rangka pengamanan mental dan politik terhadap tjalon-tjalon dipandang perlu adanya "clearance certificate" sebagai dasar untuk pengesahan tjalon-tjalon.

Untuk keperluan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 39 tahun 1970 tentang Penelitian tjalon-tjalon Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat jang memuat pokok-pokok sebagai berikut :

- (a). penelitian tjalon oleh Panitia Peneliti,
- (b). tjara-tjara penelitian tjalon-tjalon,
- (c). penelitian tjalon oleh KOPKAMTIB,
- (d). penggunaan hasil-hasil penelitian.

4.15. Penerangan-penerangan oleh Organisasi.

Pendjelasan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 32/11/1970 tanggal 27 Mei 1970 tentang Pendjelasan sekitar Pelaksanaan Pemilihan Umum telah ditentukan pedoman-pedoman bahwa :

- (a). apabila sebelum waktu jang ditentukan untuk kampanye pemilihan ada Organisasi Golongan Politik/Karya jang hendak memberikan penerangan/pendjelasan tentang Pemilihan Umum, hal itu dapat dibenarkan sepanjang penerangan/pendjelasan itu :
 - (1). tidak bersifat kampanye,
 - (2). tidak bersifat umum tetapi bersifat

tertutup,

- (3). pendjelasan terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis Pemilihan Umum,
 - (4). memberitahukan sebetulnya kepada Penguasa setempat c.q. Kepolisian Republik Indonesia,
 - (5). tidak mempergunakan media bioskop, plakat, radio, karena hal ini sudah bersifat umum.
- (b). penerangan/pendjelasan oleh surat-surat kabar hanya dapat dibenarkan sepanjang mengenai hal-hal yang bersifat umum tidak bersifat kampanye.

4.16. Pemungutan Suara.

Jang dimaksud dengan pemilihan umum rahasia adalah pemilihan umum dengan menggunakan SURAT SUARA RAHASIA.

Dengan menggunakan Surat Suara itu tidak ada seorang lainpun dapat mengetahui, kepada tja-lon sipemilih itu diberikan, karena memberikan suara itu dilakukan dalam bilik dan seorang diri, meskipun badan sipemilih itu selama berada didalam bilik dapat dilihat dari luar bilik dalam jarak yang tidak terlalu dekat.

Namun demikian, dengan memperhatikan saran-saran dari Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum, bilik pemberian suara akan diatur sedemikian rupa, sehingga pemilih tidak terlihat seluruh tubuhnya, terutama gerakan-gerakan tangan dan kepalanya selama berada didalam bilik, meskipun pintu

Bilik suara. Kerahasiaan tetap dijamin.

bilik terbuka.

4.17. Penghitungan Suara.

**Penghitungan
suara di Tem-
pat Pemungut-
an suara.**

- a. Sesuai dengan jiwa pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, yaitu pada rapat penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara "perbuatan Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dalam rapat penghitungan suara harus dapat disaksikan, diikuti dan diteliti oleh semua orang yang diberi idjin untuk menghadiri rapat", maka sepanjang ketertiban dan keamanan dalam penghitungan suara di Tempat pemungutan suara tidak terhambat dan/atau terganggu, pemilih yang diberi idjin untuk hadir, mempunyai wewenang seperti yang ditentukan dalam pasal 88 ayat (2) itu.
- b. Pada waktu pemungutan suara, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berkali-kali harus menjelaskan kepada para pemilih bagaimana seharusnya pemilih memberikan suara dan menjelaskan pula suara/pentjoblosan surat suara yang sah dan yang tidak sah, perbuatan-perbuatan pemilih atas surat suara yang dapat mengakibatkan suara tidak sah, meskipun pentjoblosannya betul, dan sebagainya. Penjelasan demikian tidak cukup hanya diberikan pada waktu pembukaan rapat pemungutan suara, dimana belum semua pemilih hadir. Pada penghitungan suara, penelitian ter-

Hasil pemungutan suara dan perhitungan suara.

hadap surat suara harus sempurna tetapi tjukup bidjaksana, jaitu dengan mengambil inti daripada maksud pemungutan suara itu, ialah : "tegas dapat diketahui, kepada tjalon/tanda gambar mana suara diberikan" dan apabila ada keragu-raguan dari Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara, segera dimintakan pertimbangan dari pemilih-pemilih jang hadir, jang diundang/dikirim sebagai wakil unsur sosial politik jang ikut pemilihan umum.

- c. Semua hasil pemungutan suara dan penghitungan suara (berupa surat-surat suara jang terpakai dan tidak terpakai, Berita Atjara, Tjataan penghitungan suara) dikirim oleh Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam keadaan dibungkus dalam sampul-sampul dan disegel, kemudian pengirimannja dimasukkan kotak-kotak suara dan dikuntji serta disegel lubangnja/gemboknja. Pengangkutannja dari Tempat Pemungutan Suara dengan pengawalan petugas-petugas keamanan. Dalam pada itu tidak ditutup kemungkinan bagi pemilih jang hadir untuk membuat tjataan sendiri dan pada waktu diadakan pengumuman oleh Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara tentang hasil penghitungan suara di Tempat Pe-

mungutan Suara, tjatatan sendiri itu di-
tjotjokkan, kemudian dikirim kepada pim-
pinan Organisasinja di Ketjamatan, sehing-
ga pada waktu diadakan penghitungan
suara di Ketjamatan, wakil organisasi jang
hadlir dapat meneliti, apakah sesuai de-
ngan hasil penghitungan suara di Tempat
Pemungutan Suara - Tempat Pemungutan
Suara dalam lingkungan Ketjamatan.
Dengan demikian maka ada sosial control
jang sehat.

4.18. Penetapan hasil pemilihan/pembagian kursi.

- a. Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang
No. 15 tahun 1969 menjebutkan, bahwa
tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurang-
nja mempunyai seorang wakil.
Perkataan/istilah "wakil" itu tidak dapat
diartikan hanya sekedar "jumlah kursi".
Djadi harus benar-benar mempunyai ke-
dudukan representatif sebagai wakil dari
Daerah Tingkat II.

Perwakilan berimbang sebagai sistim pe-
netapan djumlah kursi jang diperoleh
suatu organisasi dalam daerah pemilih-
an, sudah dipenuhi menurut ketentuan
jang diatur dalam pasal 93 Peraturan Pe-
merintahan No. 1 tahun 1970 sebagai pe-
laksanaan dari pasal 23 Undang-undang
No. 15 tahun 1969. Untuk memenuhi
ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-
undang No. 15 tahun 1969 sedjumlah
kursi jang diperoleh suatu organisasi da-

Perwakilan ber-
imbang dan
stelsel daftar.

lam daerah pemilihan jang ditetapkan menurut sistim perwakilan berimbang, diberikan kepada tjalon-tjalon organisasi itu jang diadjudkan untuk "mewakili" Daerah Tingkat II.

Adapun stelsel daftar, selain telah tertjerman dengan ketentuan :

- (i). hak ikut serta dalam pemilihan umum hanya ada pada organisasi;
- (ii). surat suara memuat tanda-gambar-tanda-gambar organisasi, bukan nama-nama tjalon, dengan pengertian bahwa tiap tanda-gambar itu merupakan representatie/personifikasi daftar atau lijst, djuga ditentukan adanja daftar tjalon organisasi untuk tiap daerah pemilihan, baik untuk DPR maupun untuk DPRD-I dan DPRD-II.

persyaratan tjalon dan jang ditetapkan terpilih tidak menerima penetapannja.

- b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 15 tahun 1969, No. 16 tahun 1969 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 sudah djelas dan tegas, bahwa tjalon-tjalon harus memenuhi sjarat-sjarat jang tidak ringan dan dapat mendjadi tjalon setelah melalui penjaringan-penjaringan jang berat, baik dari organisasinja maupun dari Pemerintah menurut ketentuan peraturan perundangan.

Apabila jang ditetapkan terpilih tidak menerima penetapannja dengan alasan-

alasan jang tidak wajar seperti ditentukan dalam pasal 109 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, maka Pemerintah tidak mempunyai anggapan lain, selain penolakan itu diberikan dengan iktikad akibat jang kurang baik karena dapat menetjewakan rakjat pemilihan dan menetjewakan harapan Pemerintah, jang menganggap penetapan terpilihnja itu sudah baik dan tepat achirnja tidak diterima.

4.19. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Barat.

- a. **Sistim pemilihan** jang diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum dan undang-undang MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diperlakukan setjara keseluruhan di Irian Barat.

Hal ini disebabkan karena :

- (1). luasnja wilayah Propinsi Irian Barat (5 kali pulau Djawa).
- (2). penduduk jang jarang dan tersebar dalam kelompok-kelompok ketjil.
- (3). besarnja djumlah buta huruf.
- (4). organisasi kepartaian jang masih dalam taraf permulaan perkembangannya.
- (5). sedikitnja djumlah wakil jang harus dipilih.
- (6). komunikasi jang sangat sulit.

Berhubungan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 jang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di

Untuk IRBAR pemilihan anggota DPR dan DPRD-I dilakukan setjara bertingkat; dipilih oleh Wakil2 rakjat yang telah terpilih sebagai anggota DPRD-II.

Irian Barat diadakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan pemilihan umum yang berlaku bagi Wilayah Indonesia lainnya.

b. **Pemilihan bertingkat.**

Pemilihan anggota-anggota DPRD-II diselenggarakan setjara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Mengingat ketjilnja jumlah Anggota DPRD-I dan DPR yang dipilih dihubungkan dengan kondisi Daerah Irian Barat, maka pemilihan anggota DPR dan DPRD-I dilakukan setjara bertingkat, jaitu dipilih oleh rakjat yang telah dipilih sebagai anggota DPRD-II.

c. **Daerah Pemilihan adalah Distrik.**

Penyebaran penduduk yang tidak merata ditambah dengan tidak adanya alat perhubungan yang baik, menjebabkan lebih tepat untuk menetapkan Distrik sebagai Daerah Pemilihan lagi pemilihan anggota-anggota DPRD-II.

d. **Bukan stelsel daftar.**

Sistim pemilihan umum di daerah ini tidak dapat dilakukan dengan stelsel daftar, tetapi dititik beratkan pada orang-orangnja.

Sistim ini lebih mendekati kenyataan objektif, sehingga yang terpilih nantinya adalah tjalon-tjalon yang memang dikenal

dan didukung oleh rakyat pemilih.

e. **Organisasi yang dapat mengajukan tjalon.**

Disamping Organisasi golongan politik dan Organisasi golongan Karya ditentukan pula kesatuan Masyarakat sebagai organisasi yang dapat mengajukan tjalon dalam pemilihan umum.

Jang dimaksud Kesatuan Masyarakat disini adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial yang dinamakan kampung dan/atau kesatuan masyarakat yang bersifat genealogis yang terdiri dari suku-suku. Dalam komposisi DPRD, wakil-wakil dari Kesatuan Masyarakat tersebut masuk dalam golongan Karya.

f. **Tanda pengenal sebagai ganti tanda gambar.**

Pada umumnya keadaan para pemilih belum memungkinkan untuk dapat mengenal tanda gambar sesuatu organisasi.

Karena itu tjalon harus hadir pada waktu pemungutan suara berhadapan dengan para pemilih masing-masing dengan membawa tanda pengenal yang jelas yang tidak perlu merupakan tanda gambar.

g. **Tanda pemberian suara.**

Pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan dengan tjara pemberian suara yang harus ditjoblos, tetapi kepada

Golongan Politik/Karya dan Kesatuan Masyarakat.

Pengganti tanda gambar.

Pemberian su-

ara.

tiap pemilihan diberikan satu tanda pemberian suara yang dibuat dari plastik.

5. Bantuan Administrasi.

1. Kebidjaksanaan yang digariskan dibidang logistik adalah sebagai berikut :

a. Ekonomis, dalam arti bahwa kebidjaksanaan dan kegiatan pengadaan tidak menggontjangkan/melondjakkan harga pasaran bebas, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga biaja yang sudah sedemikian dihemat dapat mentjukupi kebutuhan.

Kebidjaksanaan
dibidang logistik.

b. Efektif, dalam arti bahwa biaja yang tersedia betul-betul tersalur sesuai dengan anggaran dan tidak terdjadi kebotjoran-kebotjoran untuk tudjuan-tudjuan yang bukan semestinja.

c. Efisien, dalam arti bahwa segala sesuatu dilakukan setjara terarah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan tersedia ditempat pada waktu yang ditentukan.

2. Distribusi anggaran.

a. Dalam rangka pelaksanaan pembiajaan Persiapan Pemilihan Umum, Pemerintah telah menjedjakan bugget sebesar Rp. 16 milyar yang

dibebankan pada Bagian IXA dan penjalurannya dibagi dalam 3 tahap tahun anggaran jaitu : tahun 1969/1970 sebesar Rp. 1 milyar; tahun 1970/1971 sebesar Rp. 10 milyar; tahun 1971/1972 sebesar Rp. 5 milyar.

- b. Dalam realisasi tahun anggaran 1969/1970 penggunaannya diperintji :

(1). Rp. 160 djuta untuk biaya Personil/pegawai yang meliputi honorarium, perdjalanan dinas, uang sidang, biaya conferentie Gubernur/pelantikan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, penyelenggaraan Santiadji mulai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I s/d Tingkat PPS/Ketjamatan; baik ditingkat Pusat maupun Daerah.

(Surat Keputusan, otorisasi Menteri Keuangan R.I. tanggal 14 Mei 1969 No. D. 15.3.2.1. 39)

(2). Rp. 840 djuta untuk biaya pengadaan Perbekalan dan Pengangkutan (Surat Kepu-

Biaya personil/
pegawai.

Biaja pengada-
an perbekalan
dan pengang-
kutan.

Bendaharawan
Pemegang
Uang Muka
Tjabang.

tusan otorisasi Menteri Keuangan R.I. tanggal 26 Djanuari 1970 No. D. 15.3.2.14). Pengeluaran ini meliputi pembelian/pemesanan barang-barang yang segera dibutuhkan antara lain kertas-kertas untuk tanda gambar/kartu, alat-alat perhubungan (anggaran yang tersedia untuk perhubungan di-switch ke kendaraan mengingat urgensi), kendaraan-kendaraan bermotor dan biaja pertjetakan formulir-formulir dan up-gradinggedung Lembaga Pemilihan Umum.

- c. Guna keperluan Biaja Personil di-tingkat Daerah dalam tahun anggaran 1969/1970, mengingat masa anggaran telah hampir berakhir, sedangkan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I baru dibentuk jaitu dalam bulan Djanuari 1970 maka untuk pengelolaan Keuangan tahun 1969/1970 tjukup dibentuk Bendaharawan Pemegang Uang Muka Tjabang (PUMT); sedangkan Belandja Barang disentralisir pada Pusat (Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum).
- d. Penjediaan uang untuk pembiajaan

dalam tahun anggaran 1970/1971 sebesar Rp. 10 milyar dilakukan dalam sistim triwulan dengan djatah dalam triwulan ke I sebesar Rp. 3 milyar, triwulan ke-II sebesar Rp.4 milyar, triwulan ke-III sebesar Rp.2 milyar dan triwulan ke-IV Rp.1 milyar.

Berkenaan dengan itu disusunlah suatu djadwal pembiajaan Pemilihan Umum - dalam tahun 1970/1971 (terlampir) tanpa memuat djumlah biaja persediaan Pemilihan Umum di Luar Negeri, karena data-datanja belum diterima.

- e. Persediaan uang triwulan ke-I sebesar Rp. 3 milyar telah diatur dengan s.k.o. Menteri Keuangan R.I. tanggal 9 Mei 1970 No. D.15-3 CR. 1-13 dengan perintjian untuk keperluan-keperluan.
 - (1). Pusat : Belanja Pegawai sebesar Rp. 13,575.000,-
Belanja Barang sebesar Rp. 2.009.519.930,-
 - (2). Daerah : Belanja Pegawai sebesar Rp. 703.390.320,-
Belanja Barang sebesar Rp. 193.514.750,-
- f. Persediaan biaja untuk pengadaan perbekalan dan pengangkutan untuk

Pusat digunakan untuk keperluan pembelian kertas-kertas, mesin-mesin kantor, S.S.B., Kendaraan Bermotor untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II, ongkos penjetakan dan biaya pengangkutan sedangkan Belandja Barang untuk Daerah yang dapat direalisir dalam triwulan ke-I meliputi pembelian kotak kartu pemilih dan pembelian kendaraan-kendaraan bermotor/ tidak bermotor untuk keperluan Panitia Pemungutan Suara/Ketjamatan-ketjamatan.

- g. Khusus untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Barat, djumlah dropping dilakukan dalam djumlah yang bulat mengingat untuk Irian Barat memerlukan pengeluaran-pengeluaran yang khusus, sehingga penggunaannya diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Dati I Irian Barat dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- h. Dalam mengadjukan kebutuhan fisik triwulan ke-I ini terpaksa dilakukan penjimpangan dari djadwal penggunaan pembiajaan Pemilihan Umum tahun 1970/1971 yang telah

Penjimpangan
dari jadwal
penggunaan
pembiajaan Pe-
milihan Umum
tahun 1970 /
1971.

Biaya persiapan

disusun, mengingat dalam triwulan ke-I harus diselenggarakan santiadji terhadap petugas-2 dari Panitia Pendaftaran (PPP) ditiap ibukota Ketjamatatan sehingga perlu diakukan penggeseran-2 dari Biaja pembelian kendaraan bermotor/tidak bermotor untuk keperluan santiadji.

Demikian pula dengan besarnja — dropping ke Irian Barat jang semula diperkirakan tjukup Rp. 50.000. 000,- tiap triwulan, berhubung dengan adanya perubahan peraturan moneter, praktis penjediaan uang perlu mendapat penindjauan kembali. Disamping itu dalam triwulan ke-I ini harus disediakan biaja untuk keperluan pendaftaran penduduk dan pendaftaran pemilih jang diselenggarakan mulai tanggal 5 Dju-li 1970.

Untuk keperluan ini telah didapat persetujuan Menteri Keuangan R.I. untuk mendapat tambahan djatah triwulan ke-I sebesar Rp. 250.000. 000,-

Pada tanggal 4 Djuni 1970 telah diterima kebutuhan fisik triwulan ke-I untuk keperluan biaja persiapan Pemilihan Umum di Luar Negeri sebesar \$ 9.160,- jang diperintji dalam djenis pengeluaran-pengelu-

Pemilihan Umum di Luar Negeri.

Prosedure pembelian barang.

aran : honorarium, ongkos kantor, perdjalananan dinas, belandja barang dan pertjetakan; dan dalam perintjiaan djumlah uang untuk tiap Perwakilan R.I. di Luar Negeri sebanyak 55 tempat.

Mengingat djatah kredit jang tersedia untuk. triwulan ke-I telah habis diotorisir, maka pendjatahan tersebut baru dapat disediakan dalam triwulan ke-II dengan djumlah sebesar 2 X \$9.160,- atau didjabarkan dengan perkalian Rp.370,- per \$ 1,- nya menghasilkan djumlah sebesar Rp. 6.925.000,-

- j. Prosedure pembelian barang-barang untuk keperluan persediaan Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam KEPPRES No. 33 Tahun 1969 jo. KEPPRES No. 24 tahun 1970 antara lain dengan melalui tender; akan tetapi penjediaannja tidak dapat sesuai dengan djadwal, mengingat sebagian besar dari barang-barang termaksud harus diimpor, antara lain :
- (1). kertas;
 - (2). mesin-mesin kantor (lk. 50% dari kebutuhan);
 - (3). alat-alat komunikasi;
 - (4). kendaraan bermotor(lk. 75%

kebutuhan).

Selanjutnya dalam pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diluar Djawa perlu adanya penghususuan terhadap Daerah-daerah jang mempergunakan alat-alat perhubungan diatas air (perahu bermotor) misalnja Dati II Berau dan Dati II Bulongan di Kalimantan Timur.

- k. Dalam penjusunan kebutuhan pembiayaan untuk triwulan ke-II dan selanjutnja, diharapkan telah didasarkan atas data-data jang riil, namun tidak terlepas dari djumlah kredit jang tersedia.

5.3. Pembentukan Bendaharawan

Sedjak pembentukan Lembaga Pemilihan Umum, pengelolaan keuangan Pemilihan Umum telah disesuaikan/disempurnakan dengan struktur organisasi Lembaga Pemilihan Umum jaitu dengan pembentukan/penundjukan :

- a. Bendaharawan pada Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum jang bertugas mengurus belandja pegawai Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia.
- b. Bendaharawan pada Badan Perbekalan dan Perhubungan jang bertugas mengurus belandja barang keperluan Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indone-

sia ditingkat Pusat dan Daerah;

- c. Bendaharawan pada Panitia Pemilihan Umum di Luar Negeri;
- d. Bendaharawan pada tiap-tiap Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang dibantu oleh Bendaharawan Pemegang Uang Muka Tjabang pada tiap-tiap Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
Pengaturan pendjatahannya disentralisir oleh Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum cq. Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.

5.4. Pentjetakan.

Pentjetakan formulir-formulir diselenggarakan setjara terpusat oleh Lembaga Pemilihan Umum atas beban djenis pengeluaran ongkos tjetak dan atas pertimbangan tehnik pelaksanaan pentjetakannya dapat didesentralisir ke Daerah-daerah.

Formulir Model A (Daftar Pemilih) dan formulir Model A1 (Kartu Pemilih) telah selesai ditjetak dan telah dikirimkan ke Daerah-daerah. Formulir-formulir lainnya akan diselesaikan dengan urutan prioritas atas dasar urgensi menurut djadwal waktu operasional.

5.5. Pengiriman formulir Model A dan A1.

- a. Semula direntjanakan pengirimannya dengan ongkos angkutan yang murah, tetapi karena terlambat mentjetak chususnja ti-

dak tersedianja kertas karton pada waktu-
nja, maka pengirimannja lalu dilaksana-
kan dengan kapal terbang.

- b. Ongkos pengangkutan dari Pusat ke Daerah dalam kwartal ke-I tahun anggaran 1970/1971 sudah ditetapkan sebesar Rp. 46 djuta, tetapi, karena harus mentjarter pesawat terbang maka djumlah tersebut tidak menjukupi lagi, karena itu timbul problema mengenai biaja pengangkutan dari Propinsi ke Desa-desa, sehingga perlu diadakan penggeseran pos anggaran.

5.6. Penjediaan barang-barang menurut jadwal waktu.

- a. Mengenai waktu pengadaan maupun waktu pengiriman barang-barang oleh Badan Perbekalan dan Perhubungan, telah dibuat sechedule jang disesuaikan dengan rentjana kegiatan operasional maupun schedule dropping anggarannja.
- b. Daerah-daerah sudah dapat mendesak kebutuhan akan mesin tulis, mesin stensil, mobil, perahu motor dan lain-lainnja, tetapi karena penjediaan keuangannja telah ditetapkan sesuai dengan schedulennja, maka pengadaannja pun terikat pada schedule tersebut.
Untuk mengatasi hal ini, kepada Daerah-daerah telah diandjurkan agar mengandalkan pada means jang tersedia di Daerah.

5.7. Telekomunikasi.

- a. Dalam bidang telekomunikasi telah dibentuk Koordinator Perhubungan Pemilihan Umum berdasarkan Instruksi Kopkamtib No. 003/1970 dengan maksud untuk dapat mentjapai efisiensi dan effektivitas maksimal dalam pemanfaatan material dan personil telekomunikasi, baik yang ada pada kesatuan-kesatuan ABRI maupun pada instansi-instansi Pemerintah.
- b. Dalam rapat Koordinasi Perentjanaan dan Persiapan Sistim Perhubungan Pemilihan Umum tahun 1971 pada tanggal 6 Djuni 1970 telah diadakan pembahasan dan penentuan djenis pesawat radio untuk komunikasi dan konsep-konsep operasionalja.
- c. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 27/LPU tahun 1970 tentang Pengadaan barang-barang yang diperlukan dalam rangka penjelenggaraan Pemilihan Umum telah ditetapkan bahwa djenis S.S.B. yang akan dibeli ialah N.E.C. dan FURUNO.

VII. PENUTUP DAN KESIMPULAN.

1. Setjara berturut-turut Saudara-saudara yang terhormat telah mengikuti pendjelasan-pendjelasan tentang hasil kerdja nasional, terutama dalam usaha-usaha pemantapan stabilisasi politik, se-

djarah dan tudjuan PERMEN 12, Peraturan Pemerintah No. 6, usaha-usaha pengelompokan partai-partai dan pelaksanaan Pemilihan Umum.

2. Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hanya dengan pembangunan jang terentjana baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh kita dapat mentjapai suatu Masjarakat Pantja Sila adil dan makmur.
3. Penikmatan hasil kerdja nasional oleh seluruh masjarakat menumbuhkan pengertian, keinsjafan, kejakinan, kerukunan dan dinamika seluruh Rakjat dan Bangsa Indonesia jang dapat merupakan landasan bagi pembangunan dan pengembangan suatu tata-hidup dan Masjarakat Pantja-sila dalam masa-masa jang akan datang.
4. Dengan menjadari sepenuhnya, bahwa dalam taraf stabilisasi politik dan ekonomi sekarang ini selalu ada kekuatan-kekuatan latent anti-Pantja-sila jang akan terus-menerus berusaha menginfiltir kekuatan-kekuatan Orde Baru untuk menggagalkan Pantja Krida Kabinet Pembangunan, maka kewaspadaan perlu dipelihara dan ditingkatkan.
5. Dari uraian mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum dapatlah ditarik satu kesimpulan jang djelas, jaitu bahwa Pemilihan Umum jang akan datang harus diarahkan sehingga benar-benar merupakan suatu sarana untuk mentjapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan pe-

njusunan tata-kehidupan jang didjiwai oleh Pan-
tja Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Demikianlah kiranya hal-hal jang perlu kami sampaikan ke-
pada Saudara-saudara jang terhormat pada kesempatan ini.
Terima kasih kami utjapkan atas perhatian dan pengertian
Saudara-saudara sekalian.

**MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

Untuk pengesahan :	t.t.d.
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM	
WAKIL SEKRETARIS UMUM,	AMIRMACHMUD
t.t.d.	

(Erman Hariroestaman)

DJUMLAH PENDUDUK : 3.500.000
 DJUMLAH SUARA JANG MASUK : 1.900.000
 DJUMLAH WAKIL JANG DIANGKAT : $1/5 \times 40 = 8$) Djumlah kursi :
 DJUMLAH WAKIL JANG DIPILIH : 32) Minimum - 40 (P.P.2/1970 Ps. 9 ayat (1)a.)
 B.P.P. (Bilangan Pembagi Pemilihan) : $1.900.000 = 59.375$

32

Nomor urut.	Nama organisasi :	Djumlah suara :	Tingkat ke-1		Tingkat ke-2			Tingkat ke-3		Djumlah kursi :	Keterangan
			Kursi :	Sisa suara :	Gabungan	Kursi :	Sisa suara :	Kursi			
1.	PARTAI Q	380.000	6	23.750	59.375	-	0	-	-	6	x). Karena djumlah sisa suara sama, diadakan un- dian (P.P.1/ 1970 Ps. 98 ayat (4)).
2.	PARTAI R	95.000	1	35.625		1		1	-	-	
3.	PARTAI S	380.000	6	23.750	-	-	23.750	-	6		
4.	PARTAI T	28.500		28.500	-	-	28.500	1 x)			
5.	PARTAI U	237.500	4	0	35.625	-	35.625	-	4		
6.	PARTAI V	95.000	1	35.625		-		1	-	2	
7.	PARTAI W	28.500	-	28.500	-	-	28.500	- x)	-		
8.	PARTAI X	14.500	-	14.500	-	-	14.500	-	-		
9.	PARTAI Y	76.000	1	16.625	-	-	16.625	-	1		
10.	GOLKAR	565.000	9	30.625	-	-	30.625	1	10		
D J U M L A H :		1.900.000	28			1		3	32		

Tjataan : Angka2 djumlah suara tersebut diatas adalah angka2 fiktif.

TJONTOH PEMBAGIAN KURSI D.P.R.D.-II UNTUK DAERAH PEMILIHAN :

KABUPATEN LAMPUNG - SELATAN

(Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 Ps. 97 dan 98)

DJUMLAH PENDUDUK : 1.036.000.
 DJUMLAH SUARA JANG MASUK : 570.000
 DJUMLAH WAKIL JANG DIANGKAT : $1/5 \times 40 = 8$) Djumlah kursi :
 DJUMLAH WAKIL JANG DIPILIH : 32) Maximum — 40 (P.P.2/1970 Ps. 9 ayat (1)b.)
 B.P.P. (Bilangan Pembagi Pemilihan) : 570.000 = 17.813

32

Nomor urut :	Nama Organisasi :	Djumlah suara :	Tingkat ke-1		T i n g k a t ke-2			Tingkat ke-3		Djumlah kursi :	Keterangan :
			Kursi :	Sisa suara :	Gabungan :	Kursi :	Sisa suara :	kursi :			
1.	PARTAI Q	135.000	7	10.309		—	—	—		7	
2.	PARTAI R	11.000	—	11.000	21.309	1	3.496	—		1	
3.	PARTAI S	125.000	7	309	—	—	309	—		7	
4.	PARTAI T	7.000	—	7.000	—	—	7.000	—		—	
5.	PARTAI U	38.000	2	2.374		—	—	—		2	
6.	PARTAI V	13.500	—	13.500	15.874	—	15.874	1		1	
7.	PARTAI W	8.000	—	8.000	—	—	8.000	1		1	
8.	PARTAI X	5.500	—	5.500	—	—	5.500	—		—	
9.	PARTAI Y	20.500	1	2.687	—	—	2.687	—		1	
10.	G O L K A R	206.500	11	10.557	—	—	10.557	1		12	
D J U M L A H :		570.000	28			1		3		32	

TJONTOH PEMBAGIAN KURSI D.P.R. UNTUK DAERAH PEMILIHAN :
 PROPINSI L A M P U N G.
 (Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 Pasal 193)

DJUMLAH PENDUDUK	3.500.000
DJUMLAH SUARA JANG MASUK	1.900.000
DJUMLAH WAKIL JANG DIPILIH UNTUK D.P.R.	6 (P.P.2/1970 Pasal 7)
B.P.P. (BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN)	1.900.000
	<u> = 316.667</u>

6

Nomor urut :	Nama organisasi	Djumlah suara	Tingkat ke-1		Tingkat ke-2			Tingkat ke-3		Djumlah kursi	Keterangan
			Kursi	Sisa suara	Gabungan	Kursi	Sisa suara	Kursi			
1.	PARTAI Q	380.000	1	63.333	158.333	--	158.333	1	1		
2.	PARTAI R	95.000	--	95.000					1		
3.	PARTAI S	380.000	1	63.333	--	--	63.333	--	1		
4.	PARTAI T	28.500	--	28.500	--	--	28.500	--	--		
5.	PARTAI U	237.500	--	237.500	332.500	1	15.833	--	1		
6.	PARTAI V	95.000	--	95.000				--	--		
7.	PARTAI W	28.500	--	28.500	--	--	28.500	--	--		
8.	PARTAI X	14.500	--	14.500	--	--	14.500	--	--		
9.	PARTAI Y	76.000	--	76.000	--	--	76.000	--	--		
10.	G O L K A R	565.000	1	248.333	--	--	248.333	1	2		
	D J U M L A H	1.900.000	3			1		2	6		

Tjataan : Angka-angka tersebut diatas adalah angka-angka tiktif.

BAGAN B

TJONTOK PEMBAGIAN KURSI DPR PERDAERAH TK. II DALAM DAERAH PEMILIHAN :
PROPINSI L A M P U N G

NOMOR URUT	DAERAH TINGKAT II.	DJUMLAH SUARA JANG DIPEROLEH ORGANISASI-ORGANISASI										DJUMLAH SUARA JANG DIPEROLEH SEMUA OR- GANISASI DALAM TIAP DAERAH TK. II	KETERANGAN
		PARTAI Q	PARTAI R	PARTAI S	PARTAI T	PARTAI U	PARTAI V	PARTAI W	PARTAI X	PARTAI Y	GOLKAR		
1.	KODYA TELUKBETUNG /TANDJUNG KARANG	15.000 <u>4</u>	6.000 <u>7</u>	19.500 <u>3</u>	4.000 <u>8</u>	22.500 <u>2</u>	7.500 <u>5</u>	2.500 <u>9</u>	1.500 <u>10</u>	7.000 <u>6</u>	104.500 <u>1</u>	190.000,-	Partai Q : = 1. Kursi Partai R : = 1. Kursi Partai S : = 1. Kursi Partai U : = 1. Kursi Golkar : = 2. Kursi =*= P.P.1/1970 Pasal 94.
2.	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	135.000 <u>2</u>	11.000 <u>7</u>	125.000 <u>3</u>	7.000 <u>9</u>	38.000 <u>4</u>	13.500 <u>6</u>	8.000 <u>8</u>	5.500 <u>10</u>	20.500 <u>5</u>	206.500 <u>1</u>	570.000,-	
3.	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	170.000 <u>2</u>	45.500 <u>4</u>	201.500 <u>1</u>	13.000 <u>9</u>	120.000 <u>3</u>	32.500 <u>6</u>	14.000 <u>8</u>	3.000 <u>10</u>	30.000 <u>7</u>	35.500 <u>5</u>	665.000,-	
4.	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	60.000 <u>2</u>	32.500 <u>(6</u>	34.000 <u>5</u>	4.500 <u>8</u>	57.000 <u>3</u>	41.500 <u>4</u>	4.000 <u>9</u>	4.500 <u>8</u> <u>7</u>	18.500 <u>7</u>	218.500 <u>1</u>	475.000,-	
DJUMLAH SUARA DAERAH PEMILIHAN PROPINSI L A M P U N G		380.000	95.000	380.000	28.500	237.500	95.000	28.500	14.500	76.000	565.000	1.900.000	

TJATATAN :

- a. 1, 2 dan seterusnya : Menunjukkan nomor urutan jumlah suara-terbanyak jang diperoleh organisasi-2 dalam daerah tingkat II.
- b. Angka-angka tersebut diatas adalah angka-angka fiktif.

D J A W A B A N

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ATAS PERTANJAAN JANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN

PEMILIHAN UMUM 1971 JANG DIADJUKAN

ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR

PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 1970

D J A W A B A N

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM ATAS PERTANJAAN JANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1971 JANG DIADJUKAN OLEH ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 1970

Saudara Pimpinan dan anggota Komisi III jang terhormat,

Terlebih dahulu kami pandjatkan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa pada malam hari atas perkenan-Nja kita dapat melandjutkan rapat kerdja dengan atjara : Mendjawab pertanjaan-pertanjaan jang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 jang diadjukan oleh anggota-anggota Komisi III jang terhormat.

Setelah kami peladjari dengan seksama pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan, ternjata sebahagian telah terdjawab dalam Pendjelasan kami pada tanggal 8 Agustus 1970.

Dengan mengingatkan kembali kepada Saudara-saudara penanja jang terhormat terhadap Pendjelasan kami ini, jang naskah tertulisnja Saudara-saudara telah menerimanja, perkenankanlah kami memberikan djawaban-djawaban sebagai berikut :

1. Mengenai pembuatan kotak surat suara, oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum telah dikeluarkan surat Keputusan No. 106 tahun 1970 tentang kotak kartu pemilih dan kotak surat suara.

Dalam Surat Keputusan tersebut antara lain ditentukan, bahwa penjenggalan pembuatan kotak surat suara diserahkan kepada Panitia Pemilihan Daerah I untuk daerah kerdjanja dengan pedoman harga satuan Rp. 1.550,- (seribu lima ratus lima puluh rupiah) termasuk harga kuntji gemboknja.

Tentang penentuan harga satuan ini sudah ditinjau dari pelbagai segi, antara lain harga kaju, upah kerdja yang berlaku didaerah-daerah dan terutama terbatasnja biaja keseluruhan yang disediakan untuk penjenggalan Pemilihan Umum.

Oleh Saudara penanja yang terhormat biaja untuk kotak surat suara dirasakan sangat minim, tetapi apabila diingat bahwa ukuran kotak itu tidak besar (hanya 40 x 40 x 50 cm) dan dibuat setjara massal (yang tentunya ada keringanan harga), maka biaja tersebut dapat dianggap memadai menurut situasi dan kondisi yang kita hadapi.

Mengenai biaja harga satuan ini tidak dapat diajukan tambahan, hanya apabila terpaksa Panitia Pemilihan Daerah diberikan wewenang untuk menurunkan kualitas kotak (berarti harga turun), sepanjang hal ini tidak mengurangi fungsi kotak surat suara yang sebenarnya dalam rangka pemungutan suara nanti.

Perlu ditambahkan, bahwa hingga saat ini tidak ada Panitia Pemilihan Daerah I yang menyatakan tidak sanggup melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan No. 106 itu, baik dalam pengadaan kotak kartu pemilih maupun kotak surat suara.

2. Pertanyaan kedua berbunyi : W.N.I. yang ditjabut hak pilihnja/jang merasa dirugikan hak pilihnja. Bagi W.N.I. yang ditjabut hak pilihnja sudah djelas karena sudah ada peraturan-peraturannja. Tetapi bagi mereka yang tidak ditjabut hak pilihnja dan tidak didaftar terang mereka merasa dirugikan.

Kepada siapakah mereka harus mengadu, atau dapatkah pengaduan ter-

sebut dilakukan oleh Organisasi dimana mereka itu tergabung.

Demikian juga bagi seorang yang telah ditjalonkan lalu didiskwalifikasi oleh Panitia Peneliti/Kopkamtib sebagaimana yang dimaksud oleh Kepres No. 39/1970.

Kepada siapa mereka harus mengadu atau bagaimana harus membela diri.

Berhubung dari pertanyaan tersebut tidak begitu jelas apakah alasan pendaftar untuk tidak mendaftar orang yang bersangkutan, maka kemungkinan tidak mendaftar ini didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :

- a. **Panitia Pendaftar Pemilih** meragukan umur yang bersangkutan.
- b. **Pendaftar** meragukan kewarganegaraan yang bersangkutan dan dianggap orang tersebut warganegara asing.
- c. **Pendaftar** sudah melakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 25/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tjara melakukan pendaftaran pemilih/penduduk, tetapi orang yang bersangkutan atau Kepala Rumah Tangga/Wakilnya tidak menghiraukan pesan pendaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas.

Djawaban kami atas kemungkinan-kemungkinan diatas adalah :

- a. Dalam hal Panitia Pendaftaran Pemilih meragukan umur orang yang bersangkutan, maka berdasarkan pasal 27 ayat (3) yang bersangkutan dapat setelah daftar Pemilih Sementara diumumkan mengusulkan perubahan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Apabila usulnya tidak diterima maka berdasarkan pasal 27 ayat (5) yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pendaftaran Pemilih dengan disertai bukti atau kesaksian.

Panitia Pemungutan Suara memberi keputusan terhadap pengaduan tersebut.

- b. Apabila Panitia Pendaftaran Pemilih menjumpai orang Warga Negara Indonesia turunan asing, maka Panitia Pendaftaran Pemilih akan menantikan kelahirannya.

Apabila yang bersangkutan Warga Negara Indonesia turunan Arab, Tjina bukan RRT dan lain-lain, maka diminta menunjukkan surat keterangan seperti kartu penduduk, idjazah sekolah yang diakui Pemerintah Indonesia, keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri atau lain-lain surat keterangan dimana ditjantumkan bahwa ia Warga Negara Indonesia.

Apabila yang bersangkutan adalah keturunan Tjina RRT yang harus ditunjukkan adalah formulir I/IA sampai dengan VI/VIA, formulir C atau D berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1961.

Bagi wanita asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia harus diperlihatkan bukti surat tjatatan pernikahan keterangan-memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Bagi yang menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan pewarganegaraan ia harus memperlihatkan surat bukti kewarganegaraan, yaitu Keputusan Presiden yang mengabulkan permohonan pewarganegaraannya.

Bahkan mungkin sekali warga negara turunan asing tersebut tidak dapat memberikan surat keterangan atau bukti tersebut diatas.

Adapun keberatan-keberatan dapat diajukan seperti pada a dengan membawa keterangan bukti tersebut.

- c. Dalam hal terdjadi seperti pada sub c, maka yang bersangkutan dapat melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat-ayat (3), (1), dan (5) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

Adapun bagi para tjalon yang didiskwalifisir oleh Panitia Peneliti dan

KOPKAMTIB tidak ada kemungkinan untuk dimintakan banding (KEP-PRES No. 39 tahun 1970 pasal 2).

3. Seseorang telah didaftar dalam Daftar Pemilih, tetapi pada sensus keluarga orang tersebut tidak terdaftar.

Bagaimana tjara penjelesaiannya ?

Mengenai masalah ini dapat kami kemukakan, bahwa setjara teoritis hal sematjam itu bisa sadja terdjadi, tetapi dalam praktek kemungkinan-nja adalah minim sekali.

Menurut ketentuan, pendaftaran penduduk dan pendaftaran pemilih dilakukan bersama-sama.

Sensus penduduk dilakukan dengan mengisi Daftar D jang disediakan oleh Biro Pusat Statistik, sedangkan pendaftaran pemilih dilakukan dengan memperguhakan kartu Model A1, jang disediakan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Adalah sedikit sekali kemungkinan seorang didaftar pada Daftar Pemilih, tetapi tidak didaftar pada Daftar Sensus, sebab bahan-bahan utama untuk mengisi Kartu Pemilih (Model A1) berasal dari Daftar Sensus jang lebih dahulu telah dibuat.

Penjelesaian Kartu Pemilih adalah agak lebih sulit, karena kartu ini harus dibubuhi tanda-tangan dan atau tjap tiga djari pemilih jang bersangkutan.

Ada kemungkinan pada saat didaftar, jang bersangkutan tidak ada di rumah.

Dalam hal demikian, sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 25/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970, pendaftar meninggalkan pesan kepada Kepala Rumah Tangga atau wakilnja, bahwa pendaftar akan datang sekali lagi atau supaja pemilih mendaftarkan diri ditempat dan waktu jang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.

4. Pertanyaan : Ada seorang warga negara dalam daftar penduduk ditjan-

tumkan berumur 17 tahun, tetapi Panitia Pendaftaran Pemilih menjatakan belum berumur 17 tahun.

Apakah orang tersebut dapat mengajukan pembelaan pada rapat-rapat Panitia Pendaftaran Pemilih?

Kepada siapakah persoalan tersebut harus diajukan ?

Djawaban atas pertanyaan ini adalah conform djawaban kami atas pertanyaan nomor 2 diatas.

5. Pertanyaan : Panitia Pendaftaran Pemilih Petugas-petugasnja ditetapkan 3 orang.

Kalau petugas Panitia Pendaftaran Pemilih itu ditentukan 3 orang tidak mampu untuk melaksanakan pekerdjaan.

Apabila djumlah petugas tersebut tidak mentjukupi, bolehkah ditambah tenaga sukarela daerah tersebut, supaya tidak mempengaruhi anggaran belandja Pemilihan Umum.

Djawaban kami adalah, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, Panitia Pendaftaran Pemilih berdjumlah sekurang-kurangnja 3 orang.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 1 tahun 1970 ditegaskan, bahwa Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, berdjumlah sekurang-kurangnja tiga dan sebanjak-banjaknja lima orang anggota termasuk Ketua.

Mengenai ketentuan pembatasan djumlah ini adalah dalam rangka penghematan dan efisiensi kerdja.

Apabila dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diperlukan tenaga pendaftar dalam djumlah jang lebih banjak dapat pula diangkat petugas pendaftar pemilih (tetapi bukan menjadi anggota Panitia Pendaftaran Pemilih jang tetap) menurut kebutuhan, jang memperoleh uang premi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 1/14/1970 tanggal 19 Maret 1970.

Tenaga-tenaga sukarela untuk tugas mendaftar dapat sadja diterima,

asalkan mereka orang-orang dari unsur Pemerintah dan sepanjang mereka telah dinilai memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

6. **Pertanyaan :** P.P.D. II belum sepenuhnya mempunyai/menerima perlengkapan-perengkapan yang diperlukan dari pusat, misalnya mesin tik, kertas dan lain-lain.

Untuk ini Daerah harus mengeluarkan biaya sendiri.

Bagaimana usaha Lembaga Pemilihan Umum agar dengan ini keuangan Daerah tidak terganggu.

Dalam menjawab pertanyaan ini perlu kami terangkan bahwa pernyataan Saudara penanya yang terhormat bahwa Daerah harus mengeluarkan biaya sendiri, adalah kurang tepat.

Jang benar ialah, bahwa kami selaku Menteri Dalam Negeri telah memberikan instruksi kepada para Gubernur Kepala Daerah, agar apabila dropping biaya Pemilihan Umum untuk daerah-daerah mengalami kelambatan-kelambatan, para Gubernur mempergunakan dahulu segala dana yang tersedia didaerahnya, tanpa meninggalkan kebidjaksanaan musjawarah dengan unsur-unsur DPRD dan Muspida.

Mempergunakan artinja memindjam sampai diterimanja dropping biaya guna keperluan-keperluan yang berhubungan dengan persiapan Pemilihan Umum telah diterima dari Pusat.

Sudah barang tentu Gubernur dalam mempergunakan dulu keuangan daerah ini tidak boleh melebihi plafond-begroting tiap bulan atau triwulan yang disediakan untuk keperluan Pemilihan Umum bagi daerahnya dan sepanjang pengadaan barang itu tidak ditentukan diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Misalnya mesin tik, Panitia Pemilihan Daerah tidak boleh melakukan pembelian sendiri, karena sudah diatur ketentuannya pengadaan barang itu diselenggarakan terpusat oleh Lembaga Pemilihan Umum.

7. **Pertanyaan :** Ada suatu kelurahan di Djawa oleh Panitia Pemilihan Daerah ditanjakan berapa jumlah penduduk yang tidak berhak memilih.

Kemudian oleh Lurah diberikan daftar penduduknya yang tidak berhak memilih, tetapi oleh Panitia Pemilihan Daerah daftar tersebut dikembalikan lagi dengan catatan tidak memenuhi syarat. Oleh Lurah kemudian dikirimkan daftar dengan menambah jumlah penduduk. Hal ini ber-djalan sampai beberapa kali hingga sampai pada jumlah sampai memenuhi syarat, daftar tersebut tidak dikembalikan lagi, oleh Panitia Pemilihan Daerah. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

Apakah dalam hal ini ada pendjataan tertentu ?

Lepas dari tanggapan apakah persoalan yang dikemukakan oleh Saudara penanja yang terhormat suatu misal ataukah kejadian yang sebenarnya, kami jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1970 yang ditunjukkan kepada para Gubernur Kepala Daerah.

Kami ulangi disini Menteri Dalam Negeri tidak selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan juga bukan Gubernur Kepala Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah I, berarti bahwa Gubernur dalam melaksanakan instruksi tersebut mempergunakan aparaturnya echelon bawahannya sesuai tata-djendjang yang berlaku :

Bupati/Walikota, Tjamat dan Lurah/Kepala Desa terlepas dari fungsi pedjabat-pedjabat ini selaku Ketua-ketua Panitia-panitia di daerah.

Pengembalian daftar Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih oleh echelon atasan kepada echelon bawahannya, tentunya atau kemungkinan besar karena echelon bawahan ini belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1970 tersebut dan bukan karena harus memenuhi suatu "pendjataan".

Kami ulangi, Menteri Dalam Negeri tidak pernah mengeluarkan instruksi "pendjataan" sebagaimana dimaksud oleh Saudara penanja yang terhormat.

8. Pertanyaan :

a. Minta keterangan dalam face pertama dalam pendaftaran pemilih berapa djumlah pemilih dan berapa jang tidak didaftar.
Harap diberikan keterangan per Propinsi.

b. Kesulitan-kesulitan apakah jang dialami dan bagaimana tjara mengatasinja.

Dengan memperhatikan djadwal waktu jang telah ditetapkan, kami djelaskan sebagai berikut :

a. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 24/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970, djangka waktu pendaftaran pemilih/penduduk berlangsung dari tanggal 5 Djuli sampai dengan tanggal 6 Oktober 1970. Berarti bahwa hingga detik ini data-data tentang djumlah pemilih belum dapat dilaporkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, sehingga kami belum dapat mengumumkan djumlah pemilih sebagaimana dimaksud oleh Saudara penanja jang terhormat.

Adapun mengenai djumlah jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih data-datanya sampai saat ini sebagai berikut :

(1) Atjeh	(belum diketahui)
(2) Sumatera Utara	168.914 orang
(3) Sumatera Barat	46.463 orang
(4) R i a u	16.913 orang
(5) Djambi	7.254 orang
(6) Sumatera Selatan	51.371 orang
(5) Bengkulu	9.869 orang
(8) Lampung	69.824 orang
(9) Djawa Barat	481.170 orang
(10) Djawa Tengah	365.378 orang
(11) D.I. Jogjakarta	42.623 orang
(12) D.C.I. Djaya	14.884 orang
(13) Djawa Timur	629.451 orang

(14)	Kalimantan Barat	4.961 orang
(15)	Kalimantan Selatan	12.366 orang
(16)	Kalimantan Timur	13.692 orang
(17)	Kalimantan Tengah	2.532 orang
(18)	Sulawesi Utara	28.852 orang
(19)	Sulawesi Tengah	2.540 orang
(20)	Sulawesi Tenggara	6.732 orang
(21)	Sulawesi Selatan	3.544 orang
(22)	B a l i	46.781 orang
(23)	Nusatenggara Timur	20.493 orang
(24)	Nusatenggara Barat	11.453 orang
(25)	Maluku	1.874 orang
(26)	Irian Barat	31 orang

Djumlah seluruhnja	2.059.965 orang
--------------------	-----------------

- b. Pada saat ini oleh Lembaga Pemilihan Umum sedang ditugaskan petugas-petugas ke daerah untuk antara lain melakukan checking on the spot terhadap pelaksanaan pendaftaran pemilih/penduduk. Apabila petugas-petugas ini pada pertengahan bulan Agustus 1970 ini sudah kembali dan menjusun laporan-laporannya, maka baru hasilnya dapat diketahui.

Namun demikian dari hasil peninjauan ke daerah-daerah beberapa waktu yang lalu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya tidak ada kesulitan-kesulitan yang bersifat prinsipil, kebanyakan hanya berupa kekurangan-kekurangan formulir dan kesulitan-kesulitan angkutan yang dapat diatasi dengan penggunaan fasilitas-fasilitas yang terdapat di daerah.

9. Pertanyaan : Didalam santiadji yang dilakukan di Daerah-daerah sudah sering dijelaskan tentang pembuatan bangunan untuk bilik Pemungutan Suara.

Demikian pula tentang penggunaannya dan lain sebagainya. Tetapi dalam kumpulan Peraturan-peraturan ini belum didjumpai Peraturannya,

ninta pendjelasannya.

Dalam hal ini kami terangkan, bahwa peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan teknis maupun administratif tentang pelaksanaan Pemilihan Umum belum seluruhnya dikeluarkan. Penjelasan peraturan-peraturan ini akan dikeluarkan setjara partiil dan bertahab sesuai urgensi menurut djadwal operasionil pelaksanaan.

Instruksi mengenai ketentuan-ketentuan teknis tentang bentuk, luas, dan lain sebagainya dari suatu Tempat Pemungutan Suara beserta layout, bentuk dan ukuran dari pada bangunan-bangunan seperti bilik pentjoblosan surat suara sebagaimana dimaksud oleh Saudara penanja yang terhormat, sedang dalam persiapan dan tidak lama lagi akan dikeluarkan

10. **Pertanyaan :** Ada daerah-daerah dimana Pimpinan Ormas/Parpol/Golkar tertentu belum atau tidak disjahkan oleh penguasa setempat.
Hal ini akan menjulitkan pentjalonan. Bagaimana usaha untuk mengatasinja.

Atas pertanyaan ini kami memberikan djawaban sebagai berikut:
Dalam Keputusan Presiden No. 43 tahun 1970 sudah ditetapkan partai-partai politik dan organisasi golongan karya mana yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum.

Selanjutnja dalam Keputusan Presiden No. 40 tahun 1970 pasal 2 menentukan, bahwa tjalon untuk pemilihan anggota DPRD-I diadju-kan oleh Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat I, sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD II diadju-kan oleh Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat II.

Seterusnya pasal 3 menjatakan, bahwa untuk pemilihan anggota DPR, nama tjalon perlu mendapat persetudjuan lebih dahulu dari Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat II dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dari bunji pasal-pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa untuk dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum anggota-anggota Badan

Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat sudah sewadajarnya Organisasi tersebut mempunyai tjabang-tjabangnja di daerah-daerah, sepanjang organisasi-organisasi itu setjara riil mempunyai massa didaerah-daerah jang bersangkutan.

Dalam hal jang sedemikian, maka Pemerintah mengandjurkan agar pembentukan tjabang-tjabang organisasi jang dimaksud diusahakan dalam waktu jang sesingkat mungkin.

Kalau njata ada dan sudah disjahkan pengurusnja oleh Pengurus parpol jang lebih atas dan belum disjahkan/diakui oleh penguasa setempat, minta penegasan didaerah-daerah mana sadja.

11. **Pertanjaan :**

Dalam kenjataanja :

- a. Belum semua anggota Panitia Pemilihan Daerah dilantik.
- b. Sedang jang dilantik belum pernah mengadakan musjawarah atau pembagian tugas sesuai dengan surat Lembaga Pemilihan Umum tanggal 8 — 4 — 1970 No. 14/11/1970. Apakah tindakan Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Walaupun kami belum dapat menangkap setjara djelas apa jang diuraikan/dimaksud dalam pertanjaan tersebut oleh Saudara penanja jang terhormat, namun kami akan berusaha menanggapija sebagai berikut:

- a. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah I termasuk Ketua dan Wakil Ketuanja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah.

Untuk melantik anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah I tersebut, Menteri Dalam Negeri mendelegir kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Apabila seorang anggota Panitia Pemilihan Daerah I setelah menerima keputusan pengangkatannya dari Menteri Dalam Negeri, maka waktu dan tempat pengresmian (pelantikan) pengangkatannya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Djika ada seorang anggota Panitia Pemilihan Daerah I belum di-

lantik, tentuja Gubernur Kepala Daerah masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain jang urgen.

Kalau ada sementara orang dalam "back-mind"-nja menarik kesimpulan, bahwa Gubernur ingin "memboikot" pengangkat se-orang anggota, ini sama sekali tidak benar, karena sebagaimana kami djelaskan diatas, pengangkatan anggota jang bersangkutan adalah atas usul Gubernur Kepala Daerah sendiri.

- b. Mengenai surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Djambi No. 14/11/1970 tanggal 8 April 1970 perihal tugas dan tanggung djawab Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I jang tembusannja disampaikan kepada para Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, pelaksanaannja diserahkan kepada kebidjaksanaan Gubernur/Kepala Daerah sesuai ruang waktu dan urgensi.

Surat tersebut diatas hanja berisi penegasan pedoman kerdja bagi Panitia-panitia Pemilihan Daerah I.

12. **Pertanyaan :** Surat Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 32/11/1970 tanggal 27 Mei 1970. Apakah chotbah agama untuk mensukseskan Pemilihan Umum terlarang menurut surat tersebut.

Mengenai surat Ketua Lembaga Pemilihan Umum tersebut kami djelaskan bahwa sebelum waktu jang ditentukan untuk kampanye, organisasi Golongan Politik/Karya diperbolehkan memberikan penerangan/pendjelasan tentang Pemilihan Umum khusus kepada anggota-anggotanja, se-pandjang :

- a. tidak bersifat kampanye untuk suatu golongan tertentu.
- b. tidak bersifat umum tetapi bersifat tertutup.
- c. terbatas pada hal-hal jang bersifat technis.
- d. tidak mempergunakan media bioskop, plakat, radio, karena hal ini

sudah bersifat umum.

- e. memberitahukan sebelumnya kepada penguasa setempat c.q. Kepolisian Republik Indonesia.

Apabila perubahan agama yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dilarang.

13. Pertanyaan : Instruksi Lembaga Pemilihan Umum No. 1/11/1970 atas pertimbangan apakah personalia Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah.

Sedang Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemungutan Suara unsur-unsur sosial diikuti sertakan.

Mengapakah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diadakan perbedaan. Seperti yang telah dimuat dalam penjelasan Pemerintah tanggal 8 Agustus 1970 maka personalia Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya terdiri dari unsur Pemerintah, karena pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah (pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970), maka sebagai akibat logisnya pertanggung jawaban terakhir terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum ada pada Pemerintah, walaupun partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan kegiatan operasional yang sangat vital sebagai dasar untuk menentukan besarnya dukungan kepada golongan-golongan yang ikut dalam Pemilihan Umum dalam pemungutan suara nanti.

Disamping faktor pertanggung-jawab tersebut, dipertimbangkan pula faktor efisiensi dalam rangka pengisian personil Panitia Pendaftaran Pemilih. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan, karena daftar pemilih setiap saat dapat dibatasi pada papan pengumuman di setiap Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pada saat penghitungan suara pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dibolehkan ikut serta hadir pada pembukaan surat suara dan penghitungan suara.

4. **Pertanyaan :** Terdjadi di Pinrang bahwa didalam pendaftaran seorang petugas Panitia Pendaftaran Pemilih menajikan kepada tjalon pemi-
lih apa partainya dan djawabannya ditjantumkan dalam kartu A1 bagian
Keterangan.
Apakah tindakan Lembaga Pemilihan Umum terhadap kedjadian ini?
Kami sangat berterima kasih atas informasi tersebut dan mengenai ma-
salah ini dapat kami djelaskan sebagai berikut :
Hal-hal jang perlu ditjatat adalah nama lengkap, umur, sudah/belum/
pernah kawin, djenis kelamin, alamat rumah, pekerdjaan.
Apabila nama partai ditanjakan dan dimasukkan dalam kolom kete-
rangan adalah merupakan hal jang berkelebihan dan tidak dapat dibe-
narkan.
Kolom keterangan hanja disediakan untuk mengisi misalnja dengan sua-
tu tanda tanja, artinja kewarga-negaraan jang bersangkutan masih dira-
gukan. Terhadap hal tersebut akan segera ditertibkan.
5. **Pertanyaan :** Kalau diantara anggota Panitia Pendaftaran Pemilih ternjata
ada jang tidak tjakap, bagaimanakah tjara mengatasinja?
Dapatkah diganti atau diisi oleh unsur sosial politik?
Terhadap pertanyaan tersebut, kami djelaskan sebagai berikut :
masa kerdja dari Panitia Pendaftaran Pemilih adalah sangat terbatas
jaitu sedjak pengangkatan sampai dengan satu bulan setelah Daftar Pe-
milih Tambahan disahkan.
Apabila selama djangka waktu itu menurut Ketua Panitia Pemungutan
Suara ternjata ada anggota Panitia Pendaftaran Pemilih jang tidak tj-
kap, dapat sadja diadakan penggantian, tetapi penggantinja tetap diam-
bilkan dari unsur Pemerintah.
6. **Pertanyaan :** Keputusan Presiden No. 39/1970 pasal 2 Bab II.
Apa maksudnja "dalam satu tingkat". Tidakkah mungkin ada apel
naik banding.
Mengenai maksud "dalam satu tingkat" jang terdapat dalam KEPPRES

No. 39/1970 dijelaskan sebagai berikut : bunji pasal Keputusan Presiden No. 39 tahun 1970 sebagaimana yang dimaksud oleh Saudara penanya yang terhormat adalah : "Penelitian tjalon-tjalon dilakukan oleh Panitia Peneliti dan KOPKAMTIB hanya dalam satu tingkat".

Jang dimaksud "dalam satu tingkat" disini ialah, bahwa penelitian tjalon anggota MPR/DPR hanya dilakukan oleh Panitia Pusat, jang seterusnya penelitian dari sudut mental-ideologis dan politis dilakukan hanya oleh KOPKAMTIB, berarti bahwa kedua instansi ini merupakan peneliti jang pertama dan terakhir dalam penelitian tjalon-tjalon anggota MPR/DPR. Demikian pula dalam pelaksanaan penelitian tjalon-tjalon anggota DPR I dan DPRD II dilakukan pada instansi pertama dan terakhir oleh Panitia Peneliti Daerah I/II dan LAKSUS Daerah.

Dari pendjelasan-pendjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa kepada organisasi yang mengemukakan tjalon tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan apel kepada instansi echelon lebih tinggi, namun sesuai bunji pasal 12 Keputusan Presiden No. 39 tahun 1970 tersebut bagi organisasi masih terbuka kesempatan untuk mengajukan nama tjalon yang lain, apabila tjalon yang diajukan pertama dikeluarkan dari daftar tjalon karena ternyata tidak memenuhi syarat-syarat.

17. **Pertanyaan : Pembentukan Panitia-panitia di Daerah.**

Di Djawa Timur berlaku ketentuan bahwa setiap tjalon Anggota Panitia (P.P.P., P.P.D. dan lain-lain) diharuskan mengisi formulir riwayat hidup yang isinya melebihi dari screening (ditanyakan tentang keluarga, mertua dan lain-lain). Apakah itu dapat dibenarkan?

Mengulangi pendjelasan kami pada tanggal 8 Agustus 1970, maka clearance-test itu diberikan kepada semua pegawai termasuk pula pegawai Pemerintah Daerah.

Karena aparaturnya Pemilihan Umum di daerah adalah pelaksana yang bertanggung-jawab dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah yang berhubungan dengan Pemilihan Umum (pasal 8 ayat 4 Undang-undang No. 15 tahun 1969), maka wajarlah bagi mereka untuk diwadjabkan

pula mengisi formulir clearance-test dari Team Screening Pusat (Daerah), karena dalam kedudukannya sebagai anggota Panitia Pemilihan Daerah menjalankan tugas Pemerintah.

Namun demikian mereka jang berasal dari kekuatan sosial politik tidak akan dikurangi integrasinya.

18. **Pertanyaan : Mempersoalkan Pantjasila.**

Apakah djika seseorang dalam suatu pertemuan mendjelaskan terperintji sila-sila dari Pantja Sila dianggap melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

Apakah tidak sebaiknya kata "mempersoalkan" diganti dengan mendiskusikan atau hampir sama dengan mendiskusikan.

Kami djelaskan, bahwa jang dimaksud dengan mempersoalkan Pantjasila dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 adalah mempersoalkan dalam arti negatif, djelasnja tidak mempertentangkan Pantjasila setjara subjektif untuk kepentingan sesuatu golongan.

19. **Pertanyaan :**

a. Larangan pengerahan massa apakah djika sesuatu Partai/Golkar mengumpulkan massa untuk mendjelaskan tehnik Pemilihan Umum dapat dianggap melanggar Ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
Sebaiknja pasal ini diperintji sehingga tidak menimbulkan keseimbangan dan djangan ada alat-alat Negara salah bertindak.

b. Dibeberapa tempat di Djawa Tengah dan Djawa Timur bitjara tentang Pemilihan Umum dilarang atau dianggap sebagai kampanye.
Apakah tindakan ini dapat dibenarkan; djika tidak sebaiknya Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum memberikan pendjelasan ke Daerah-daerah apa sebenarnya jang dilarang.

Djawaban kami conform djawaban atas pertanjaan nomor 12 dengan tambahan keterangan, bahwa pada saat ini oleh Lembaga Pemilihan Umum sedang disiapkan suatu Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang ketentuan-ketentuan kampanye dalam Pemilihan Umum.

20. Pertanjaan : Pentjalonan Anggota DPR.

- a. berhakkah Kepala Daerah Tingkat II mentjoret nama tjalon jang diadjukan oleh Partai/Sekber Golkar atau apakah tjukup sekedar mengetahuinja sadja?
- b. Djumlah tjalon jang diadjukan adalah maksimal 2 kali banjaknja anggota dari suatu Daerah Pemilihan.
Apakah djumlah tjalon ditiap Daerah Tingkat II dapat ditjantumkan menurut sekehendak Partai atau Sekber Golkar jang mengadjukan daftar tjalon asal djumlah keseluruhannja (dalam Daerah Pemilihan) tidak melebihi 2 kali djumlah dimaksud tadi.
Atau apakah ada ketentuan djumlah minimum dan maksimum.
- c. Bolehkah seorang tjalon untuk Daerah Tingkat II A umpamanja ditjalankan juga untuk Daerah Tingkat II B, C dan sebagainja dalam Daerah Pemilihan jang bersangkutan.
- d. Bolehkah sesuatu partai tidak mengemukakan tjalon dalam suatu Daerah Tingkat II, karena toh orang mentjoblos/memilih tanda gambarnja sadja? Bilamana sudah ada ketentuan hasil pemungutan suara barulah partai jang bersangkutan menjampaiakan nama-nama anggotanja jang akan dianggap sebagai terpilih.

- a. Untuk mendjawab pertanjaan tersebut, kami djelaskan hal-hal sebagai berikut :
pentjalonan pemilihan anggota DPR diadjukan oleh Pengurus Besar Organisasi dengan persetudjuan Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat II dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.
Adapun sifat mengetahui oleh Kepala Daerah ini adalah untuk legalisasi eksistensi riil organisasi jang bersangkutan beserta Pengu-

rusnja di Daerah Tingkat II.

- b. Djumlah tjalon untuk pemilihan anggota DPR yang diajukan dalam Daerah Pemilihan adalah maksimal dua kali banjaknja anggota yang dipilih.

Djumlah tjalon untuk tiap Daerah Tingkat II ditetapkan oleh organisasi yang mengajukan tjalon.

Berhubung Daerah Tingkat II bukan merupakan Daerah Pemilihan, maka tidak ada larangan untuk mentjalonkan seseorang untuk lebih dari satu Daerah Tingkat II.

Tetapi demi ketegasan dan tidak memupuk watak spekulatif Pemerintah mengharapakan seseorang tjalon untuk DPR tidak ditjalonkan untuk sebanjak semua Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Pemilihan.

- c. Mengajukan atau tidak mengajukan tjalon untuk suatu Daerah Tingkat II untuk pemilihan anggota DPR adalah wewenang/hak sepenuhnya dari organisasi.

Tetapi dalam hal ini harap diperhatikan bahwa apabila untuk suatu Daerah Tingkat II yang kebetulan tidak diajukan tjalon, organisasi yang bersangkutan memperoleh wakil/suara maka dapat diajukan tjalon susulan (pasal 94 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970).

21. Pertanyaan : Ketentuan terpilihnja seseorang sebagai Anggota DPR.

- a. Apakah tidak perlu ada ketentuan minimum djumlah suara untuk mendapatkan 1 kursi bagi sesuatu partai (pasal 93 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970).
- b. Apa djumlah suara yang diperoleh sama banjaknja di antara 2 atau lebih parpol atau antara sesuatu parpol dengan Sekber Golkar apakah akan diundi ?
- c. Harap jelaskan tjara-tjara pembagian kursi bagi yang terpilih menurut Kabupaten atau Kotamadya - gewijs, sesudah diketahui hasil pemungutan suara seluruhnja disuatu Daerah Pemilihan menurut kiesquotient yang ditentukan.

- d. Bila seseorang jang terpilih mengundurkan diri, apakah penggantinya mutlak diambil dari Daerah Tingkat II dimana dia tadinja ditjalankan (oleh dan dari Daerah Tingkat II jang bersangkutan) atau apakah boleh diambilkan dari Daerah Tingkat II lain dengan persetujuan Daerah Tingkat II tersebut ?

Djawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Untuk menentukan apakah sesuatu organisasi memperoleh kursi dalam satu Daerah Pemilihan adalah ditentukan oleh Bilangan Pembagi Pemilih (B.P.P.), ialah bilangan jang diperoleh dari djumlah suara masuk jang sah dibagi djumlah anggota jang dipilih.

Hal ini berarti, bahwa besarnya Bilangan Pembagi Pemilih adalah tidak sama bagi masing-masing Daerah Pemilihan.

- b. Djumlah suara jang diperoleh beberapa organisasi dalam Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Pemilihan ada kemungkinan setjara teoritis dapat sama, walaupun dalam prakteknja kemungkinan itu akan ketjil sekali. Apabila hal demikian terdjadi dapat diadakan undian.

- c. Tentang tjara-tjara pembagian kursi harap lihat lampiran Pendjelasan kami, sebagaimana sudah didjelaskan pula pada tanggal 8 Agustus 1970.

- d. Sesuai dengan sistim daftar, apabila seseorang jang terpilih mengundurkan diri maka penggantinya adalah tjalon berikutnya dari daftar tjalon untuk Daerah Tingkat II jang bersangkutan. (pasal 95 ayat 2).

Apabila hal ini tidak dapat dilakukan karena semua tjalon sudah terpilih, berhenti atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajdjukan oleh organisasi jang mengajukan daftar tjalon bersangkutan.

Penggantinya ini dapat sadja diambilkan dari Daerah Tingkat II lain, asalkan masih dalam lingkungan satu Daerah Pemilihan dan sepanjang ketentuan pasal 3 Keputusan Presiden No. 40 tahun

1970 dipenuhi.

22. **Pertanyaan :**

- a. Ada seorang W.N.I. lahir pada bulan Oktober 1953. Pada waktu diadakan pendaftaran pemilih orang tersebut tidak didaftar karena pada waktu itu belum genap 17 tahun (Oktober 1953 – Djuli 1970, djadi kurang 3 bulan).
Apakah ada kebidjaksanaan bagi orang tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnja, agar dia dapat didaftar sebagai pemilih.
- b. Seseorang Warga Negara jang belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin hanja sadja belum kumpul dalam satu rumah tangga. Pada waktu diadakan pendaftaran pemilih, orang tersebut didaftar.
Kepada siapakah orang tersebut dapat mengajukan persoalan itu ?

Djawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jang dapat didaftar pada daftar pemilih adalah warganegara Indonesia jang sudah genap berusia 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu.
Pendaftaran pemilih berachir setelah daftar pemilih tambahan disahkan seperti dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 24/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970 tentang waktu pendaftaran pemilih/penduduk dalam dictum kedua ditentukan tentang djangka waktu pendaftaran pemilih/penduduk jang berlangsung dari tanggal 5 Djuli sampai dengan 6 Oktober 1970, jaitu sampai dengan selesai disahkannya Daftar Pemilih Tambahan. Dengan demikian, maka warganegara Indonesia jang lahir sebelum 6 Oktober 1953 dapat didaftar sebagai pemilih.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 15 tahun 1969, maka seorang jang belum genap berumur 17 tahun tetapi

sudah kawin dapat didaftar sebagai pemilih. Apabila jang bersangkutan pada waktu pendaftaran pemilih tidak didaftar, berdasar pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ia dapat mengajukan usul kepada Panitia Pendaftaran Pemilih.

Apabila usul tidak diterima berdasar pasal 27 ayat (5) jang bersangkutan dapat minta perobahan kepada Panitia Pemungutan Suara lewat Panitia Pendaftaran Pemilih dengan disertai salinan surat kawin atau pembuktian/penjaksian lain.

23. **Pertanyaan :**

Berhubung dengan adanya pendjelasan tentang "konfrontasi" horizontal dan vertikal apakah urutan nama tjalon jang ditentukan oleh Parpol, Golkar masih mempunyai arti menentukan dapat terpilihnja tjalon tersebut.

Djawaban atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

Apa jang kami jelaskan pada tanggal 8 Agustus 1970 adalah sistim atau tjara pembagian kursi DPR untuk satu Daerah Pemilihan dan penjabaranja/pembagiannja per Daerah Tingkat II.

Apa jang dimaksud oleh Saudara penanja jang terhormat "konfrontasi" horizontal dan vertikal itu adalah dalam menentukan alokasi kursi untuk organisasi mana dan bagi Daerah Tingkat II mana perlu diperhatikan/ diperbandingkan data-data suara jang masuk, baik setjara inter-organisasi maupun antar-organisasi.

Hal ini tidak setjara langsung menjangkut soal daftar tjalon-tjalon, sehingga tata-tjara penjusunan daftar tjalon masih tetap berlaku.

24. **Pertanyaan :**

- a. Apakah didalam kampanye Pemilihan Umum nanti idjin akan diberikan kepada masing-masing Parpol/Ormas atau kepada kelompok.
- b. Apakah tidak lebih baik kalau idjin tersebut diberikan kepada masing Parpol/Ormas sadja, dan idjin tersebut diberikan bersifat

umum (sekaligus diberikan) oleh KOPKAMTIB kepada Parpol.

- c. Pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.

Dalam bentuk apa dan dengan tjara bagaimana partisipasi masyarakat sebagai kekuatan sosial jang diinginkan Pemerintah.

- d. Apakah dokumen daftar anggota PKI jang diajukan oleh PKI sendiri dari tahun 1952 sampai meletusnja G-30-S/P.K.I. masih ada?

- e. Apakah nama-nama dalam daftar tersebut dipakai sebagai pegangan oleh Pemerintah dalam mendaftar tjalon-tjalon pemilih.

- f. Sesudah berachirnja masa kampanye mendjelang pemungutan suara akan terdapat waktu lk. 5 hari cooling off. Waktu 5 hari itu digunakan untuk apa.

Apakah tidak sebaiknja diisi sadja dengan latihan bagi petugas-petugas.

Atas pertanjaan tersebut diatas, kami tanggapi sebagai berikut :

- a. Idjin/Pemberitahuan kepada dan dari Penjelenggara Rapat.

Idjin penjelenggaraan kampanye pemilihan umum jang dikeluarkan oleh POLRI setempat (vide pula Undang-undang No. 5 Pnps - Tahun 1963 tentang kegiatan politik) diberikan kepada Panitia/ Penjelenggara dari organisasi jang akan mengadakan kampanye setempat, jaitu sebagai tanda bahwa Panitia/ Penjelenggara tersebut telah memberitahukan kepada pihak penguasa.

- b. Idjin bersifat umum.

Pada prinsipnja idjin tidak dapat diberikan setjara bersifat umum (sekaligus diberikan) kepada Parpol/ Penjelenggara, mengingat bunjinja Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 5 tersebut jang pada pokoknja menjatakan bahwa Penguasa dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat jang diadakan pada waktu jang bersamaan dan jang letaknja berbedaan.

Prosedure wewenang ada ditangan PANGKOPKAMTIB dan POLRI.

- c. **Partisipasi masyarakat.**
 Untuk mensukseskan pemilihan umum, Pemerintah mengharapkan penjelasan masyarakat dalam pelbagai bentuk, diantaranya:
 - Setjara perorangan maupun setjara organisasi memberikan penjelasan tentang dasar pikiran, tudjuan, azas, sistim, tentang aparaturnya Pemilihan Umum, membantu kelanjutan pendaftaran pemilih/penduduk, pentjalonan, tjara menu-suk (memberikan suara), penghitungan suara dan lain-lain mengenai pemilihan umum kepada golongan-golongan ma-sjarakat yang memerlukanja.
 - Ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilihan Umum.
 - Dalam ikut melakukan kampanye agar mentaati ketentuan-ketentuan dalam Bab VI (soal kampanye pemilihan) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
 - Setjara sadar mentaati/melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum.
 - Ikut aktif menjebar-luaskan dan mempopulerkan Lagu Pe-milihan Umum.
- d. **Dokumen Daftar anggota PKI.**
 Tentang masih ada atau tidaknja Dokumen Daftar anggota PKI se-djak tahun 1952 sampai meletusnja G-30-S/PKI, adalah ditangan Pemerintah c.q. KOPKAMTIB.
- e. **Daftar nama-nama anggota PKI/Ormasnja yang ada pada Peme-rintah sudah barang tentu dipakai sebagai pegangan oleh Pemerin-tah cq KOPKAMTIB dalam mendaftar pemilih, dengan ditambah daftar orang-orang yang setjara langsung/tidak langsung tersangkut dalam Gerakan kontra Revolusi G-30-S/PKI serta yang mendjadi anggota organisasi terlarang lainnja.**
- f. **Waktu 1 minggu sebelum pemungutan suara tanggal 5 Djuli 1971 dipergunakan untuk memberikan penjelasan tehnik yang masih dianggap perlu dan dapat pula dipergunakan untuk latihan-latihan bagi para petugas mengingat keadaan dan kondisi setempat.**

Pokoknja waktu 7 hari jang terluang itu dimanfaatkan untuk "general checking" terhadap segala sesuatu dalam menghadapi pemungutan suara 5 Djuli 1971.

Demikianlah djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanajan dan pendapat-pendapat dari Saudara-saudara jang terhormat dan semoga setelah ada pengertian jang mendalam mengenai hal-hal jang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum ini, kerdja sama antara Pemerintah cq Lembaga Pemilihan Umum dan DPR-GR dapat lebih ditingkatkan lagi demi pelaksanaan tugas kita bersama dalam rangka memenuhi harapan rakjat banjak, chusnja dalam mensukseskan Pemilihan Umum.

Terima kasih.

Djakarta, 13 Agustus 1970

MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

t.t.d.

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN JANG DIADJUKAN OLEH
ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR
PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 1970

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANJAAN JANG DIADJUKAN OLEH
ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR PADA TANGGAL
13 AGUSTUS 1970.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-GR jang terhormat.

Pertama-tama kami mengutjapkan terima kasih dan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada jang terhormat para anggota Komisi III DPR-GR jang telah meluangkan waktu mengadakan kembali rapat kerdja untuk mendengarkan djawaban kami atas pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh jang terhormat para penanja pada tanggal 13 Ahustus jang lalu.

Kami mengharapakan, kiranja rapat kerdja sematjam ini akan sangat bermanfaat untuk lebih meningkatkan lagi kerdja sama jang telah terdjalin erat antara DPR-GR dengan Pemerintah, sehingga penjelenggaraan pemilihan umum jang ditugaskan kepada Pemerintah dapat berhasil dengan lebih baik lagi.

Setelah pertanjaan-pertanjaan kami peladjar setjara mendalam, dengan ini kami sadjikan djawaban-djawaban atas pertanjaan-pertanjaan terse-

but sebagai berikut :

A. PERTANJAAN-PERTANJAAN.

1. **Pertanyaan :**

Menurut lampiran Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan Kepala Biro Pusat Statistik No : 124 Tahun 1970 P. 15/70 antara lain disebut tentang pembentukan Blok Sensus yang hasilnya akan dipergunakan sebagai penetapan wilayah Tempat Pemungutan Suara.

Apabila didalam satu wilayah Panitia Pemungutan Suara (Kelurahan) nantinya terdiri dari 5 atau 6 wilayah Tempat Pemungutan Suara, apakah cukup petugas-petugas Pemerintah untuk melayani Tempat Pemungutan Suara — Tempat Pemungutan Suara itu ?

Dijawaban kami adalah :

Sebelum kami menjawab pertanyaan ini perlu kiranya terlebih dahulu dijelaskan, bahwa wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara meliputi satu ketjamatan, bukannya satu kelurahan.

Untuk penyelenggaraan pemungutan suara Ketua Panitia Pemungutan Suara membagi wilayah kerjanya dalam daerah-daerah pemungutan suara (Tempat Pemungutan Suara) disesuaikan dengan jumlah pemilih yang ada/terdaftar (tiap Tempat Pemungutan Suara menampung 200 @ 300 pemilih).

Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat-tempat Pemungutan Suara dibentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang beranggotakan 3 sampai 7 orang, semuanya diambilkan dari unsur-unsur Pemerintah.

Dalam hal susunan komposisi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Ketua Lembaga Pemilihan Umum telah menentukan suatu kebijaksanaan, bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah (Perangkat Desa, Pagar Pradja, Hansip, Guru-guru Sekolah Negeri, Pega-

wai Negeri).

Apabila dalam wilayah Ketjamatan atau Kelurahan tidak tjukup adanja unsur Pemerintah untuk diangkat mendjadi anggota K.P. P.S. sebanjak djumlah jang diperlukan untuk melajani T.P.S.-2, maka dapat didatangkan atau dikerahkan dari wilayah Ketjamatan/ Kelurahan lain jang masih dalam lingkungan satu Daerah Tingkat II.

2. Pertanjaan :

Tadi saja mendengar Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum membatjakan ketentuan-ketentuan khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Arab dalam menghadapi Pemilihan Umum jang akan datang.

Apakah djuga untuk Warga Negara Indonesia keturunan lainnja seperti Warga Negara Indonesia keturunan Belanda, keturunan Tjina, keturunan India dan lain-lain, djuga diadakan pengaturan setjara khusus ?

Djawaban kami :

Kami djelaskan bahwa mengenai pendaftaran pemilih sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 25/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970, dan chususnja mengenai pendaftaran Warga Negara keturunan asing, diatur dalam Bab V.

Keputusan jang kami maksud tersebut terdapat dalam buku himpunan peraturan-peraturan pemilihan umum jang sudah disampaikan kepada Saudara-saudara jang terhormat.

3. Pertanjaan :

Pada umumnja Daftar Tjalon Anggota DPR dibuat berdasarkan urutan tjalon jang terkuat dari suatu organisasi, sedang me-reka harus ditentukan mewakili Kabupaten tersebut.

Tidak dapat diduga bahwa sesuatu organisasi akan menang disuatu

Kabupaten.

Bagaimana halnya kalau tjalon No. 1 tidak mendapat kemenangan dalam Kabupaten yang diwakilinya?

Apakah ini tidak berarti bahwa urutan tidak ada pengaruh apa-apa ?

Dan mengapa seorang tjalon harus menjetudjui tempatnya dalam urutan daftar tjalon ?

Djawaban kami atas pertanyaan/persoalan itu adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, maka urutan nomor penempatan nama tjalon dalam Daftar Tjalon adalah penting, karena urutan nomor itu menentukan Tjalon itu ditetapkan menjadi anggota atau tidak, apabila organisasi yang mentjalonkannya memperoleh kursi.
- b. Apabila penempatan Tjalon yang "terkuat" itu untuk suatu Daerah Tingkat II tidak "tepat", maka organisasi yang bersangkutan dapat memperlakukan pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 untuk memberikan "arti" pada nomor urutan penempatan tjalonnya yang dianggap "terkuat" itu supaya tetap "kuat/menang".

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 hanya mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 1969 setjara teknis dan administratifnya.

Pemerintah tidak mengurangi atau meniadakan "arti" dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang (lihat pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 1969) dengan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah (pasal 47 ayat (2), pasal 48 sub b, pasal 95,

pasal 110 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 hubungan dengan pasal 19 ayat (1) sub c/iii dan ayat (2), pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 1969).

4. **Pertanyaan :**

Dengan adanya perbedaan pelantikan antara Ketua-schap dan Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II maka apakah juga mengakibatkan ada perbedaan tugas?

Djawaban kami :

- a. Perbedaan pelantikan Ketua dan pelantikan anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (demikian pula Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Indonesia) pertama-tama adalah dengan mengingat jadwal waktu dan mengingat segi praktisnja.

Ketua-ketua Panitia-pemilihan Pemilihan sudah dapat diketahui dan diangkat/dilantik lebih dahulu berdasarkan pasal-pasal 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970. Ketua-ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang lebih dulu diangkat itu dilantik setjara serentak untuk tiap-tiap Propinsi.

Ketua-ketua tersebut kemudian ditundjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melantik Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ditempat kedudukan masing-masing.

- b. Perbedaan tugas antara Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (demikian juga Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Indonesia) tidak ditentukan karena perbedaan pelantikannja, akan tetapi ditentukan oleh peraturan perundangnja, antara lain bahwa Ketua mempunyai tanggung-djawab terakhir terhadap segala kegiatan Panitia, meskipun Ketua tidak melakukan-nja sendiri.

5. **Pertanyaan :**

Apakah ada permasalahan yang perlu dimusyawarahkan oleh seluruh Panitia atau ada yang tidak usah dimusyawarahkan?

Djawaban kami :

Hal-hal yang merupakan masalah, terutama yang sifatnya pokok, perlu dimusyawarahkan, tetapi hal-hal yang tidak merupakan masalah tidak perlu dimusyawarahkan dan langsung dilaksanakan oleh Ketua Panitia.

6. **Pertanyaan :**

Apakah ada pembagian tugas antara Ketua schap dan Anggota?

Djawaban kami :

Pembagian tugas, wewenang dan tanggung-djawab antara Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan ditentukan dalam :

- a. Lampiran I Bab VI untuk Lembaga Pemilihan Umum dan Lampiran II Bab VI untuk Panitia Pemilihan Indonesia dari Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970;
- b. Bab VI Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.5 Tahun 1970 mengenai pembagian tugas bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

7. **Pertanyaan :**

Dalam pendjelasan Sekretaris Lembaga Pemilihan Umum tadi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kampanye ialah mengadakan rapat-rapat dengan maksud untuk menarik perhatian masyarakat untuk memberikan suaranya kelak, maka pertanyaannya ialah :

Bila seorang pengurus/petugas organisasi (partai politik) mengunjungi rumah-rumah anggota-anggotanya atau warga organisasinya dan menjerahkan lambang (tanda gambar) organisasi partainya

untuk dipasang dirumah-rumah mereka, apakah kegiatan jang demikian dianggap kampanye?

Untuk mendjawab pertanyaan ini perlu kami beritahukan bahwa Pemerintah pada saat ini sedang menjusun Rantjangan Keputusan Presiden tentang kampanye.

Oleh karena itu diharapkan kesabaran Saudara penanja jang terhormat untuk menunggu sampai keluarnya Keputusan Presiden tersebut dalam waktu dekat ini.

8. **Pertanyaan :**

Dimasyarakat sekarang ini tersiar keterangan-keterangan bahwa untuk penghematan, maka pemungutan suara akan dilakukan dikantor-kantor, umpama dikantor, Lurah, Dan Ramil dan lain-lain sesamanja.

Pertanjaannya ialah :

- a. Sampai dimana kebenaran keterangan itu ?
- b. Bila benar, apakah Pemerintah i.c. Lembaga Pemilihan Umum tidak atau memperkirakan bahwa dengan ditempatkan Tempat Pemungutan Suara - Tempat Pemungutan Suara itu dikantor-kantor tersebut akan memberikan tekanan perasaan (psychologis effect) jang dapat mengurangi rasa kebebasan para pemilih ?

Djawaban :

Untuk pembuatan bangunan-bangunan Tempat Pemungutan Suara tidak disediakan biajanja.

Jang disediakan hanyalah biaya untuk pembuatan bilik-bilik pemberian suara dan perlengkapan pemungutan suara termasuk kotak suara, alat pentjoblosan dan landasannya, serta sewa meja kursi untuk Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara.

Oleh karena itu Tempat-tempat Pemungutan Suara sedapat mungkin ditempatkan dilapangan terbuka atau dalam bangunan-ba-

ngunan jang sudah ada jang tidak mendjadi milik perorangan atau golongan, sehingga dalam hal ini sasaran pokok adalah bangunan-bangunan Pemerintah/Kantor-kantor Pemerintah. Mengenai djaminan rasa kebebasan para pemilih dalam pemberian suara, sebenarnja tidak terletak/tergantung pada ditempatkannya Tempat-tempat Pemungutan Suara itu dikantor-kantor Pemerintah, atau digedung-gedung sekolah, gedung-gedung umum dan lain sebagainya.

Rasa kebebasan para pemilih itu disamping didjamin dengan diada kannja bilik-bilik tempat memberikan suara jang berding dan beratap serta didepan pintu bilik jang terbuka dipasang tirai/gordijn, didjamin pula dalam bentuknja surat suara dan dalam tatajara memberikan suara jang diatur setjara rahasia.

9. **Pertanyaan :**

Dengan memperhatikan konsensus antara DPR-GR dengan Pemerintah pada waktu membitjarkan RUU jang sekarang telah mendjadi Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan Undang-undang No. 16 tahun 1969, maka ternyata ada beberapa persoalan pokok jang penuangannya dalam Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan pemitjaraan pada waktu jang lampau, maka apakah Peraturan Pemerintah jang kami maksud itu tidak dapat dirubah/disempurnakan ?

Djawaban :

Pemerintah tidak melihat bahwa Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 ada persoalan pokok jang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Undang-undangnja. Bahkan ada djuga hal-hal dalam Undang-undang No. 15 tahun 1969 jang belum diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, oleh Pemerintah kemudian diatur dalam Keputusan Presiden, antara lain Keputusan Presiden No. 40 tahun

1970 dan No. 45 tahun 1970 yang kami anggap tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tersebut.

10. **Pertanyaan :**

Bahwa tidak ada sjarat dimiliki bagi tjalon Anggota DPR, dan bahwa seorang dapat ditjalonkan untuk Anggota DPR lebih dari satu Daerah Tingkat II, dus logikanja bahkan dapat djuga untuk seluruh Daerah Tingkat II dalam satu daerah pemilihan.

Kami ingin mengajukan suatu asumsi begini :

Ada suatu organisasi yang berhak ikut dalam Pemilihan Umum, membuat satu daftar, kemudian satu daftar tjalon ini diadjudkan untuk semua Daerah Tingkat II dalam daerah pemilihan itu.

Dapatkah hal ini ?

Apabila dapat, bagaimana kira-kira penempatan tjalon-tjalon itu untuk Daerah-daerah Tingkat II, apabila organisasi tersebut sudah mendapat sedjumlah kursi dalam Pemilihan Umum ?

Djawaban :

Pernyataan "dimiliki" (kemungkinan tiktout) tentunya yang dimaksud oleh Saudara penanya yang terhormat adalah "domisili", dan "tidak ada sjarat domisili" itu maksudnja domisili dalam Daerah Tingkat II atau dalam Daerah Pemilihan (Propinsi).

Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 berbunyi :

"Organisasi dilarang mentjalonkan seseorang untuk lebih dari satu daerah pemilihan yang sedjenis"

Untuk pemilihan DPR Daerah Tingkat II adalah bukan Daerah Pemilihan, sehingga pasal 47 ayat (3) tersebut pada dasarnya tidak melarang ditjalonkannya seseorang untuk lebih dari satu Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Pemilihan untuk DPR.

Namun diharapkan dari semua Organisasi, agar supaya tidak menggunakan kesempatan itu setjara maksimal, tetapi dibatasi misalnya yang diadjudkan untuk semua Daerah Tingkat II itu hanya tja-

lon-tjalon jang terkuat sedjumlah perkiraan berapa wakil/kursi jang akan dimenangkan dalam Daerah Pemilihan itu; demikian pula tidak mengadjukan satu nama tjalon untuk semua Daerah Tingkat II.

Penempatan tjalon-tjalon untuk Daerah-daerah Tingkat II, apabila organisasi tersebut mendapat sedjumlah kursi, diatur dalam pasal 94 dan 95 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 dan untuk djelasnja kami persilahkan meneliti kembali lampiran-lampiran pada Pendjelasan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Komisi III DPR-GR pada tanggal 8 Agustus 1970. Perlu kiranjakami tambahkan bahwa sjarat domisili dalam wilayah geografis Republik Indonesia tetap ada.

8. SARAN-SARAN

1. Saran :

Menggaris bawahi keterangan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam rapat Kerdja dengan Komisi III DPR-GR pada tanggal 8 Agustus 1970 jang lalu, bahwa keterangan-keterangan Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum dalam rapat Kerdja ini, dan rapat-rapat kerdja dikemudian hari akan bersifat informatoris pula bagi Daerah-daerah.

Berhubung dengan itu kami menjarankan agar jang akan diperbanjak dan dikirim ke Daerah-daerah itu hanya djawaban-djawaban atau pendjelasan-pendjelasan Pemerintah/Lnebaga Pemilihan Umum atas pertanyaan-pertanyaan Komisi III DPR-GR, tetapi hendaknja disusun sistimatis pertanyaan-pertanyaannya berbunji demikian atau pendjelasannya berbunji demikian, dan djawaban atau pendjelasannya demikian, dan seterusnya.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran Saudara jang terhormat dan saran itu kami perhatikan.

Saran :

2. a. Kami menjambut gembira atas rentjana Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum untuk membuat peraturan khusus tentang kampanye, dan menjarankan dapatlah kiranya jiwa atau idee-idee yang akan dituangkan dalam peraturan itu didiskusikan dengan Komisi III DPR-GR sebelum mendjadi peraturan yang matang.
- b. Dalam hubungan ini kami minta perhatian Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum tentang adanya dua matjam tjara kampanye, jaitu kampanye yang konvensional dan kampanye yang in-konvensional.
Kampanye yang konvensional berbentuk rapat-rapat umum, dengan adanya Panitia Penjelenggara, adanya pembijtara pokok, dan sebagainya. Dalam hal perizinan, maka izin diberikan kepada Panitia Penjelenggara.
Adapun kampanye yang in-konvensional bentuknja lain.
Tjalon-tjalon Anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II akan berkeliling sendiri dengan membawa mike dan loud speaker sendiri, dan berkeliling ketempat-tempat berkumpulnja orang banyak, misalnja didedan pasar.
Hal ini adalah wadjar karena tiap-tiap tjalon djuga dikenal pribadi maupun program-program partainja oleh rakyat pemilihnja.
Dalam hal perizinan, maka untuk kampanye-kampanye yang in-konvensional ini sebaiknya dipertimbangkan perizinan tetap, yang berlaku selama masa kampanye.

Tanggapan :

- a. Menanggapi saran agar Pemerintah mendiskusikan terlebih dahulu rantjangan Keputusan tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan anggota-anggota Komisi III DPR-GR, kiranya akan lebih tepat kalau Komisi III memberikan saran-saran kepada Pemerintah untuk dijadikan bahan dalam menj-

sun rantjangan Keputusan dimaksud.

- b. Saran tersebut diperhatikan dalam menjusuan 'rantjangan Keputusan Presiden tentang Kampanje.

Saran :

3. Didalam Pasal 55 dan 56 dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 sudah djelas termuat "the donts" atau larangan-larangan didalam kampanje-kampanje. Karena itu kami sarankan agar dikeluarkan aturan-aturan tentang "the donts"-nja, jaitu keharusan keharusan didalam kampanje misalnja rapat-rapat umum dimulai dengur lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diachiri dengan lagu "Satu Nusa Satu Bangsa".

Hal ini adalah edukatif dan dalam rangka ichtiar, agar kampanje Pemilihan Umum tetap diatas rel pemeliharaan persaudaraan nasional.

Tanggapan :

3. Saran Saudara jang terhormat tersebut diperhatikan dalam menjusun Keputusan Presiden tentang Kampanje.

Saran :

Dalam rangka periode memanfaatkan "cooling off" selama tudjuh hari sebelum tanggal 5 Djuli 1971, kami menjarankan hendaknja disamping diadakannja latihan-latihan technis oleh petugas-petugas, maka RRI terus-menerus mengumandangkan lagu-lagu jang bertemakan persatuan dan persaudaraan Nasional.

Demikian pula supaja tokoh-tokoh Nasional dan regional (Untuk RRI-RRI setempat) diminta berpidato didepan tjorong RRI jang berisi seruan-seruan pemeliharaan persatuan dan persaudaraan jang harus tetap terpelihara bersama, dan djangan sampai retak akibat kampanje-kampanje dan kontra kampanje jang baru sadja selesai itu.

Tanggapan :

4. Saran Saudara yang terhormat diperhatikan.

Saran :

5. Menjarankan kepada Pemerintah agar pendapat-pendapat yang sama antara DPR-GR Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum supaya ditegaskannya dalam bentuk Keputusan/Instruksi untuk menjadi pegangan di Daerah, misalnja :
- a. Dalam soal **Pinrang** dimana yang harus menjawab yang tidak perlu, yang oleh pendaftar ditanyakan tentang keanggotaan Partai seseorang dalam rangka pendaftaran memilih.
 - b. Dalam hal pertanyaan mengenai memperbintjangkan Pantja Sila, Pemerintah menjawab bahwa **menbela, mengamankan dan mempersoalkan** setjara positif soal Pantja Sila tidak dilarang.
Ketegasan Pemerintah ini supaya dirumuskan.

Tanggapan :

- 5a. Soal "Pinrang" oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum telah dikirimkan kawat yang isinya tidak membenarkan seorang petugas pendaftar memilih/penduduk menanyakan keanggotaan partai seseorang.
Tindakan kawat tersebut disampaikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Daerah.
- b. Dalam jawaban kami pada tanggal 13 Agustus 1970 telah djelas dikemukakan tentang arti mempersoalkan Pantja Sila; sehingga Pemerintah menganggap kurang ada manfaatnja untuk mengaturnja lebih lanjut.

Saran :

6. Sehubungan dengan pertanyaan No. 9 pada daftar ini, maka kami ingin mengajukan saran-saran yang merupakan perubahan/penjemputnaa sebagai berikut :
- a. Pasal 94 ayat (1) dirubah sebagai berikut :

Djumlah wakil jang diperoleh suatu organisasi diberikan kepada tjalon-tjalon dalam daftar organisasi itu sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

Tjalon ini dinjatakan terpilih untuk Daerah Tingkat II dimana organisasi itu memperoleh suara terbanjak pertama dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnja menurut daftar perhitungan suara jang dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970.

- b. Pasal 94 ayat (2) diadakan perubahan sebagai berikut :
Apabila suatu organisasi jang memperoleh djumlah wakil sebagaimana jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak memperoleh suara terbanjak disuatu daerah Tingkat II manapun, dimana organisasi itu memperoleh suara terbanjak kedua, suara terbanjak ketiga dan seterusnya sampai Daerah Tingkat II memperoleh perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 1969.
- c. Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) diadakan perobahan sehingga dihapuskan ketentuan-ketentuan adanja "daftar tjalon organisasi dalam/untuk didaerah Tingkat II".
- d. Pasal 95 ayat (1) diadakan perubahan sebagai berikut :
Djumlah Wakil jang diperoleh suatu organisasi seperti dimaksud dalam pasal 94 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 diisi oleh tjalon No. 1 dan nomor berikutnya dari daftar tjalon organisasi jang bersangkutan seperti jang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
- e. Untuk menetapkan bahwa tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh organisasi dalamdaftar tjalon organisasi jang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 apabila terpilih dinjatakan mewakili Daerah Tingkat II seperti jang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-

undang No. 15 tahun 1969, maka perlu ditambahkan ketentuan bahwa pada lampiran B1 (formulir daftar tjalon organisasi) harus ditjantumkan pernyataan dari pengurus organisasi tingkat Tjabang jang wilajahnja meliputi Daerah Tingkat II, bahwa tjalon-tjalon jang namanja tertjantum pada daftar tjalon itu disetudjui untuk mendjadi wakil Daerah Tingkat II manapun dalam daerah pemilihan.

Tanggapan :

6. Dalam hubungan ini Pemerintah berasumsi bahwa saran-saran jang merupakan perubahan tersebut bertudjuan agar :
 - a. Berlakunja setjara efektif nomor urutan penempatan tjalon dalam Daftar Tjalon Organisasi untuk Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Anggota DPR.
 - b. Ditiadakannja ketentuan daftar tjalon untuk Daerah Tingkat II dalam pemilihan Anggota DPR dengan maksud bahwa daftar tjalon untuk daerah pemilihan jang disusun oleh organisasi (sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970) dihubungkan dengan pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970) dapat memenuhi "stelsel daftar" (Lihat Pendjelasan Umum sub 4 Undang-undang No. 15 tahun 1969).
 - c. Dipenuhinja ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 1969 tidak dengan mengurangi ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 23 ayat (1) jo Pendjelasan Umum sub 4 Undang-undang No. 15 tahun 1969, jaitu dengan menentukan :

kursi/wakil diberikan kepada organisasi (tidak coute que coute kepada tjalon) jang memperoleh suara terbanyak (majority of votes) dalam/untuk Daerah Tingkat II dalam daerah pemilihan;

- tjalon-tjalon dalam daftar tjalon se-daerah pemilihan disetudjui oleh Pengurus Organisasi tingkat Tjabang (Daerah Tingkat II) untuk mendjadi wakil Daerah Tingkat II manapun dalam daerah pemilihan.

Inti dan maksud saran-saran seperti disimpulkan pada sub a, b dan c diatas dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa mengadakan perubahan/penjempurnaan pada pasal 94 dan 95 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

Bahkan Pemerintah telah mengatur lebih terperinci lagi dalam Keputusan Presiden No. 40 tahun 1970 disusul Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 45/LPU/1970 jang antara lain menentukan adanya formulir Model B2 (Lampiran Daftar Tjalon Organisasi untuk pemilihan Anggota DPR) dimana Tjalon-tjalon organisasi jang oleh organisasi jang bersangkutan disusun dalam daftar tjalon untuk Daerah Tingkat II, perlu disetudjui oleh Pengurus Organisasi Daerah Tingkat II dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Daftar Tjalon untuk Daerah Tingkat II itu dapat sepenuhnya sama dengan daftar tjalon se-Daerah Pemilihan (Model B1) atau tidak sepenuhnya sama, sesuai jang dikehendaki oleh organisasi jang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan jang dirumuskan dalam pasal 94 dan 95 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 jo Keputusan Presiden No. 40 tahun 1970 adalah setjara tehnik dan administratif lebih tegas dan djelas, terutama dalam mengatur pelaksanaan pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 15 tahun 1969, jang inti dan maksudnja tidak berbeda dengan saran-saran jang diajukan dan tidak pula menjimpang dari ketentuan-ketentuan pokok Undang-undang No. 15 tahun 1969 setjara keseluruhan.

Demikianlah djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran Saudara-saudara jang terhormat.

Terima kasih.

Djakarta, 8 September 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN JANG DIADJUKAN
DALAM RAPAT KERDJA KOMISI III.DPR-GR BERSAMA DENGAN
PEMERINTAH PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 1970**

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS
PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN JANG DIADJU-
KAN DALAM RAPAT KERDJA KOMISI III DPR-GR
BERSAMA DENGAN PEMERINTAH PADA TANGGAL
8 SEPTEMBER 1970.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-GR jang terhormat.

Kami mengutjapkan terima kasih dan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada jang terhormat para anggota Komisi III DPR-GR jang telah meluangkan waktu mengadakan kembali rapat kerdja untuk mendengarkan djawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan jang diajukan oleh jang terhormat para penanja pada tanggal 13 Agustus jang lalu serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran jang baru.

Setelah pertanyaan-pertanyaan kami peladjari, maka djawaban-djawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

A. PERTANJAAN.

1. **Pertanyaan :**

Ada salah satu Daerah (di Kediri) dikonstatir bahwa biaja pembuatan kotak suara untuk Pemilihan Umum ongkos pembuatan Rp. 500,-

Sedang di Daerah lain anggaran yang disediakan oleh Pemerintah (Lembaga Pemilihan Umum) untuk pembuatan kotak suara Rp. 1.500,- Kalau hal ini benar sebagaimana daerah yang dikonstatir tersebut diatas, kemanakah sisa uang anggaran kotak suara dengan pembelandaan yang lebih sedikit dari anggaran yang telah disediakan ?

Djawaban :

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 106 tahun 1970, harga satuan tiap kotak kartu pemilih ditetapkan sebesar Rp. 750,-, sedang untuk tiap kotak surat suara sebesar Rp.1.500,-.

Biaja untuk pembuatan kotak kartu pemilih dari kotak surat suara tersebut merupakan batas tertinggi yang dapat disediakan. Dalam hal sesuatu jenis pengeluaran mengalami saldo lebih, sedangkan jenis lainnya terdapat saldo kurang dapat dilakukan penggeseran dengan ketentuan bahwa jenis pengeluaran termasuk masih dalam satu jenis belanda, artinya saldo lebih dari jenis belanda barang tidak boleh dipergunakan untuk jenis belanda personil.

Misalnya kelebihan biaja pembuatan kotak surat suara tidak dapat dipergunakan untuk menutup saldo kurang biaja perjalanannya.

2. **Pertanyaan :**

Kenyataan hingga sekarang formulir pendaftaran tjalon belum ada, sedang waktunya sudah dekat.

Tidakkah sebaiknya Lembaga Pemilihan Umum segera mengeluarkan formulir dimaksud ?

Djawaban :

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 jo pasal 5 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1970, pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 jo pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1970 dan pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 jo pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1970 tentang surat-surat formulir yang dipergunakan untuk penjuragan pentjalonan dalam Pemilihan Umum, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 45/LPU/ tahun 1970 telah ditetapkan tentang surat-surat formulir untuk keperluan penjurenggaraan pentjalonan dalam pemilihan anggota DPR/DPRD—I/DPRD—II.

Djenis formulir tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Formulir Model B, jaitu formulir Surat Pentjalonan untuk pemilihan anggota DPR/DPRD-I/DPRD-II;
- b. Formulir Model B1, jaitu formulir Daftar Tjalon Organisasi;
- c. Formulir Model B2, jaitu formulir Lampiran Daftar Tjalon Organisasi (Model B1);
- d. Formulir Model C, jaitu formulir Surat Pernyataan kesediaan dan Persetujuan Tjalon;
- e. Formulir Model D, jaitu formulir Surat Keterangan tentang terdaftar dalam daftar pemilih.

Semua djenis formulir tersebut telah dikirimkan ke Daerah-daerah.

3. **Pertanyaan :**

Apakah yang harus dilakukan bilamana Kepala Daerah ingin ikut tjampur tangan dalam hal pentjalonan anggota DPR oleh sesuatu Partai/Golkar. padahal ia hanya tjukup mengetahuinja sadja?

Djawaban :

Dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 15 tahun

1969 dinjatakan bahwa "tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil untuk DPR."

Pentjalonan pemilihan anggota DPR diadjukan oleh Pengurus Besar Organisasi dengan persetudjuan Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat II dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Adapun sifat mengetahui oleh Kepala Daerah ini adalah disamping untuk legalisasi eksistensi riil Organisasi jang bersangkutan beserta Pengurusnja di Daerah Tingkat II, djuga pada prinsipnja terhadap tjalon-tjalon jang dianggap mempunyai indikasi-indikasi negatif. Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Partai/Golkar jang bersangkutan, berarti hal ini dapat lebih memberikan kemandapan bagi organisasi dalam pengadjuan tjalonnja.

4. **Pertanjaan :**

Apakah tidak selajaknja sekarang diatur tentang masalah waktu pengiriman daftar susulan seperti dimaksud dalam pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 dan ayat (3) pasal 104 jo pasal 110 ayat (2)?

Djawaban :

Waktu untuk pengiriman daftar tjalon susulan jang dimaksud dalam pasal 94 ayat (4) jo pasal 104 ayat (3) dan pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ialah sesudah ditetapkan djumlah-djumlah kursi jang diperoleh organisasi-organisasi jang ikut dalam Pemilihan Umum, dan sesudah ditetapkannja pula tjalon-tjalon jang terpilih.

Saat itu adalah tidak lebih tjepat/pagi dari bulan September 1971. Pengaturan waktunja mengenai daftar tjalon susulan itu pada waktu ini (bulan September 1970) masih belum mendesak, namun demikian sudah mendjadi pemikiran Lembaga Pemilihan Umum. Kesibukan Pemerintah c.q. Lembaga Pemilihan Umum pada wak-

tu ini adalah menyelesaikan tahap-tahap terakhir pendaftaran pemilih/penduduk, dan kegiatan menghadapi pentjalonan.

5. Pertanyaan :

Ada berita bahwa tjalon-tjalon akan diselidiki terlebih dahulu sebelum diterima sebagai tjalon.
Apakah hal ini dapat dibenarkan ?

Djawaban :

Untuk menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat-syarat dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969, dan untuk menjadi anggota DPR harus dipenuhi syarat-syarat dimaksud pasal 11 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969.

Untuk menjadi anggota DPRD-I harus dipenuhi syarat-syarat dimaksud pasal 10 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969, dan untuk menjadi anggota DPRD-II harus dipenuhi syarat-syarat dimaksud pasal 25 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969. Tjalon-tjalon sebelum diterima sebagai tjalon akan diteliti lebih dahulu oleh Panitia Peneliti Pusat/Daerah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum (Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 49/LPU/Tahun 1970).

Djadi yang dimaksud disini bukanja menjelidiki, melainkan meneliti apakah tjalon sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan.

6. Pertanyaan :

Tentang pengamanan dalam bilik/tempat pentjoblosan tanda gambar, yang didalam Peraturan Pemerintah No. 1/1970 dikatakan

bahwa, jika dipandang perlu pendjaga keamanan boleh masuk kedalam ruangan/tempat pentjoblosan tanda gambar oleh pemilih.

Apakah Saudara Ketua sependapat dengan kami bahwa hal tersebut adalah suatu pensalah gunaan sipetugas ?

Djawaban :

Untuk mendjaawb pertanjaan ini, maka pasal 74 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 berbunyi "Hanya atas permintaan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara semata-mata untuk kepentingan pendjagaan ketertiban dalam tempat itu, alat-alat pendjaga keamanan yang bersendjata dibolehkan ditempatkan dalam Tempat Pemberian Suara".

Djelas yang dimaksud disini bukannya bilik/ruangan pentjoblosan, melainkan didalam "areal" Tempat Pemberian Suara.

Azas bebas dan rahasia tidak diusik.

7. Pertanjaan :

Soal orang yang ditjabut hak pilihnya oleh Lurah/Tjamat karena pada tahun 1946 yang lalu orang tersebut ikut kursus di Madiun. Pada hal dia tidak masuk partai/ormas P.K.I. Orang tersebut baru menjadi anggota Orpol pada tahun 1950.

Pada waktu diadakan pendaftaran pemilih orang tersebut sudah terdaftar.

Tetapi kemudian mendapat panggilan dan dinjatakan bahwa telah ditjabut hak pilihnya dengan alasan-alasan ikut kursus pada tahun 1946.

Apakah kejadian sematjam ini dapat dibenarkan ?

Djawaban :

Mendjawab pertanjaan ini, kami permaklumkan bahwa Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep. 010/Kopkam/3/1969 tentang Penjempurnaan ketentuan

dalam Surat Keputusan Pangkopkamtib No. Kep. 028/Kopkam/10/1968 berisikan antara lain ketentuan-ketentuan (Bab II pasal 4 huruf c) sebagai berikut :

C. Terdapat petundjuk atau patut diduga terlibat setjara langsung atau tidak langsung ialah mereka :

1. Jang menurut anteseden jang ada pernah terlibat dalam peristiwa Madiun dan setelah terdjadinja G-30-S/PKI tidak setjara tegas menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar atau dalam tindakan-tindakannya tjenderung selalu menguntungkan bekas P.K.I.
2. Jang mendjadi anggota Ormas/bernaung berlindung dibawah bekas Partai terlarang P.K.I.
3. Mereka jang dalam sikap dan tindakannya memperlihatkan simpatinja kepada bekas P.K.I.

Dari diktum Keputusan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa ex anggota P.K.I. tahun 1946 jang pernah terlibat dalam Peristiwa Madiun dan masuk parpol lain, serta setelah terdjadinja G-30-S/PKI tidak setjara tegas menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar atau dalam tindakan-tindakannya tjenderung selalu menguntungkan bekas P.K.I. atau apabila ia dalam sikap dan tindakannya memperlihatkan simpati kepada bekas P.K.I., maka ia terkena ketentuan-ketentuan Keputusan Kopkamtib tersebut.

Dalam hal ini jang perlu diperhatikan adalah adanya bukti apakah benar mereka itu selalu menguntungkan P.K.I. atau telah memperlihatkan simpatinja kepada bekas P.K.I.;

Apabila bukti-bukti telah tjukup meyakinkan maka mereka itu dimasukkan dalam daftar anggota jang tidak berhak memilih/dipilih.

B. SARAN.

1. Kiranya baik diusahakan oleh Lembaga Pemilihan Umum untuk memeriksa hal-hal yang bersangkutan-paut dengan pendaftaran pemilih di Daerah DCI-Djaya.

Karena kenyataan banyak terdjadi kesimpang-siuran, misalnja:

- a. Kartu kuning banyak yang belum ditanda-tangani oleh para pemilih, karena kabarnya belum selesai diturun;
- b. Agar supaja ada kebidjaksanaan diantara para Lurah yang berlain-lainan.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran tersebut.

Akan diadakan penelitian lebih lanjut dan apabila ternyata ada hal-hal sebagaimana dimaksud oleh Saudara yang terhormat, akan diadakan penertiban.

Demikianlah djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran Saudara-saudara yang terhormat.

Terima kasih.

Djakarta, 8 September 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN JANG DIADJUKAN OLEH
ANGGOTA ANGGOTA KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA
TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1970 NOMOR : 01.02/K/3465/1970**

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN JANG DIADJUKAN OLEH
ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR
SEBAGAIMANA TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT
PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1970 Nomor : 01.02/K/3465/1970

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat djawaban atas perta-
njaan-pertanjaan jang diadjukan oleh para anggota Komisi III DPR-GR seba-
gaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal 26
September 1970 No. 0102/K/3465/1970. Kami berpengharapan kiranya dja-
waban-djawaban tersebut akan lebih memberikan kedjelasan terhadap masalah-
masalah dibidang pemilihan umum.

PERTANJAAN-PERTANJAAN.

1. Pertanjaan :

Didalam suatu harian jang terbit di Ibu-Kota ada berita tentang peram-
pasan tanda salah satu Anggota Ormas didaerah Djawa Timur, selandjut-
nja kepada mereka ditekankan untuk memasuki Kokarmendagri.
Sampai dimanakah kebenaran berita itu?

Djawaban kami adalah :

Berita yang dimaksud masih harus dicek kebenarannya namun demikian kami mengadakan Saudara-saudara Anggota Komisi III DPR-GR yang terhormat untuk tidak terlalu prematur menanggapi berita-berita yang belum jelas sumbernya yang ber tendensi negatif dan yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan pemilihan umum.

2. Pertanyaan :

Baru-baru ini di Djawa Tengah telah dilaksanakan sematjam fieldtest Pemilu yang kalau tidak keliru oleh Pemerintah dibuatkan dokumentasi dalam bentuk film.

Dapatkah LPU mengusahakan agar film tersebut dipertunjukkan kepada Komisi III ?

Djawaban kami adalah :

Mengenai fieldtest pemilu yang dibuat di Djawa Tengah LPU tidak membuat dokumentasi berupa film.

Kalau yang dimaksud adalah film instruksi yang diusahakan oleh LPU dan yang telah diedarkan ke daerah-daerah, maka LPU dapat memper-tunjukkan kepada Komisi III, sedangkan tempat dan waktu kami serahkan kepada Komisi III.

3. Pertanyaan :

Sebagaimana diketahui Kepala Desa memegang peranan penting dalam menentukan mengenai hak pilih seseorang. Ternyata di Djawa Tengah ada beberapa anggota dari salah satu Papol dinjatakan tidak punya hak pilih lagi.

Dapatkah LPU menjelaskan apakah landasan hukum yang dipakai dan siapakah yang lebih kompeten untuk menjatakan bahwa seseorang tetap mempunyai kehidupan hak pilihnya dan bagaimanakah menyelesaikan persoalan tersebut ?

Djawaban kami adalah :

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 jo. pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 diatur tentang orang-orang yang tidak berhak memilih.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengeluarkan instruksi No. 2 tahun 1970 tentang Pendaftaran W.N.R.I. yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih. Djadi atas dasar instruksi ini Kepala Desa menjusun daftar W.N.R.I. yang tidak didaftar sebagai pemilih untuk desanja dan setjara berdjen-djang dikirimkan kepada Gubernur/Kepala Daerah, yang kemudian mengirimkannya kepada Laksus Kopkamtib untuk diteliti.

Daftar W.N.R.I. yang telah diteliti oleh Laksus Kopkamtib, oleh Gubernur/Kepala Daerah dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan yang selandjutnja mengirimkan kepada Pangkopkamtib untuk memper-oleh penelitian lebih landjut.

Atas dasar penelitian Pangkopkamtib ini Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar W.N.R.I. tersebut.

Daftar yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri ini seharusnya sebelum tanggal 5 Djuli 1970 sudah diterima di Desa-desa, akan tetapi karena kesulitan technis daftar W.N.R.I. tersebut belum sampai di Desa-desa.

Berhubung dengan hal tersebut, maka oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum telah dikeluarkan kawat tanggal 10 Djuli 1970 No. SDPX.23/1/13 yang pada pokoknja adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pemilih/Penduduk agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu 5 Djuli 1970.
2. Sambil menunggu penelitian Pangkopkamtib dan pengesahan Menteri Dalam Negeri maka pendaftarannya dilakukan sebagai berikut :
 - a). Bagi W.N.R.I. yang digolongkan Kategori A, B dan C tetap tidak didaftar dalam formulir-formulir Model A-1 (Model A-satu) dan Model A.
 - b). Bagi W.N.R.I. yang masih diragukan akan disahkan atau

tidaknja oleh Menteri Dalam Negeri dapat didaftar dalam formulir Model AI (Model A satu), tetapi tidak didaftar dalam formulir Model A.

Maka berhubung dengan ini jang tidak didaftar sebagai pemilih oleh Kepala Desa jang bersangkutan hanjalah mereka jang terkena ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

4. Pertanyaan :

Di Sulawesi Tengah terdaftar sedjumlah 12.000 orang petani jang dikategorikan sebagai anggota B.T.I.

Masuknja para petani mendjadi anggota B.T.I. itu adalah karena penipuan oleh P.K.I. dengan menjatakan bahwa B.T.I. adalah Barisan Tani Islam.

Sebagai kenjataan mereka terdaftar sebagai anggota B.T.I. dan sudah barang tentu kehilangan hak pilihnja.

Apakah tidak ada tjara-tjara jang dapat ditempuh sehingga mereka dapat mempergunakan kembali hak pilihnja didalam Pemilu jang akan datang ?

Djawaban :

Didalam mengadakan pendaftaran pemilih Lembaga tetap berpegang kepada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 meskipun demikian sudah ditempuh kebidjaksanaan untuk mengatasi akibat-akibat penipuan PKI pada masa lalu. Sebagai gambaran dapat kami kemukakan bahwa djumlah W.N.R.I. jang tidak didaftar sebagai pemilih di Sulawesi Tengah sebanyak 2540 orang ditambah daftar susulan sebanyak 552 orang, sehingga kesemuanja hanja berdjumlah 3092 orang.

5. Pertanyaan :

Didesa Pinaretengan dan desa Bonpaso II Ketjamatan, Tompaso Kabu-

paten Minahasa, para petugas pendaftaran pemilih didalam tugas pendaftaran juga memungut keuangan, untuk tiap kepala keluarga dipungut uang sebanjak Rp. 20, Rp. 40, dan maximum Rp. 50,-.

Apakah demikian itu merupakan kebidjaksanaan setempat dan apakah tjara demikian dapat dibenarkan? Djika tidak, tindakan apa jang dikeluarkan ?

Djawaban :

Untuk pendaftaran pemilih tidak dilakukan pungutan-pungutan biaja dari rakjat! Akan tetapi pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan bersama-sama dengan pembentukan Blok Sensus dan Pendaftaran Rumah Tangga jang dilaksanakan oleh petugas Kantor Sensus dan Statistik Daerah, untuk pembentukan Blok Sensus dan Pendaftaran Rumah Tangga ini Biro Pusat Statistik menjediakan biaja Rp. 1,75 (satu rupiah tujuh puluh lima sen) untuk pembuatan plat nomor Blok Sensus. Apabila di Daerah-daerah dilakukan pungutan-pungutan maka ada kemungkinan pungutan-pungutan itu diadakan dalam rangka pembuatan plat nomor Blok Sensus jang lebih baik.

6. Pertanyaan :

Penerimaan honorarium bagi petugas-petugas Pemilu di Djabar ternyata mengalami kelambatan.

Djika di Djawa Barat demikian halnja maka kemungkinan di Daerah-daerah di Luar Djawa akan demikian pula.

Apakah tidak ada pemikiran untuk memperlantjar penerimaan honor bagi petugas Pemilu di Daerah sehingga dengan demikian pelaksanaan tugas djuga berdjalan dengan lantjar.

Djawaban :

Diakui bahwa pada permulaan kegiatan Lembaga Pemilihan Umum ada keterlambatan dalam dropping keuangan untuk keperluan pemilihan umum termasuk honorarium. Untuk mengatasi keterlambatan ini kepada Gubernur Kepala Daerah telah diinstruksikan untuk memberi

pindjaman guna memperlantjar kegiatan Panitia Pemilihan di Daerah-daerah.

Dengan keluarnya s.k.o. triwulan ke-I dan ke-II maka kesulitan-kesulitan dalam bidang keuangan termasuk honorarium sudah dapat diatasi.

Pertanyaan :

Mengenai anggaran, sesuai dengan pendjelasan Saudara Sekretaris Umum LPU didalam Rapat Kerdja jang lalu bahwa sisa uang sesuatu pos dapat digeser untuk anggaran jang sedjenis.

Bagaimanakah dengan sisa achir dari sesuatu anggaran sesudah digeser untuk anggaran jang sedjenis tetapi masih ada sisa? uang tersebut achirnya digunakan untuk apa ?

Djawaban :

Berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 25 Djuli 1970 No. 82/14/1970 sisa lebih dari satu djenis pengeluaran dapat digeser kedjenis pengeluaran lain dalam satu djenis belandja.

Apabila pada achir tahun anggaran masih ada saldo lebih, maka harus disetor kembali ke Kas Negara.

8. **Pertanyaan :**

Bagaimanakah persjaratan domisili bagi tjalon Dati II? Karena kebanyakan tjalon-tjalon tersebut bertempat tinggal di Kotamadya sedangkan tjalon itu tokoh dan Kabupaten.

Djawaban :

Untuk tjalon tidak ada persjaratan domisili baik bagi tjalon DPRD Tingkat I maupun untuk DPRD Tingkat II sesuai pendjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 1969.

9. **Pertanyaan :**

Didalam perintjian djadwal pelaksanaan Pemilu disebutkan bahwa pe-

njampaian Kotak Suara jang berisi bungkus dan sampul-sampul kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan tanggal 6 Djuli 1971, dan tanggal 13 Agustus 1971 Rapat Perhitungan Suara dan pengiriman hasil-hasilnja kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Apakah pertimbanganja harus diadakan lima minggu untuk menghitung hasil-hasil pemungutan suara.

Apakah tidak sebaiknya dinjatakan "Selambat-lambatnja tanggal 13 Agustus 1971."

Djawaban :

Waktu lima minggu jang dimaksud bukan hanya disediakan untuk menghitung hasil pemungutan suara sadja, melainkan termasuk waktu untuk pengiriman surat-surat Suara dari TPS (2) ke PPS (2) dan dari PPS ke Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II jang terutama di Daerah diluar Djawa jang komunikasinja sulit atau makan waktu jang tjukup lama.

10. **Pertanyaan :**

Pasal 88 ayat (2) PP. No. 1/1970 ditentukan, "semua perbuatan ketua dan anggota2 pemungutan suara dalam rapat perhitungan suara itu harus dapat disaksikan, diikuti dan diteliti oleh semua orang jang diberi izin untuk menghadiri rapat".

Siapakah jang dimaksud disini dengan jang diberi izin dan siapa jang memberi izin.

Saran : Supaja pimpinan Parpol dan pimpinan Golkar diundang pada waktu mengadakan perhitungan suara demikian pula orang-orang jang diberi izin tersebut dengan tidak mengurangi sipat terbukanja.

Djawaban :

Jang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 jang diberi izin untuk menghadiri rapat penghitungan suara ialah semua wakil dari organisasi jang ikut dalam pemilihan umum sedangkan jang memberi izin Ketua P.P.S.

Untuk hal ini pada waktunya akan dikeluarkan instruksi tersendiri.

11. **Pertanyaan :**

Apakah ada formulir khusus untuk berita hasil pemungutan suara seperti dimaksud dalam pasal 85 P.P. No. 1/1970.

Usul : Agar sebelum membuka Kotak Suara supaya lebih dahulu Ketua Kelompok Pemungutan Suara memberitahukan beberapa orang yang ada di Daerahnya atau T.P.S.-nya yang memberikan/menggunakan hak pilihnya dan berapa orang dari luar T.P.S. tersebut.

Djawaban :

Mengenai formulir yang dimaksud memang akan diadakan; usul agar Ketua K.P.P.S. sebelum membuka Kotak Suara mengumumkan jumlah Pemilih yang menggunakan dan yang tidak menggunakan haknya dan pemilih yang berasal dari luar T.P.S. tersebut akan diperhatikan.

12. **Pertanyaan :**

Saran : a. Supaya Pemerintah mengeluarkan instruksi dengan disertai gambar mengenai "apa yang dimaksud dengan T.P.S. dan nama yang dimaksud dengan bilik pentjoblosan" (agar diberi istilah yang tegas).

Apakah petugas2 tersebut hanya boleh masuk sampai pada areal T.P.S. atau sampai ketempat bilik pentjoblosan.

Apabila sampai pada bilik pentjoblosan walaupun atas permintaan Ketua Kelompok Pemungutan Suara hal itu tidak diperbolehkan.

b. Oleh karena orang-orang yang melakukan pengawasan adalah orang-orang dari Hankam maka diminta agar Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum memberitahukan instruksi tersebut kepada Men. Hankam.

Apabila LPU yang berkuasa penuh maka Hankam harus tunduk.

Tanggapan kami :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai T.P.S. termasuk bilik pentjoblosan ini, pada waktunya akan dikeluarkan :

Mengenai pertanyaan tentang apakah petugas hanya boleh masuk sampai diareal T.P.S. atau sampai ketempat bilik pentjoblosan diharap memperhatikan jawaban kami atas pertanyaan nomor 6 dalam Rapat Kerja Komisi III DPR-GR bersama dengan Pemerintah pada tanggal 8 September 1970;

Dalam lingkungan T.P.S. pejabat yang mempunyai wewenang (authority) adalah Ketua K.P.P.S.

Mengenai saran b segala instruksi mengenai pelaksanaan pemilihan umum selalu diberitahukan kepada Menteri Pertahanan Keamanan.

3. Pertanyaan :

- Saran : Diharapkan agar Pemerintah mengeluarkan instruksi kepada Djawatan-djawatan, Perusahaan-perusahaan Negara yang mewajibkan kepada Kepala Djawatan/Direksi Perusahaan untuk memberikan kebebasan kepada buruh-buruhnya pada tanggal 5 Djuli 1971 guna melakukan hak pilihnya dalam Pemilu dengan memberikan upah penuh.

Tanggapan kami :

- Saran : Mengenai hal ini telah tertampung dalam pasal 78 P.P. No. 1 tahun 1970 dan pasal 27 ayat (9) Undang-undang Nomor 15 tahun 1969.

4. Pertanyaan :

- Saran : Dalam hal seseorang tjalon akan dinjatakan tidak memenuhi syarat oleh Kopkamtib sesuai dengan Kep.Pres. No. 39 pasal 10, maka sebaiknya lebih dahulu diusahakan :
- a. adanya clearance dengan pihak yang bersangkutan.

b. diberi kesempatan kepada tjalon untuk menarik diri.

Tanggapan kami :

Saran: Mengenai hal ini akan diperhatikan dan pada waktunya akan dikeluarkan ketentuan-ketentuan khusus.

Demikianlah djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran Saudara-saudara jang terhormat.

Terima kasih.-

Djakarta, 29 September 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN JANG DIADJUKAN OLEH
ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA
TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 29 SEPTEMBER 1970 NOMOR : C1-02/K/3501/DPR-GR/1970**

D J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN JANG DIADJU-
KAN OLEH ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR SEBA-
GAIMANA TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIM-
PINAN DPR-GR TANGGAL 29 SEPTEMBER 1970
NO. C1-02/K/3501/DPRGR/1970**

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat djawaban atas perta-
njaan-pertanjaan tambahan jang diadjukan oleh para anggota Komisi III
DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR
tanggal 29 September-1970 No. C1.02/K/3501/DPRGR/1970.

Djawaban atas pertanjaan-pertanjaan tersebut sebagai berikut:

1. Pertanjaan :

Seandainja terdjadi sesuatu kedjadian diluar dugaan mendjelang pemu-
ngutan suara dikantor Panitia Pendaftaran Pemilih atau Panitia Pemu-
ngutan Suara (tempat menjimpan kartu-kartu nama pemilih) sehingga
kartu-kartu pemilih hilang atau terbakar, maka apa dan bagaimanakah
kebidjaksanaan Pemerintah untuk mengatasinja sehingga semua jang
berhak memilih itu dapat memberikan suaranya?

Djawaban :

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 dinjatakan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dilakukan serentak setjara berturut-turut dalam satu hari.

Apabila disesuatu tempat didalam suatu Daerah Pemilihan pada waktu jang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemungutan suara atau penjelenggaraannya terhenti disebabkan oleh keadaan jang memaksa, misalnja adanja bentjana alam (bandjir, gempa bumi, kebakaran dan lain-lainnja), sehingga mengakibatkan hilangnya Daftar Pemilih dan Kartu Pemilih, maka segera dilaksanakan pendaftaran pemilih ulangan untuk wilayah kerdja T.P.S. jang bersangkutan dan setelah itu diadakan pemungutan suara susulan atau pemungutan suara ulangan jang pelaksanaannya diselesaikan dalam djangka waktu tiga bulan, terhitung sedjak hari pemungutan suara (5 Djuli 1971).

Dengan demikian pemilih jang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih tidak akan kehilangan hak pilihnja.

2. Pertanyaan :

Berdasarkan laporan jang pernah kami peroleh pada tanggal 17 September 1970 bahwa di Ketjamatan Rampah Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terdapat 7500 orang penduduk jang tidak terdaftar sebagai tjalon pemilih karena mereka tidak mempunyai kartu penduduk/surat keterangan penduduk/surat keterangan pindah penduduk/surat keterangan bebas G-30-S/PKI.

Apakah kedjadian ini benar?

Kalau benar, apakah tindakan Pemerintah mengenai kedjaian ini ?

Djawaban :

Berita jang dimaksud sedang dicheck kebenarannya.

Demikianlah djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan

tambahan Saudara-saudara jang terhormat.

Djakarta, 29 September 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN JANG DIADJUKAN
OLEH ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA
TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 29 OKTOBER 1970
NOMOR : C1.01/K/3922/DPR-GR/1970

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM
ATAS
PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN
JANG DIADJUKAN OLEH
ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR—GR SEBAGAIMANA
TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN
DPR—GR TANGGAL 29 OKTOBER 1970
NOMOR C1.01/K/3922/DPRGR/1970

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat djawaban atas pertanyaan-pertanyaan/saran jang diadjukan oleh para anggota Komisi III DPR—GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR—GR tanggal 29 Oktober 1970 No. C1.01/K/3922/DPRGR/1970.

Kami berpengharapan kiranya djawaban-djawaban tersebut akan lebih memberikan kedjelasan lagi terhadap masalah-masalah dibidang pemilihan umum.

A. UMUM

I. MASALAH PANITIA.

1. Pertanyaan :

Pada umumnja pelaksanaan persiapan pemilihan umum didaerah-

daerah praktis dilaksanakan oleh pedjabat dan Sekretariat Panitia mulai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sampai Panitia Pendaftaran Pemilu.

Sehubungan dengan itu terdengar keluhan dari anggota Panitia yang terdiri dari unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya seolah-olah mereka kurang sekali diikuti sertakan di dalam kegiatan persiapan tersebut.

Pada hal untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang kita semuanya sependapat bahwa partisipasi unsur masyarakat yang terorganisir mutlak diperlukan untuk itu.

Apakah Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum sependapat dengan Komisi III bahwa tjara kerdja daripada Panitia Daerah perlu disempurnakan lagi.

Djawaban :

Dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 tahun 1970 telah diatur dengan jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara Anggota-anggota Panitia Pemilihan di Daerah. Pada dasarnya Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan seterusnya berfungsi sebagai pembantu Panitia Pemilihan Indonesia dan bertugas sebagai pelaksana.

Dengan fungsi dan tugas tersebut, maka titik berat aktivitas berada di Sekretariat. Anggota-anggota Panitia Pemilihan di Daerah baik diminta maupun tidak menjampaikan saran-saran/Pertimbangan-pertimbangan mengenai masalah-masalah yang pokok saja. Sudah barang tentu ikut sertanya anggota-anggota Panitia Pemilihan di Daerah dalam kegiatan persiapan Pemilihan Umum tidak dapat disamakan dengan kegiatan sekretariat sehari-hari.

Apabila ada anggapan bahwa seolah-olah anggota-anggota Panitia Pemilihan di Daerah kurang diikuti sertakan dalam kegiatan persiapan pemilihan umum hal ini tidak dapat digeneralisir, mungkin terdapat disatu atau dua Daerah.

Lembaga Pemilihan Umum tidak segan-segan mengoreksi terhadap hal-hal yang kurang tepat dilaksanakan di Daerah-daerah.

Saran :

1. Komisi III menjarankan agar Lembaga Pemilihan Umum mengeluarkan Instruksi kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara supaya segenap unsur Parpol/Golkar baik yang sudah terwakili didalam Panitia atau belum, diikut sertakan aktif dengan pembagian tugas sehingga gap yang seolah-olah ada sekarang ini dirasakan dapat dikurangi.

Tanggapan :

Saran tersebut sudah mendapat perhatian Lembaga Pemilihan Umum dan mengenai hal ini telah tertampung dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 1970.

2. Mengingat letak geografis Daerah Sulawesi Utara yang menjakup kepulauan Sangir Talaud yang berbatasan dengan Philipina maka problem dalam pemilihan umum dan kelantjaran dalam persiapannya serta pelaksanaan yang tepat haruslah dihubungkan dengan nama Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap daerah-daerah perbatasan dan kepulauan seperti halnya dengan Daerah Sulawesi Utara. Untuk Sulawesi Utara sesuai dengan permintaan mereka maka perlu diusahakan sebuah kapal berukuran @ 400 sampai 500 ton. Bagi daerah kepulauan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Tanggapan :

Mengingat terbatasnya anggaran dan banyaknya kebutuhan-kebu-

tuhan jang harus dipenuhi maka permintaan bantuan kapal untuk Sulawesi Utara jang berukuran 500 ton tidak mungkin dapat dipenuhi.

Untuk memenuhi permintaan dari Sulawesi Utara kepada Daerah tersebut telah diberikan kapal tongkang bermotor dengan ukuran 200 ton oleh Departemen Perdagangan jang baru-baru ini diserahkan Presiden kepada Daerah-daerah, dan tongkang tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilihan Umum.

3. Bagi daerah jang komunikasinya terlalu sulit seperti halnya daerah-daerah diluar Djawa dimana kendaraan umum tidak ada, supaya kepada para petugas Panitia diberikan prioritas kendaraan (sepeda, sepeda-motor, perahu, kuda).

Tanggapan :

Sesuai dengan policy Lembaga Pemilihan Umum dan sejalan dengan saran, maka Lembaga mengutamakan Daerah-daerah jang sulit komunikasinya terutama diluar Djawa.

Kendaraan jang dipesan oleh Lembaga Pemilihan Umum lebih kurang 90% telah dikirim ke Daerah-daerah.

Pada kwartal I dan II kepada Daerah-daerah telah diberikan uang sedjumlah Rp. 250.000,- untuk tiap-tiap Ketjamatan diluar Djawa dan Rp. 200.000,- untuk tiap-tiap Ketjamatan di Djawa, guna pembelian alat-alat kendaraan misalnja sepeda motor, motor tempel, sepeda dan kuda, disesuaikan dengan kebutuhan Ketjamatan masing-masing.

4. Supaja dipertimbangkan pengharapan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Tanah Karo Sumatera Utara untuk dapat menukarkan kendaraan jeep dengan sepeda motor.

Tanggapan :

Sampai sekarang ini permintaan dari Sumatera Utara untuk me-

nukarkan jeep dengan sepeda motor Honda bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Tanah Karo belum diterima oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Lembaga Pemilihan Umum bekerdja diatas rentjana dan chusunya mengenai penentuan djenis kendaraan dan pembagiannya djauh sebelumnya telah disampaikan ke Daerah-daerah pada waktu diadakan santiadji bulan Pebruari 1970.

Apabila ada usul jang tiba-tiba disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum pada saat ini, maka sulit bagi Lembaga Pemilihan Umum untuk memenuhinja, karena hal ini akan membawa pengaruh setjara keseluruhan.

5. Jeep Toyota jang telah didjandjikan untuk Djawa Timur sejogjanja djangan ditukar dengan Pick-up.

Tanggapan :

Tidak ada djatah jeep jang ditukar dengan pick-up.

Tiap Daerah menerima jeep dan pick-up.

Ada usul dari Djawa Timur agar pick-up diganti dengan pick-up type lain.

Hal ini sedang dalam penjelesaian dan apakah akan diganti seluruhnya atau tidak akan tergantung kepada persediaan jang ada.

6. Instruksi Pemerintah jang menetapkan 300 pemilih setiap T.P.S., djika mutlak dilaksanakan demikian seperti jang ditafsirkan di Daerah Sulawesi Utara maka ketentuan itu pasti akan mendjadi penghambat dalam mentjapai djumlah pemilih sebanyak-banyaknya untuk memberikan suaranya.
Hal itu disebabkan letaknja kampung berada djauh dari T.P.S., pada hal djumlahnja kurang dari 200 orang.
Agar ketentuan 300 orang itu tidak mutlak bagi Daerah-daerah jang djarang penduduknja dan letaknja berdjauhan satu sama lain.

Dengan lain perkataan norma jang dipertimbangkan bukan djumlah tetapi lokasi.

Tanggapan :

Tiap T.P.S. bukan mutlak untuk 300 pemilih, tetapi untuk 200 @ 300 pemilih.

Dalam menempatkan T.P.S. memang ada persjaratan jang harus diperhatikan ialah :

- a). Tempat T.P.S. sifatnja sentral jaitu mudah didatangi pemilih dan pemilih jang telah selesai memberikan suaranya mudah kembali sehingga tidak bermalam.
- b). Pemungutan Suara dapat dilakukan mulai djam 08.00 sampai djam 14.00.
- c). Penghitungan Suara dapat diselesaikan pada waktu itu juga.

Karena djangka waktu pemungutan suara terbatas jaitu mulai djam 08.00 sampai djam 14.00, maka pada tiap-tiap T.P.S. menurut kebutuhan dapat dibuat lebih dari satu bilik pemungutan suara dengan berpedoman lebih kurang untuk 100 orang pemilih disediakan 1 (satu) bilik pemberian suara.

Dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, maka pemilih jang sudah berada/hadir dalam kompleks T.P.S. menunggu gilirannya sebelum djam 14.00 masih diperbolehkan memberikan suaranya, meskipun sudah melampaui djam 14.00.

II. MASALAH DJUMLAH PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN DAN BIDANG TUGAS SERTA INSENTIVE.

Saran :

Berdasarkan peraturan yang berlaku maka jumlah personil pada semua Panitia Pendaftaran Pemilih adalah sama, demikian pula mengenai insentive.

Pada hal kenjataanja pelaksanaan tugas di Daerah Panitia Pendaftaran Pemilih berlainan satu sama lain.

Bagi Petugas-petugas dipelosok-pelosok (luar pulau Djawa), mereka menghadapi problem komunikasi yang harus ditempuh dengan berdjalan kaki atau belajar yang memerlukan waktu.

Mengingat hal-hal seperti dikemukakan diatas, Komisi III menyarankan agar Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum meninjau kembali dengan mengusahakan penambahan insentive para petugas Panitia Pendaftaran Pemilih.

Disarankan supaya personalia Panitia Pendaftaran Pemilih di daerah-daerah yang padat pendudukja khususja dipulau Djawa dapat ditambah.

Tanggapan :

Djumlah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih telah ditentukan sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang adalah dalam rangka penghematan dan efficiency kerdja.

Apabila dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diperlukan tenaga pendaftaran dalam jumlah yang lebih banyak dapat pula diangkat Pendaftar2 Pemilih (yang bukan anggota Panitia Pendaftaran Pemilih) menurut keperluan, yang memperoleh uang premi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 19 Maret 1970 No. 1/14/1970. Mengingat jangka waktu tugas Panitia Pendaftaran Pemilih tinggal 1 (satu) bulan, jaitu setelah Daftar Pemilih Tambahan disahkan (akhir bulan Nopember 1970), maka jumlah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih tidak perlu ditambah.

Mengenai penambahan insentive bagi para Panitia Pendaftaran Pemilih dijelaskan bahwa setelah berakhirja masa-kerdja Panitia Pendaftaran Pemilih, kepada mereka selain premi dan uang sidang

jang telah diberikan, akan diberikan sekedar penghargaan berupa uang dengan perintjian sebagai berikut :

Ketua	Rp. 1.000,-
Sekretaris	Rp. 500,-
Anggota	Rp. 300,-

Biaja untuk keperluan ini akan disadjikan dalam triwulan ke III dan ke IV tahun 1970/1971.

III. PERLENGKAPAN/PERBEKALAN

1. Saran :

Agar kepada Panitia Pendaftaran Pemilih dipulau Djawa dan Daerah-daerah jang padat penduduknja masing-masing dapat diberi meisn ketik, sedangkan pemberian jang sama diberikan djuga kepada Panitia Pemungutan Suara diluar pulau Djawa.

Tanggapan :

Mengingat terbatasnja biaja, maka penjediaan mesin ketik diselenggarakan sampai dengan Ketjamatan (Panitia Pemungutan Suara) dengan ukuran 18"/19". Lembaga Pemilihan Umum sedang mempertimbangkan untuk memberikan tambahan mesin tik kepada daerah2 jang volume pekerdjaannja setjara objektif memang besar, seperti misalnja P.P.D.-I-DCI Djakarta Raja sudah barang tentu hal ini tetap dilihat dari sudut persediaan anggaran jang ada.

Perlu didjelaskan, bahwa pengiriman mesin ketik tersebut tidak dapat disesuaikan dengan djadwal (terlambat 1 – 1½ bulan) karena adanja perobahan peraturan dibiidang ekonomi dan keuangan pada bulan Pebruari 1970.

2. Agar dipertimbangkan pengamanan/penjimpanan kartu pemilih, Daftar Pemilih, dan alat-alat kantor Pemilihan Umum lainnja, baik pada saat persiapan maupun sesudah pemilihan minimal pada

tingkat Ketjamatan.

Tanggapan :

Terhadap alat-alat inventaris kantor Pemilihan Umum berlaku materieleel/financieel beheer voorschriften untuk pelaksanaan ini sudah tjukup diberikan pedoman-pedoman bagi pedjabat-pedjabat didaerah.

Mengenai pengamanan terhadap Model A dan A1 telah dikemukakan kepada Daerah-daerah dalam Rapat Kerdja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1970, antara lain agar disediakan lemari jang ada kuntjinja dan telah diberikan petundjuk tentang tjara-tjara pengamanannja.

3. Agar Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum mulai memikirkan pembuatan pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan dan pembentukan penundjukan petugas-petugas jang akan melaksanakan pengawasan.

Tanggapan :

Pengawasan terhdap Panitia-panitia Pemilihan di Daerah telah dilakukan misalnja :

- a). Dalam Rapat-rapat Kerdja sekaligus diberikan petundjuk-petundjuk, penegasan, penertiban dan lain sebagainja.
- b). Pengiriman Team ke Daerah-daerah untuk mengadakan pengawasan dan penelitian dengan disertai check-list lengkap sehingga Team mengetahui apa jang harus diperiksa, diteliti dan lain sebagainja.

Adanja badan khusus untuk melakukan pengawasan misalnja seperti Inspektorat Djenderal sedang dipertimbangkan pengisian personalianja mengingat tersedianja tenaga-tenaga tehnis dan anggaran.

Namun demikian saran ini mendapat perhatian sepenuhnya.

1. Pertanyaan :

Siapakah yang menjediakan perbekalan-perbekalan untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ketjuali yang diusahakan oleh Pusat dalam rangka pemilihan umum?

Benarkah bahwa untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di Sumatera Utara penyelenggaraan penjediaan perbekalan tersebut dilakukan oleh Kowilhan I?

Kalau benar apakah dasar hukumnya?

Tanggapan :

Pada dasarnya pengadaan barang-barang untuk Panitia Pemilihan di Daerah ketjuali yang diusahakan oleh Pusat diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I. Hal ini sudah merupakan keputusan Lembaga Pemilihan Umum.

Untuk keperluan koordinasi efisiensi dan efektifitas, maka penyelenggaraan pengadaan barang-barang tersebut untuk Panitia-p Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Sumatera dilakukan oleh Kowilhan I.

Setelah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam pertemuan tanggal 17 Oktober 1970 dengan Pangkowilhan Sumatera tentang tata-tjara pengadaan barang-barang tersebut, maka Pangkowilhan I beranggapan tidak perlu lagi diadakan Badan Koordinasi Pengadaan dan keputusan mengenai hal ini akan ditjabut.

IV. SENSUS PENDUDUK.

Pertanyaan :

Sebelum berlangsung pelaksanaan sensus, Pemerintah telah memperkirakan berdasarkan sensus tahun 1961 sampai dengan tahun 1970 akan terdapat sedjumlah tambahan penduduk dengan perhitungan 2,5% setiap tahun.

Ini berarti bahwa untuk daerah Djawa Timur jumlah penduduk bertambah menjadi lk. 27 djuta djiwa.

Pada hal menurut kenyataan berdasarkan sensus pada tahun 1970 berkisar 25 djuta.

Mengingat adanya perbedaan yang cukup besar, apakah Pemerintah tidak menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai sebab-sebab berkurangnya hasil sensus dibandingkan dengan perkiraan Pemerintah semula?

Djawaban :

Proyeksi jumlah penduduk tahun 1970 merupakan perkiraan dari Biro Pusat Statistik didasarkan atas hasil sensus 1961 dengan kenaikan rata-rata 2½% tiap tahun dengan anggapan bahwa selama jangka waktu tersebut tidak ada perpindahan penduduk dan angka kelahiran/kematian tetap.

Menurut kenyataannya berdasarkan hasil sensus 1970, penduduk Propinsi Djawa Timur berjumlah 24.780.905 orang.

Perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 1970, disebabkan antara lain karena:

- a. mungkin perkiraan kenaikan rata-rata 2½% sudah tidak tepat lagi bagi Djawa Timur (kurang tepatnya perkiraan jumlah rata-rata kelahiran dan kematian serta adanya program Keluarga Berencana).
- b. dalam jumlah tersebut belum termasuk Warga Negara Asing.
- c. adanya transmigrasi dan perpindahan penduduk keluar Jawa Timur.

V. PENDAFTARAN PEMILIH

Pertanyaan :

Menurut target yang diinstruksikan oleh Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum ke Daerah-daerah agar supaya diusahakan pendaftaran Pemilih sehingga dapat mentjapai 55%.

Menurut kenyataan dan sesudah dimintakan penjelasan dari pihak yang bersangkutan ternyata djumlah pemilih hanya dapat mentjapai maksimal 48%.

Menurut penelitian ada kemungkinan djumlah 48% itu masih akan berkurang disebabkan adanya kewajiban bagi setiap pemilih untuk menanda tangani "A1".

Menurut keterangan yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, seseorang pemilih yang tidak menanda tangani kartu "A1" sampai dengan tanggal 30 Oktober 1970 maka yang bersangkutan kehilangan hak pilihnya.

Apakah memang ada Instruksi yang memberikan pengertian demikian itu, bahwa seseorang pemilih kehilangan hak pilihnya karena tidak menanda tangani kartu "A1".

Djawaban :

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969, maka untuk menggunakan hak memilih, seorang warga negara Indonesia harus terdaftar dalam Daftar Pemilih, dan untuk ketertiban maka kartu Pemilih (Model A1) harus ditanda tangani atau dibubuhi tjap tiga djari tengah tangan kiri oleh pemilih yang bersangkutan.

Djumlah pemilih 55% dari djumlah penduduk adalah suatu perkiraan yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik bahwa djumlah penduduk yang berumur 17 tahun keatas adalah 55%.

Djadi apabila target 55% tidak tertjapai hal ini karena :

- a). djumlah 55% tersebut adalah hanya perkiraan (estimate) atas data-data sensus penduduk tahun 1961.
- b). tidak didaftarnya anggota ABRI.
- c). tidak didaftarnya Warga Negara Indonesia yang tidak berhak

memilih.

Perlu dijelaskan disini bahwa jumlah pemilih yang sudah masuk daftarnya kiranya saat ini sudah mentjapai lebih kurang 50%.

Saran :

Disarankan agar batas penanda tangan kartu "A1" jika ketentuan demikian itu merupakan suatu kewajiban mutlak bagi para pemilih supaya diberi kebebasan untuk menanda tangani sampai dengan berlangsungnya Pemilihan Umum.

Tanggapan :

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24/LPU/1970 jo No. 53/LPU/1970 ditetapkan bahwa pendaftaran pemilih berakhir pada tanggal 30 Oktober 1970. Dengan demikian sesudah 30 Oktober 1970 tidak dilakukan pendaftaran pemilih lagi dan tidak diadakan kesempatan untuk mendaftarkan diri.

Ketentuan ini tidak mengurangi kemungkinan adanya penyelesaian pendaftaran yang sebenarnya/seharusnya sudah diselesaikan sebelum 30 Oktober 1970, tetapi karena kesulitan teknis/administratif tertunda penyelesaiannya. Berhubung dengan itu apabila seorang sudah terdaftar dalam daftar pemilih (model A), tetapi sampai dengan tanggal 30 Oktober 1970 belum dapat menanda tangani kartu pemilih model A1, maka kepadanya masih diberi kesempatan untuk menanda tangani kartu model A1 tersebut (walaupun sudah melampaui tanggal 30 Oktober 1970).

VI. WARGA NEGARA INDONESIA YANG TIDAK BERHAK MEMILIH.

Pertanyaan 1.

Dalam jawaban Pemerintah telah dikemukakan suatu jumlah daftar Warga Negara Indonesia yang kehilangan hak pilihnya.

Apakah dengan jumlah yang sekian itu sudah merupakan jumlah yang terakhir dan apakah mereka itu hanya terdiri dari orang yang dimasukkan kedalam kategori tersangkut baik setjara langsung atau tidak langsung dengan G-30-S/P.K.I.

Djawaban :

(1). Jumlah Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih sebagaimana kami kemukakan dalam pendjelasan kami tanggal 8 Agustus 1970 kepada Komisi III DPR-GR yang terhormat belum merupakan jumlah yang terakhir. Sesudah waktu tersebut masih kami terima daftar susulan dari daerah-daerah. Sampai tanggal 4 Nopember 1970 jumlah tersebut adalah 2.014.695 orang.

(2). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1970 yang didaftar dalam daftar Warga Indonesia yang tidak berhak memilih adalah bekas anggota organisasi terlarang P.K.I. termasuk organisasi massanja atau mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/P.K.I. antara lain yang termasuk dalam kategori A, B dan C dimaksud dalam pasal 4 Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 028/10/1968 atau bekas anggota organisasi terlarang lainnja.

Oleh karena sampai sekarang organisasi terlarang hanya P.K.I. dan organisasi massanja, maka dalam prakteknja dalam daftar tersebut tidak terdapat nama-nama bekas organisasi terlarang lainnja.

Pertanyaan :

Terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DPR-GR berkenaan dengan BTI berdjumlah 12.000 orang di Sulawesi Tengah, Pemerintah telah memberikan djawabannja.

Sementara itu Harian "Mertju Suar" tertanggal 17 Oktober 1970 jang terbit di Jogjakarta membuat tadjuk rentjana dan memberikan kebidjaksanaan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jogjakarta jang nadanja telah memastikan bahwa bagi Pamong Desa ex PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia) jang hingga sekarang masih aktif mendjalankan tugas sebagai Pamong tidak kehilangan hak pilihnja.

Apakah kebidjaksanaan sedemikian itu sudah merupakan ketentuan dari Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum?

Djika demikian bagaimana halnja dengan personalia BTI di Sulawesi Tengah dan Koperasi Nelajan di Gorontalo?

Djawaban :

(1). PANGKOPKAMTIB telah mengirimkan instruksi kepada LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA tgl. 10 September 1970 No. TR-148/KOPKAM/9/1970 jang pada pokoknja menjatakan bahwa anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih dan anggota Panitia lainnja jang menjangkut pelaksanaan pemilihan umum harus voorzien dengan keterangan bebas G-30-S/PKI dan LAKSUS KOPKAMTIBDA mengeluarkan keterangan tersebut bagi pedjabat-pedjabat (Pamong Desa) jang mendjadi anggota Panitia tersebut.

Dengan demikian berdasarkan Instruksi PANGKOPKAMTIB tersebut, maka para Pamong Desa jang sampai saat ini masih melaksanakan tugasnja baik sebagai Pamong Desa maupun sebagai Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih tidak kehilangan hak pilihnja.

(2). Sesuai dengan djawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan Komisi III DPR-GR jang tertjantum dalam lampiran surat pimpinan DPR-GR tanggal 26 September 1970 No. 01.02/K/3465/1970 telah diambil kebidjaksanaan, bahwa untuk mengatasi akibat-akibat penipuan PKI pada masa lalu, jang

didaftar dalam daftar Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih hanyalah mereka yang benar-benar terkena pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 1969 jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970. Dari hasil pendaftaran Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih di Sulawesi Tengah ternyata bahwa angka tersebut lebih kecil daripada 12.000 orang, sehingga dengan demikian diambil kesimpulan bahwa mereka yang menjadi anggota BTI karena penipuan tidak kehilangan hak pilihnya.

VII. PENDAFTARAN PEMILIH YANG MERAGUKAN.

Pertanyaan :

Mengenai keragu-raguan ada dua sebab :

- a. keragu-raguan yang timbul karena status kewarga-negaraan.
- b. keragu-raguan mengenai PKI atau tidaknya seseorang.

Umumnya persoalan yang ditimbulkan mengenai PKI atau tidaknya seseorang lebih menonjol. Tjara pendaftaran golongan ini ialah didaftar dalam kartu A1 dan sekali-kali tidak boleh dimasukkan didalam daftar pemilih model A (abdjad).

Menurut kenyataan di daerah tjara penyelesaian demikian akan menjulitkan mengingat :

1. jangka waktu untuk menghilangkan waktu ragu-ragu ada kepastian,
2. pendaftaran pemilih sudah akan berakhir.

Persoalan menjadi sulit jika ternyata mereka mempunyai hak pilih, sedang daftar pemilih sudah disahkan. Karena itu disarankan agar tjara mendaftarnya jaitu pada kartu A1 dan A (abdjad) dengan dibubuhi tanda tanja (atau dengan suatu tanda), kemudian dihapus bila ternyata ia PKI.

Berdasarkan penelitian yang terakhir dapatkah Pemerintah/Lemba-ga Pemilihan Umum menjampaikan jumlah pemilih yang meragukan tersebut, baik berdasarkan kewarganegaraan maupun pe-

milih jang diragukan jang tersangkut setjara langsung atau tidak langsung dengan G-30-S/PKI.

Djawaban :

- (1). Menurut kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 10 Djuli 1970 No. SDP x 23/1/13 antara lain menentukan bahwa sambil menunggu penelitian PANGKOPKAMTIB dan pengesahan Menteri Dalam Negeri atas daftar Warga Negara Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih, dalam rangka pendaftaran pemilih, Warga Negara Indonesia jang masih diragukan akan disahkan atau tidaknja oleh Menteri. Dalam Negeri dapat didaftar dalam formulir model A1 tetapi tidak didaftar dalam formulir model A.

Djadi baik jang diragukan maupun jang tidak diragukan semuanya masih didaftar dalam daftar Warga Negara Indonesia jang tidak berhak memilih.

Pada hakekatnja semua orang jang termasuk dalam daftar tersebut, seharusnya tidak didaftar baik dalam Model A1 maupun model A.

Akan tetapi karena tidak tersedianja daftar jang lengkap dari anggota ex PKI, maka bagi mereka jang masih diragukan untuk disahkan atau tidak oleh Menteri Dalam Negeri ditempuh kebidaksanaan untuk didaftar sesuai kawat tersebut diatas.

Apabila mereka djuga didaftar dalam daftar pemilih (model A) dan kemudian ternyata mereka tidak mempunyai hak pilih, maka nama itu harus ditjoret dari daftar pemilih dan kalau djumlahnja banjak akan sangat mengganggu kerapihan daftar pemilih tersebut.

Djika kemudian ternyata bahwa setelah diteliti ternyata bahwa mereka sebenarnya mempunyai hak untuk dipilih, khusus bagi mereka jang karena sebab tersebut belum

didaftar dalam daftar pemilih (model A), meskipun masa pendaftaran pemilih sudah selesai, kepada mereka masih diberi kesempatan untuk didaftar dalam daftar pemilih, karena pada hakekatnja ia telah terdaftar didalam kartu model A1.

Berhubung dengan itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat menerima saran tersebut.

- (2). Dalam melaksanakan pendaftaran pemilih yang menetapkan seseorang diragukan untuk didaftar sebagai pemilih, karena tersangkut G-30-S/PKI adalah Panitia Pendaftaran Pemilih. Menteri Dalam Negeri hanya mengesahkan daftar Warga Negara Indonesia yang tidak berhak memilih setelah diteliti oleh PANGKOPKAMTIB.

Karena itu Menteri Dalam Negeri tidak dapat memberikan angka-angka tentang jumlah mereka yang diragukan untuk didaftar sebagai pemilih karena tersangkut G-30-S/PKI. Selanjutnja oleh karena permintaan laporan dari Panitia Pendaftaran Pemilih tentang jumlah mereka yang hilang bukti kewarganegaraan Indonesianja dan tidak dapat menundukkan salinannja sampai dengan disahkan daftar pemilih tambahan akan menambah beban Panitia Pendaftaran Pemilih dan bagi Lembaga sendiri kurang ada manfaatnja, maka Lembaga tidak minta laporan tersebut.

Karena itu kami tidak dapat menjadikan angka-angka tersebut.

VIII. KEAMANAN

Pertanyaan :

Oleh karena persoalan keamanan untuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum masih menjadi persoalan di Djawa Timur, mengingat jumlah T.P.S. berkisar antara 45.000 – 48.000,

sedangkan tenaga kepolisian di Djawa Timur lk. 15.000 orang, maka hendaknya Pemerintah dapat memberikan pendjelasan untuk mengatasi problem tersebut dan sekaligus mengenai pembiajaannya.

Djawaban :

Mengenai masalah pengamanan pelaksanaan pemilihan umum dapat dibedakan antara pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung.

Pengamanan langsung dilakukan oleh Kepolisian Negara antara lain pada waktu diadakan pemungutan suara di Tempat Pemberian Suara (T.P.S.).

Pengamanan tidak langsung dilakukan oleh ABRI lainnya diluar T.P.S baik sebelum, pada waktu dan sesudah dilakukan pemungutan suara.

Untuk tugas pengamanan langsung pemilihan umum ini memang diperlukan tambahan tenaga. Pertama-tama tambahan ini akan diambilkan dari tenaga Hansip dan kalau masih kurang dari tenaga Pagar Pradja.

Untuk keperluan tersebut tenaga-tenaga itu akan dilatih.

Anggaran untuk pengamanan Pemilu ini adalah Rp. 3,5 milyar dan dibebankan pada anggaran Departemen Hankam.

B. CHUSUS

Pertanyaan 1 :

Didaerah-daerah ternjata Sekber Golkar diperkenankan memasang papan namanya dikantor resmi Pemerintah.

Djika memang demikian apakah 9 parpol lainnya diperkenankan juga memasang papan namanya ditempat yang sama ?

Djawaban :

Pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk memper-

bolehkan Sekber Golkar memasang papan namanya di kantor resmi Pemerintah.

Kebidjaksanaan sematjam ini mungkin didasarkan atas pertimbangan, karena Sekber Golkar anggotanya adalah karyawan-karyawan sehingga kantornya lalu "ndompleng" di kantor resmi Pemerintah.

nDompleng ini menunjukkan sifat kesementaraan dan bahwa Sekber Golkar belum mampu untuk mempunyai kantor sendiri dan jika Sekber Golkar sudah mampu tentunya akan segera pindah.

Meskipun demikian masalah ini telah menjadi perhatian penuh dari Pemerintah.

Pertanyaan 2 :

Minta ketegasan tentang anggota ABRI yang masih aktif tetapi melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan salah satu organisasi yang ikut pemilihan umum.

Djawaban :

Menurut pasal 11 dan pasal 14 Undang-undang No. 15 tahun 1969 ABRI tidak ikut dalam pemilihan umum. Karena itu anggota ABRI tidak boleh mengadakan kampanye untuk kepentingan salah satu organisasi. Akan tetapi kalau membantu kegiatan sesuatu organisasi untuk kepentingan sosial hal itu tidak dilarang. Dalam rangka membantu organisasi yang akan ikut dalam pemilihan umum, Pemerintah dengan semua aparaturnya akan mengatur penggunaan fasilitas untuk kampanye dan penggunaan alat-alat perhubungan/telekomunikasi.

Pertanyaan 3 :

Pegawai Negeri yang ditjalonkan harus dinonaktifkan. Apakah peraturan ini juga berlaku bagi Menteri dan Pamong Desa.

Djawaban :

1. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian yang dimaksud dengan pegawai negeri ialah mereka yang diangkat, digadji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerdjakan dalam suatu djabatan negeri oleh pedjabat negara atau badan negara yang berwenang. Dalam hukum pidana pengertian pegawai negeri diperluas, sehingga dalam pasal 92 KUHP memasukkan anggota badan perwakilan rakjat pusat dan daerah, anggota badan pemerintahan, hakim dan anggota ABRI kedalam pengertian pegawai negeri. Oleh jurisprudensi Mahkamah Agung pengertian pegawai negeri dikembangkan sehingga pengertian pegawai negeri harus memenuhi tiga unsur jaitu :

- diangkat oleh kekuasaan umum,
- memangku suatu djabatan umum,
- melakukan sebagian dari tugas negara atau alat-alatnja.

Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena Menteri-menterilah yang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (*pouvoir executief*) dalam praktek.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Menteri adalah pegawai negeri yang mempunyai sifat khusus (*eigenaardig karakter*).

Karena sifatnja yang khusus, maka terhadap seorang Menteri tidak dapat diperlakukan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 1969.

2. Seperti halnja Gubernur maupun Bupati Kepala Daerah yang dipilih dalam djabatan tersebut untuk djangka waktu tertentu, djuga Pamong Desa kalau ditjalonkan harus dibe-

baskan sementara dari jabatan tersebut.

Pertanyaan 5 :

Di Djawa Tengah terdapat beberapa orang (terutama sekali dari Partai N.U.) yang dilarang/tidak diperkenankan berbitjara dalam suatu rapat oleh Kodim setempat (jaitu di Demak, Djepara). Larangan tersebut ternyata tidak bersifat tertulis.

Benarkah bahwa larangan tersebut sebagai tindakan kebidjaksanaan penguasa setempat, ataukah suatu instruksi larangan dari Pusat yang diberikan kepada penguasa setempat.

Djika benar instruksi nomor berapakah itu.

Djawaban :

Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum tidak pernah mengeluarkan instruksi demikian.

Dalam rangka pemilihan umum hanya ada pengaturan tentang:

- a. pendjelasan sekitar pelaksanaan pemilihan umum (surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 27 Mei 1970 No. 32/11/1970) yang memberikan pendjelasan kepada para anggotanja mengenai hal-hal yang bersifat pemilihan umum, sebelum tiba saatnja masa kampanye pemilihan;
- b. kampanye pemilihan umum yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970.

Dengan demikian kalau ada Kodim yang melarang seseorang untuk berbitjara, kiranya hal itu diambil atas dasar kebidjaksanaan setempat, dan harus diketahui apa sebabnja sehingga tidak diperkenankan berbitjara, dan dalam hal apa ia/mereka tidak boleh berbitjara.

Namun demikian kami akan mengadakan checking mengenai masalah ini.

Demikian djawaban dan tanggapan kami terhadap per-

tanjaan-pertanjaan dan saran-saran Saudara-saudara jang terhormat.

Terima kasih.

Djakarta, 5 Nopember 1970.

UNTUK PENGESAHAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,

t.t.d.

SQENANDAR PRIJOSOEDARMO

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

t.t.d.

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN JANG DIADJUKAN SETJARA
LISAN OLEH ANGGOTA-ANGGOTA KOMISI III DPR-GR PADA
TANGGAL 5 NOPEMBER 1970**

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM
ATAS
PERTANJAAN—PERTANJAAN JANG DIADJUKAN
SETJARA LISAN OLEH ANGGOTA—ANGGOTA
KOMISI III D.P.R.—G.R. PADA TANGGAL
5 NOPEMBER 1970

1. Saudara Ischak Moro

Pertanyaan :

- (1). Penanda tangan kartu A1 supaja djangan dibatasi sampai tanggal 30 Oktober 1970, tetapi sampai mendjelang voting.
Hal ini dikemukakan karena adanja keterangan dari salah satu Ketua P.P.D. — II di Sulawesi Utara jang menegaskan bahwa pemilih jang sampai tanggal 30 Oktober 1970 belum menanda tangani kartu A1 akan kehilangan hak pilihnja.
- (2). Untuk wilayah-wilayah jang luas dan komunikasinja sulit, keharusan T.P.S. untuk 300 pemilih akan menjulitkan para pemilih dan memungkinkan banjak pemilih tidak menggunakan hak pi-

lihnja.

Ada tempat-tempat jang djumlah pemilihnja kurang dari 200 tetapi letaknja berdjauhan satu sama lainnja supaja diinstruksikan kedaerah bahwa satu TPS tidak mutlak harus 300 pemilih, tapi disesuaikan dengan keadaan daerah.

- (3). Propinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Philipina. Bagaimana tindakan Pemerintah agar pada waktu pemungutan suara rakjat jang ada di Philipina dapat berada di Sulawesi Utara.
- (4). Pada waktu ini di Sulawesi Utara banjak papan nama Sekber Golkar jang dipasang di Kantor-kantor Ketjamatan dan Hukum Tua.
Apakah tidak bidjaksana kalau Pemerintah mengeluarkan larangan jang melarang 10 organisasi jang dapat ikut dalam pemilihan umum untuk memasang papan-papan namanja di Kantor-kantor resmi Pemerintah.
- (5). Berapa djumlah W.N.I. jang tidak berhak memilih di Sulawesi Tengah.

Djawaban :

- (1). Saran ini dapat diterima.

Kepada Panitia-panitia Pemilihan Daerah sudah di-instruksikan (Radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 176/11/1970) bahwa tjalon-tjalon pemilih jang nama-nja telah tertjatat dalam Model A1 dan tidak diragukan tetapi berhubung sesuatu hal belum dapat membubuhkan tanda tangan atau tjap djari pada formulir Model A1 tetap diberi kesempatan untuk menanda tangani atau membubuhkan tjap djari walaupun sudah melampaui tanggal 30 Oktober 1970.

Kesempatan tersebut diberikan karena sifatnja hanja penjelesaian administrasi pendaftaran, bukan merupakan perpandjangan pen-

daftar.

- (2). Pada hakekatnya tiap T.P.S. harus mampu menyelesaikan jumlah pemilih dari jam 08.00 sampai 14.00 sebesar 200 – 300 orang. Namun demikian apabila ada daerah-daerah yang kondisi geografis dan komunikasinya sebagaimana dikemukakan oleh Saudara yang terhormat, maka dapat dibenarkan satu T.P.S. melayani jumlah pemilih yang kurang dari jumlah index tersebut.

Sudah tentu hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu setelah mendalam dan sesuai urgensinya, karena menjangkut soal-soal penambahan biaya, peralatan dan personil.

- (3). Warga Negara Indonesia yang legal berada di Philipina, khususnya diwilayah yang berbatasan dengan Sulawesi Utara didaftar sebagai calon pemilih. Yang ilegal, jika dijumpai, diandjurkan mendaftarkan diri sebagai pemilih ditempat asalnya di daerah Indonesia untuk nanti dapat ikut serta dalam pemungutan suara tanggal 5 Juli 1971 di daerah asalnya itu.

Tentunya hal ini membutuhkan waktu untuk memberikan penerangan-penerangan dan penjelasan-penjelasan agar mereka itu menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

- (4). Sudah jelas bahwa bagi organisasi-organisasi yang sudah memiliki kantor sendiri akan memasang papan-papan nama organisasinya di depan kantor masing-masing mulai ditingkat Pusat sampai di Daerah-daerah.

Demikian pula mengenai pemasangan papan-papan nama dan tanda gambar sesuai dengan Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.

Bagi Sekber Golkar yang di daerah-daerah banyak yang belum mempunyai Kantor sendiri, masih "mendompleng" di kantor-kantor Pemerintahan Daerah. Apa yang bersifat "mendompleng" tentulah sifatnya untuk sementara, sehingga apabila Sekber Golkar yang bersangkutan kelak sudah memiliki kantor sendiri akan pindah

dari Kantor Pemerintah Daerah tersebut.

Namun demikian hal ini mendapatkan perhatian kami untuk mendapatkan pemetjahannya lebih lanjut.

- (5). Djumlah W.N.I. jang tidak berhak memilih di Sulawesi Tengah adalah 10.560 orang.

2 **Saudara Usman**

Pertanyaan :

- (1). Disalah satu Ketjamatan di Banten oleh Koramil telah diadakan pentjataan nama-nama penduduk dan partai jang dianutnja. Koramil mengantjam penduduk kalau setelah Pemilihan Umum ternyata suara untuk partai bertambah akan diadakan penangkapan-penangkapan.
Jang tidak berpartai dianggap anggota Golongan Karya.
- (2). Dilain Ketjamatan di Banten Koramil mengatakan siapa jang mau selamat harus masuk Golongan Karya karena golongan karya dilindungi oleh ABRI.
Siapa jang tidak mau selamat supaja masuk parpol.
- (3). **Bekas Propinsi Irian Barat Lama.**
Sampai sekarang bekas Propinsi Irian Barat lama diperlakukan sebagai Kabupaten Administratif.
Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dimasukkan dalam P.P.D. II Maluku Utara.
Mewakili siapakah anggota D.P.R. jang terpilih untuk Dati II Maluku Utara.

Djawaban :

- (1) dan (2). Mengenai hal-hal jang dikemukakan dalam titik (1) dan (2) akan kami sampaikan kepada instansi jang berwenang jang ber-

sangkutan.

Terima kasih atas informasi Saudara jang terhormat.

- (3). Mengenai bekas Propinsi Irian Barat lama, karena daerah tersebut masuk dalam wilayah Daerah Tingkat II Maluku Utara, maka anggota/anggota-anggota D.P.R. jang terpilih untuk daerah itu mewakili Daerah Tingkat II Maluku Utara.

3. Saudara Purba

Pertanyaan :

Pemerintah telah berdjandji akan menjampaiakan hasil rapat kerdja dengan Komisi III D.P.R.-G.R. ke daerah-daerah. Ternjata ada daerah-daerah jang belum menerimanja.

Djawaban :

Hasil-hasil rapat kerdja antara Pemerintah dengan Komisi III D.P.R.-G.R. disampaikan kepada P.P.D.-I – P.P.D. -I.

Tentunja P.P.D.-I – P.P.D.-I ini membutuhkan waktu untuk memperbanjaknja guna disampaikan kepada P.P.D.-II.

Mungkin karena inilah, ada Daerah-daerah Tingkat II jang belum menerimanja hingga saat ini.

Terima kasih atas informasi ini dan akan kami perhatikan.

4. Saudara H. Muchtar Chudory

Pertanyaan :

- (1). Pegawai Negeri jang ditjalonkan oleh sesuatu organisasi perlu persetudjuan instansi jang bersangkutan.

Kalau seorang pegawai Negeri sudah mendjadi anggota D.P.R.-G.R, kalau ia nanti ditjalonkan, siapa jang harus memberikan persetudjuan.

- (2). Mohon perhatian untuk ditjegah tindakan seorang Koramil bernama Pelda Soedjono di desa Gebang , Ketjamatan
 Pada suatu hari ia memanggil rapat Hansip.
 Panggilannja djam 13.00, tetapi ia baru datang djam 15.30 dan rapat selesai djam 23.00.
 Selama waktu itu seorangpun tidak diperbolehkan meninggalkan tempat meskipun untuk bersembahjang.
 Dengan demikian jang hadir dalam rapat tidak dapat menunaikan sembahjang azar dan magrib.
- (3) Mohon perhatian terhadap pemitjaraan-pemitjaraan Drs. Roespono jang dalam briefing dengan Kokarminagri telah menggunakan istilah-istilah jang tadjam jang sangat menjinggung perasaan parpol-parpol jang ada.

Djawaban :

- (1). Karena pentjalonan ini adalah untuk keanggotaan D.P.R./D.P.R.D. jang akan datang (hasil Pemilihan Umum 1971), maka bagi seorang pegawai negeri jang sekarang mendjadi anggota D.P.R./D.P.R.D. berlaku ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 67 tahun 1970 tentang Tata-tjara pembebasan untuk sementara dari djabatan organik bagi pegawai negeri sipil selama pentjalonan untuk keanggotaan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.
- (2). Mengenai apa jang dikemukakan oleh Saudara jang terhormat akan kami sampaikan kepada instansi/pedjabat jang berwenang jang bersangkutan.
 Terima kasih atas informasi-nja.
- (3). Mengenai Saudara Roespono ini persoalannja akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri atau dalam hal ini kepada Dirdjen Khusus jang mendjadi atasan langsung saudara terse-

but.

5. Saudara Drs. Rufinus Lahur.

Pertanyaan :

- (1). Bagaimana kebidjaksanaan Lembaga Pemilihan Umum terhadap pemilih jang sudah menanda tangani kartu A1 tetapi belum dimasukkan dalam daftar pemilih.
- (2). Para pemilih jang diragukan hak pilihnja, diragukan sampai kapan. Berapa djumlahnja;
- (3). Dalam Peraturan Pemerintah No. 2/1970 telah ditentukan djumlah anggota jang dipilih untuk D.P.R. untuk masing-masing Dati I. Sampai dimana pengaruh hasil sensus terhadap kursi tersebut.
- (4). Hasil rapat kerdja Komisi III D.P.R.—G.R. belum merata terkirim kedaerah-daerah.

Djawaban :

- (1). Apabila ada seorang (pemilih) jang sudah menanda tangani kartu A1, tetapi belum didaftar dalam daftar Pemilih Model A, maka jang bersangkutan dapat mengajukan hal ini kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan, agar namanja didaftar dalam Model A (Daftar Pemilih).
- (2). Mengenai djumlah para pemilih jang diragukan hak pilihnja kami persilahkan membatja djawaban kami tanggal 5 Nopember 1970 No. VII.2.
- (3). Sesuai pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 jang berbunyi : "Perhitungan djumlah Utusan Daerah dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini, didasarkan atas sensus terachir dan akan

bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum”.

Djelas bahwa hasil pendaftaran penduduk yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Djuli 1970 menentukan jumlah anggota yang dipilih untuk D.P.R. untuk masing-masing Daerah Tingkat I.

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang jumlah anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D I dan D.P.R.D. II yang dipilih sudah dikeluarkan.

(Keputusan No. 85/LPU/Tahun 1970 tanggal 7-11-1970).

- (4). Mengenai pertanyaan ini kami persilahkan membatja djawaban kami atas pertanyaan Saudara Purba diatas.

6. Saudara Win Tulung.

Pertanyaan :

- (1). Mendukung pertanyaan Pak Moro mengenai mereka yang bertempat tinggal didaerah yang berbatasan dengan Philipina.
- (2). Kapal 200 ton yang disadjikan Lembaga Pemilihan Umum, apakah dalam rangka hadiah Presiden yang dibeli dengan dana PKS apakah dari Pemilihan Umum.

Djawaban :

- (1). Mengenai persoalan ini conform djawaban kami atas pertanyaan Saudara Ischak Moro.
- (2). Mengenai kapal 200 ton (kapal tongkang bermotor) untuk propinsi Sulawesi Utara adalah dalam rangka hadiah Bapak Presiden, bukan dari Lembaga Pemilihan Umum.

7. Saudara Chalid Mawardi.

Pertanyaan :

- (1). Mengulangi jawaban Pemerintah tanggal 26 September 1970, menurut pendapatnya mungkin ada perumusan yang agak kurang tepat mengenai persyaratan domisili anggota D.P.R.D. II yang tinggal dalam Kotanegara.
- (2). Beberapa pemilihan yang terdaftar diluar negeri.
- (3). Apakah benar kalau seorang pemilihan pindah ke lain Kabupaten, ia hanya boleh memilih untuk D.P.R.D. I dan D.P.R. saja.
- (4). Apakah stembus-accoord ditingkat nasional harus sama dengan stembus accoord di daerah-daerah.
- (5). Pernah terjadi banjak anggota Hansip di suatu daerah mengembalikan pakaian dinas, karena ia memilih untuk tetap ikut parpol.
- (6). Apakah seorang calon diperbolehkan mengundurkan diri sebelum dilantik.
- (7). Dalam Keputusan Presiden No. 67/1970 tidak mengatur Menteri kalau ditjalankan hubungannya dengan bekas Menteri Djodi Gondokusumo.
- (8). Hakim dan Djaksa tidak boleh berpartai.
Kalau ditjalankan apakah ia harus berhenti atau dibebaskan saja.
- (9). Appeal kepada Pemerintah agar peraturan-peraturan yang umum berlaku jangan hanya diterapkan pada satu golongan saja.

Jawaban :

- (1). Kami berpegang pada jawaban Pemerintah tanggal 26 September 1970, ialah bahwa hal penjalanan tidak terikat kepada domisili

jang ditjalonkan.

Tetapi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970, maka seorang tjalon jang terpilih mendjadi anggota DPR/DPRD, harus bertempat tinggal/berdomisili dalam wilajah geografis Nasional/ Daerah Tingkat I/II jang bersangkutan.

- (2). Djumlah penduduk diluar negeri terdaftar 35.000 djiwa, sedangkan pemilihnja 17.510 orang.
Djumlah-djumlah ini dimasukkan dalam Daerah Pemilihan DCI-Djakarta Raya.
- (3). Mengenai pertanyaan ini kami persilahkan membatja hasil rapat kerdja PPD Tingkat I seluruh Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1970 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1970, halaman 5 huruf f.
- (4). Stembus-accoord atau penggabungan suara oleh organisasi-organisasi jang ikut pemilihan umum untuk tjalon anggota DPR, DPRD-I dan DPRD-II (dinjatakan dalam formulir Model B) tidak selalu paralel disemua tingkat.
Untuk DPRD-I dan DPRD-II masing-masing organisasi leluasa untuk mengadakan penggabungan suara.
Hal ini sudah kami berikan petundjuk-petundjuk kepada Panitia-panitia Pemilihan di daerah.
- (5). Persoalan HANSIP termasuk bidang Departemen HANKAM. Terima kasih atas informasi Saudara jang terhormat dan persoalan-nja akan kami teruskan kepada MENHANKAM cq KAPUS HANSIP.
- (6). Seorang tjalon jang terpilih, tetapi mengundurkan diri sebehum dilantik boleh sadja.
Dalam hal ini maka tempatnja diisi oleh tjalon berikutnja dari

daftar tjalon jang bersangkutan (pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970).

- (7). Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1961 tentang Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian jang dimaksud dengan pegawai negeri adalah :

Pasal 1. Pegawai Negeri ialah mereka jang diangkat, digadji menurut Peraturan Pemerintah jang berlaku dan dipekerdjakan dalam suatu djabatan negeri oleh pedjabat negara atau badan negara jang berwenang.

Selandjutnja pengertian pegawai negeri dalam hukum pidana diperluas dalam pasal 92 KUHP jang memasukkan anggota badan-badan perwakilan rakjat pusat dan daerah, anggota badan pemerintahan, hakim dan anggota ABRI kedalam pengertian pegawai pegawai negeri.

Pengertian pegawai negeri oleh jurisprudensi dikembangkan dengan ketentuan bahwa pengertian pegawai negeri harus memenuhi tiga unsur jaitu :

1. diangkat oleh kekuasaan umum.
2. memangku suatu djabatan umum.
3. melakukan sebagian dari tugas negara atau alat-alatnja.

Sesuai dengan jang diadjukan oleh Saudara Chalid Mawardi menurut jurisprudensi M.A. Menteri adalah pegawai (dalam pengertian hukum pidana), tetapi pegawai negeri jang mempunyai sifat khusus ("eigenaardig karakter").

Sehingga sebagian besar dari Undang-undang ketentuan pokok kepegawaian tidak berlaku bagi mereka.

Dalam Undang-undang Dasar disebutkan bahwa :

Meskipun kedudukannya Menteri Negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek.

- (8). Karena Hakim dan Djaksa adalah pegawai negeri, maka bagi mereka berlaku ketentuan-ketentuan dalam KEPPRES No. 67 tahun 1970, sebagaimana kami uraikan dalam jawaban kami atas pertanyaan Saudara H. Muchtar Chudory diatas.
- (9). Terima kasih atas appeal yang baik ini dan kami perhatikan.

Demikian jawaban kami terhadap pertanyaan-pertanyaan lisan Saudara-saudara yang terhormat.

Terima kasih,

Djakarta, 5 Nopember 1970

Untuk pengesahan	MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM	LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,	

t.t.d.

t.t.d.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN JANG DIADJUKAN
OLEH KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA
TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 14 DJANUARI 1971 NOMOR : C1.09/K/106**

DJAWABAN

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN JANG DI-
ADJUKAN OLEH KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA TER-
TJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 14 DJANUARI 1971 NOMOR C1.09/K/106**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat djawaban atas perta-
njaan-pertanjaan/saran jang diadjukan oleh para anggota Komisi III DPR-GR
sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal
14 Djanuari 1971 Nomor C1.09/K/106.

Kami mengharap kiranja djawaban-djawaban tersebut akan lebih
memberikan kedjelasan lagi terhadap masalah-masalah dibidang pemilihan
umum.

1. Pertanjaan :

Apakah Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum sependapat dengan
kami, bahwa perhitungan suara jang dilaksanakan di T.P.S. sesaat se-
telah selesainja pemungutan suara pada tanggal 5 Djuli 1971 adalah
merupakan Instansi perhitungan suara jang pertama dan terachir?

Djawaban :

Pada prinsipnja penghitungan suara jang dilakukan di T.P.S.-2 sesaat setelah selesai pemungutan suara pada tanggal 5 Djuli 1971 merupakan Instansi penghitungan suara jang pertama dan terakhir, sedangkan penghitungan suara baik oleh P.P.S. maupun Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II hanya merupakan pembuatan rekapitulasi dari tjatatan-tjatatan dan berita atjara hasil dari penghitungan suara di T.P.S.-2 dalam satu Daerah (wilayah kerdja) Pemungutan Suara.

Namun demikian, sesuai dengan pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, maka oleh P.P.S. diadakan penelitian atau ulangan penghitungan suara, apabila P.P.S. dalam membuat rekapitulasi berdasarkan keterangan-keterangan jang dimaksud dalam pasal 85 kalimat kedua huruf h sampai dengan huruf i Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 mendjumpai kenyataan selisih antara tjatatan jang satu dengan tjatatan jang lain.

Sungguhpun hal-hal sedemikian itu dapat terdjadi, namun ketentuan-ketentuan dalam pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 harus tetap dipegang teguh.

Ketentuan ini menjatakan bahwa bungkusan-bungkusan surat suara jang diterima oleh P.P.S. dari K.P.P.S. dan kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, tidak dibuka dalam rapat penghitungan suara jang diadakan oleh P.P.S. maupun oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II apabila tidak diperlukan untuk penelitian pada penghitungan suara jang diadakan itu.

2. **Pertanyaan :**

Apakah Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum sependapat dengan kami bahwa perhitungan suara jang akan dilakukan di Panitia Pemungutan Suara (Ketjamatan) pada tanggal 13 Agustus 1971 itu merupakan pendjumlahan (rekapitulasi) sadja dari laporan angka-angka perhitungan suara dari tiap-tiap Panitia Pendaftaran Pemilih atau Tempat Pemungutan Suara dan dengan demikian tidak akan terdjadi perbedaan perhitungan suara pada tiap-tiap kotak suara antara Panitia Pem-

ngutan Suara dengan Panitia Pendaftaran Pemilih atau Tempat Pemungutan Suara ?

Djawaban :

Dalam jawaban kami atas pertanjaan nomor 1 tersebut diatas sudah kami jelaskan bahwa penghitungan suara oleh P.P.S. berupa pembuatan rekapitulasi dari hasil penghitungan suara di T.P.S.-2 dalam satu Daerah Pemungutan Suara dengan mempergunakan bahan-bahan Berita Atjara Pemungutan Suara dan Tjatatatan Penghitungan Suara di T.P.S.-2. Dalam rapat penghitungan di P.P.S. ini sekurang-kurangnya dua orang anggota P.P.S. membuat tjatatatan dari pembuatan rekapitulasi ini, misalnya dua anggota mentjatat dalam formulir Tjatatatan Penghitungan Suara dan satu anggota mentjatat pada papan/daftar penghitungan suara.

Kegiatan-kegiatan disaksikan pula oleh wakil-wakil dari Organisasi jang turut serta dalam pemilihan umum dan para hadlirin dibenarkan untuk menjatakan keberatan atas hal-hal jang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan dalam rapat penghitungan suara tersebut dan Ketua P.P.S. seketika itu djuga memberi keputusan atas keberatan jang diajukan.

3. **Saran :**

Menjarankan agar kepada tiap-tiap T.P.S. disediakan anggaran untuk menjewa papan tulis dan membeli kapur jang diperlukan bagi suatu perhitungan suara jang terbuka.

Demikian pula hendaknya disediakan anggaran untuk eventuil menjewa lampu-lampu petromax manakala perhitungan suara jang dilakukan di T.P.S. terpaksa harus berlangsung sampai petang/malam.

Tanggapan :

Didalam program anggaran jang telah ditentukan untuk tiap T.P.S. disediakan biaja Rp. 3.000,- untuk pembuatan bilik pemberian suara (bilik pentjoblos) dan Rp. 250,- untuk biaja pengadaan alat-alat jang

diperlukan dalam bilik tersebut (antara lain alat pentjoblos dan ban-
talannya).

Untuk keperluan papan tulis dan kapur diandjurkan memindjam dari
sekolah-sekolah yang ada disekitar T.P.S. yang bersangkutan.

Mengenai saran untuk disediakan anggaran untuk menjewa lampu-lam-
pu petromax, hingga saat ini persoalan pengadaan ataupun alat-alat
penerang seperti petromax tetap merupakan bahan perhatian Lem-
baga Pemilihan Umum.

Perlu kiranya diperhitungkan, bahwa T.P.S. diseluruh Indonesia ber-
jumlah lebih kurang 228.000 buah.

4. **Pertanyaan :**

(a) Apabila surat-surat suara terlambat diterima oleh Panitia Pendaf-
taran Pemilih atau Tempat Pemungutan Suara dan berakibat
beberapa Tempat Pemungutan Suara tidak dapat melangsungkan
pemungutan suara pada tanggal 5 Djuli 1971, siapakah yang harus
bertanggung jawab dan apakah sanksi hukumnya ?

(b) Apabila karena kelambatan tersebut, Ketua Panitia Pemilihan
Daerah Tingkat II menetapkan waktu lain untuk pemungutan
suara seperti keterangan Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum
didepan Rapat Kerdja Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris-sekretaris
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I se-Indonesia tanggal 26 sam-
pai dengan 28 Oktober 1970, apakah pemungutan suara itu sah
berhubung dengan waktu pemungutan suara yang sudah tegas-
tegas ditetapkan dalam Tap XLII/MPRS/1968 ?

Djawaban :

(a) Pasal 27 ayat (10) Undang-undang No. 15 tahun 1969 mentjan-
tumkan ketentuan pidana bagi seorang penjelenggara pemu-
ngutan suara yang lalai melakukan kewajibannya.
Apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengadja dan bermaksud
untuk mengatjaukan, menghalangi atau mengganggu djalan-

nja pemilihan jang diselenggarakan menurut undang-undang ini, maka sanksinja terdapat dalam pasal 27 ayat (1).

- (b) Pasal 31 Undang-undang No. 15 tahun 1969 menjatakan "Apabila disuatu tempat didalam Daerah Pemilihan pada waktu jang telah ditetapkan, tidak dapat diselenggarakan pemilihan umum atau penjelenggaraan berhenti disebabkan keadaan memaksa, maka sesudah keadaan memungkinkan segera diadakan pemilihan susulan atau pemilihan ulangan ditempat jang bersangkutan dengan mengingat batas waktu dimaksud pasal 7 aiat (2).

Berhubung dengan ketentuan Tap MPRS No. Tap XLII/MPRS/1968 jang menentukan bahwa pemungutan suara selambat-lambatnja tanggal 5 Djuli 1971, maka dapat diajukan bahwa pemungutan suara serentak dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah tetap pada tanggal 5 Djuli 1971.

Adapun sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dalam keadaan memaksa dapat diadakan pemilihan susulan/ulangan dalam djangka waktu 3 bulan.

Dengan mengingat bahwa pemungutan suara itu merupakan susulan, maka dengan sendirinja dilakukan setelah pemungutan suara jang serentak.

Apakah jang dimaksud Tap MPRS No. XLII/MPRS/1968 "selambat-lambatnja 5 Djuli 1971 baik meliputi pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak begitu djelas" dari jang tertjantum dalam Tap MPRS.

Djadi jang dikemukakan disini adalah tafsiran bahwa 5 Djuli 1971 hanja meliputi pasal 7 ayat (1).

5. **Pertanyaan :**

Sampai dimanakah kebenaran berita-berita dalam surat-surat kabar ibukota antara lain surat kabar "Duta Masyarakat" edisi 27 Nopember 1970, bahwa sedjumlah besar Kartu Pendaftaran Pemilih (Kartu A-I) Kotamadya Surabaya telah rusak ?

Dan langkah-langkah apakah yang telah atau akan diambil oleh Lembaga Pemilihan Umum atau Panitia Pemilihan Daerah setempat untuk mentjegah akibat-akibat yang tidak diinginkan daripada kerusakan-kerusakan tersebut ?

Djawaban :

Mengenai berita dalam surat-surat kabar sebagaimana dikemukakan oleh Saudara penanja yang terhormat, setelah di-check oleh pedjabat-pedjabat yang bersangkutan didaerah ternyata bahwa pemberitaan peristiwa-wanja terlampau dibesar-besarkan.

Tidak benar ribuan kartu pemilih rusak, yang djelas hanya 7 (tudjuh) lembar kartu pemilih (Model A1) yang rusak dan beberapa puluh lembar yang hanya rusak sedikit tepinja sadja.

Kerusakan tersebut disebabkan masuknja rajap kedalam sebuah kotak melalui tjelah-tjelah dibagian bawah, sehingga tidak benar kalau kotak-nja yang dimakan rajap.

Hal ini dapat terdjadi disebabkan penempatan kotak kartu pemilih tersebut dilantai dan kondisi kotak dengan bahan kaju meranti yang pada saat tertentu karena perubahan iklim dapat mengalami perubahan, antara lain menjusut.

Oleh ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya telah diambil langkah-langkah perbaikan tehnik kotak kartu pemilih diseluruh wilayah-kerdjanya, dan pihak yang disertai pekerdjaan pembuatan kotak tersebut dengan penuh kesadaran tetap bertanggung djawab untuk memelihara kotak-kotak yang dibuatnja sampai selesainja Pemilihan Umum 1971.

Dari pihak Lembaga Pemilihan Umum sendiri telah diinstruksikan kepada semua Panitia Pemilihan Daerah untuk mengambil langkah-langkah pengamanan yang lebih ketat lagi atas segala peralatan untuk penjelenggaraan pemilihan umum.

Untuk lengkapnja bersama ini dilampirkan salinan/rekaman surat dari Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Djawa Timur No. 6060/2/70 tanggal 19 Desember 1970 mengenai peristiwa tersebut

6. **Pertanyaan :**

Pedjabat-pedjabat Pemerintah yang harus menanda tangani formulir E3 adalah salah satu dari tiga pedjabat, yaitu Kepala Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kepolisian Resort.

Adanya tiga matjam alternatif ini, maka permohonan tanda tangan akan minta tanda tangan kepada pedjabat yang lain, apabila pedjabat yang satu menolak.

Hal ini akan menimbulkan "crossing of authority".

Apakah pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum membuat alternatif penanda tangan E3 tersebut?

Dan apakah sudah ada petunjuk-petunjuk yang jelas kepada instansi instansi yang bersangkutan ?

Djawaban :

Pedjabat Pemerintah yang berhak menanda tangani formulir E3 adalah salah satu dari 3 (tiga) pedjabat, yaitu Kepala Pengadilan atau Kepala Kejaksaan atau Kepala Kepolisian Ressort.

Dasar pertimbangan menunjuk ketiga pedjabat ini adalah dengan maksud untuk mempermudah tjalon, karena tjalon dapat memilih instansi mana yang dapat tjepat dihubungi dan dimintakan surat keterangan.

Pengadilan adalah instansi yang memberi putusan seorang ditjabut tidaknja hak pilihnja dan memberikan putusan pengadilan.

Instansi Kejaksaan adalah instansi yang melaksanakan putusan pengadilan.

Sebagai tambahan dapat diadjukan bahwa ada Daerah Tingkat II yang belum ada Pengadilan.

Petunjuk untuk memberikan bantuan dalam membagikan surat keterangan tersebut telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman dengan surat tertanggal 21 Desember 1970 No. JZS 8/20/17, oleh Djaksa Agung dengan surat tanggal 16 Desember 1970 No. TAR 030/12/1970 dan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan instruksi radio-gram No. Pol 06/RDG/DPKN/71 tanggal 4 Djanuari 1971.

7. Pertanyaan :

Susunan Panitia Peneliti sebagaimana tertantum dalam Radiogram Menteri Dalam Negeri No. 94/11/1970 terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Kodam, Kepolisian, Kedjaksaan, Kehakiman dan Panitia Pemilihan.

Sementara itu Mahkamah Agung melarang hakim-hakim untuk duduk dalam Panitia-panitia Pemilihan (vide Instruksi Mahkamah Agung No. MA/Pemb/738/70).

Bagaimanakah sinkronisasi daripada kedua matjam instruksi yang agaknya kurang sejalan itu ?

Djawaban :

Dalam radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 94/11/1970 djelas djatakan bahwa keanggotaan Panitia Peneliti Daerah terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Kedjaksaan, Kehakiman, Polri dan Kodam/Kodim.

Pengertian unsur-unsur, dalam hal ini yang dimaksud oleh Saudara yang terhormat unsur Kehakiman, tidak selalu berarti hanya hakimnja saja, melainkan dapat djuga misalnja seorang Panitera atau seorang pegawai administrasi lainnja dalam lingkungan kehakiman.

Djelas disini bahwa Instruksi Mahkamah Agung No. M.A./Pemb/738/70 tidak menutup kemungkinan/kesempatan ikut sertanja unsur Kehakiman dalam Panitia Peneliti, yang dilarang hanjalah para hakim.

8. Pertanyaan ;

Dalam djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum babak ke-II R.U.U. Pokok HANKAMNAS tanggal 14 Nopember 1970 yang diutjapkan oleh Menteri Negara/Wapangab Djenderal Panggabean, mendjawab appeal Fraksi-fraksi agar anggota-anggota ABRI tidak berafiliasi pada Golkar non ABRI ataupun pada Papol, Pemerintah menjatakan bahwa appeal ini simpatik dan Pemerintah dengan gembira memberikan sambutanja.

Atas dasar djawaban Pemerintah tersebut, maka sehubungan dengan

tugas kewajiban Lembaga Pemilihan Umum untuk mengamankan pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, c.q. pasal 11 dan 14 Undang-undang No. 15 tahun 1969, maka apakah tidak sejojanja Lembaga Pemilihan Umum mendesak/menjarankan kepada Menteri Pertahanan/Keamanan agar segera dikeluarkan pelarangan bagi anggota-anggota ABRI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan salah satu golongan baik Golkar maupun Papol yang ikut serta dalam Pemilihan Umum ?

Djawaban :

Kami menatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara yang terhormat atas attensi yang simpatik dan wadjar itu.

Pada saat ini sedang diadakan approach/konsultasi antara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan Menteri Negara/Wapangab untuk pengaturan masalah yang dikemukakan Saudara yang terhormat itu.

Mungkin dalam waktu yang singkat ini akan dikeluarkan sematjam instruksi bersama antara kedua pedjabat/instansi tersebut.

9. **Pertanyaan :**

Minta pendjelasan kepada Lembaga Pemilihan Umum mengenai proses pentjalonan keanggotaan untuk anggota DPR, DPRD Tingkat I, Tingkat II sehubungan dengan persjaratan-persjaratan bagi tjalon-tjalon yang bersangkutan :

(a). Apakah sudah ada Instruksi sebagai pedoman dari Lembaga Pemilihan Umum bagi pedjabat-pedjabat yang harus menanda-tangani sesuatu formulir untuk kepentingan seorang tjalon ?

(b). Di Djakarta dibentuk suatu team kesehatan Pemerintah diantaranya terdapat dokter djiwa untuk memberikan pendjelasan tentang kesehatan tjalon-tjalon.

Bagaimana halnya dengan Daerah-daerah yang tidak tjukup terdapat dokter Pemerintah ?

Apakah tidak ada ketentuan lain dan apakah ini merupakan Instruksi dari Menteri Kesehatan ?.

- (c). Bahwa batas waktu pentjalonan sampai dengan tanggal 13 Januari 1971 pada hal pengurusan formulir yang diperlukan bagi tjalon-tjalon dari formulir E1 sampai E5 ternyata di Djawa baru diterima pada tanggal 11 Desember dan diluar Djawa paling tjepat pertengahan Desember 1970.

Apakah keterlambatan pengiriman formulir tidak akan berpengaruh terhadap time schedule batas waktu pentjalonan ?

- (d) Apabila predikat nama tjalon yang terdapat dalam daftar pemilihan itu tidak sama/tidak tjotjok dengan predikat nama semula, apakah hal ini akan dapat menjadi alasan gugurnya atau batalnya seorang tjalon.

- (e). Penilaian terhadap tjalon yang ditugaskan Laksus di Daerah-daerah seperti Riau, Djambi, Sumatera Barat ternyata Laksusnja djadi satu, begitu djuga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dengan diberi batas waktu penyelesaian tugas dalam waktu 14 hari. Apakah tjalon-tjalon yang berada disuatu Daerah ini djauh dari tempat Laksus, untuk memudahkan pekerdjaan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I apakah tidak sebaiknya unsur Laksus didelegir kepada Korem/Kodim setempat.

Djawaban :

- (a). Instruksi sebagai pedoman bagi Pedjabat-pedjabat yang harus menanda tangani sesuatu formulir untuk kepentingan seorang tjalon telah ditjantumkan dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 56/LPU/Tahun 1970 tentang Tata-tjara pengadjuan tjalon-tjalon bagi anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II serta kegiatan-kegiatan landjutannja.

(b). Dalam hal pemberian surat keterangan kesehatan jiwa yang menerangkan bahwa tjalon njata-njata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya yang dibuat oleh Dokter Umum Pemerintah/Rumah Sakit Pemerintah, oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan radiogram Nomor 28/11/1971 tanggal 15 Djanuari 1971 telah diinstruksikan kepada seluruh Inspektur Kesehatan/Pimpinan Rumah Sakit Umum Pemerintah, yang isinya sebagai berikut:

(1). Berhubung dengan jadwal waktu penjemputan surat pentjalonan untuk tjalon anggota DPR, DPRD Tingkat I dan anggota DPRD Tingkat II terutama dalam penyelesaian formulir-formulir yang menjadi lampiran surat pentjalonan tersebut harus sudah disampaikan kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan pada tanggal 13 Februari 1971, maka untuk mempertajepat pemberian surat keterangan kesehatan jiwa kepada para tjalon, oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum diambil kebidjaksanaan bahwa kepada para tjalon anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang diajukan baik oleh Partai Politik maupun Golongan Karya tjukup diberikan surat keterangan kesehatan yang dibuat oleh Dokter Umum Pemerintah.

(2). Apabila tjalon-tjalon tersebut telah terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II, diharuskan melengkapi dengan surat keterangan dari Dokter Jiwa (Psychiater).

(c). Dari laporan-laporan yang diterima ternyata terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mengakibatkan terlambatnya penjemputan surat pentjalonan beserta lampiran-lampirannya sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 13 Djanuari 1971.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, telah dikirimkan surat

tanggal 26 Desember 1970 No. 282/11/1970 kepada semua Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Namun demikian karena adanya hambatan-hambatan yang diluar kompetensi Lembaga Pemilihan Umum untuk mengatasinya, diperkirakan bahwa jadwal waktu penjemputan surat pendaftaran sulit untuk dapat dipenuhi, terutama dalam penyelesaian formulir-formulir yang menjadi lampiran surat pendaftaran tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan tersebut harus diadakan penyesuaian dalam jadwal waktu tentang teknis operasionalnya.

Dalam meninjau kembali jadwal waktu tersebut yang menjadi pertimbangan adalah bahwa meskipun penyesuaian waktu tersebut akan membawa akibat-akibat pengunduran bagian kegiatan-kegiatan pendaftaran lainnya, akan tetapi hal itu tidak akan mengubah jadwal waktu tentang kampanye pemilihan umum, sehingga pada waktu kampanye dimulai, pendaftaran sudah diumumkan.

Berhubung dengan itu telah ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut :

- (1) pengajuan nama pendaftaran beserta lampiran formulir model B dan B1 (walaupun masih ada yang akan ditanda tangani oleh pendaftaran yang bersangkutan) tetap disampaikan kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Januari 1971.
- (2) apabila pada tanggal tersebut ada organisasi yang belum dapat melengkapi formulir-formulir yang merupakan kelengkapan dari surat pendaftaran tersebut, yaitu formulir-formulir B2, Model C, Model D, E1 sampai dengan E5, surat keterangan tidak terlibat G-30-S/PKI dan surat keterangan dokter, kelengkapan itu dapat disusulkan kepada

Panitia Pemilihan yang bersangkutan selambat-lambatnja pada tanggal 13 Pebruari 1971.

Untuk mempertjepat proses penyelesaian formulir-formulir yang merupakan kelengkapan surat pentjalonan, chususnja yang mengenai tjalon untuk DPR diharapkan agar formulir B1 selain dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia djuga dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- (3). Berhubung dengan adanya beberapa Organisasi di beberapa daerah yang belum dapat membentuk Pengurusnja di daerah-daerah sampai dengan tanggal 13 Djanuari 1971, maka:
 - (a). untuk pentjalonan anggota DPR pengadjuan surat pentjalonan beserta lampiran-lampirannja tetap berlaku ketentuan yang tertjantum dalam sub (1) dan (2) diatas.
 - (b). untuk pentjalonan anggota DPRD Tingkat I dan anggota DPRD Tingkat II, kepada Organisasi diberi kesempatan untuk mengajukan daftar nama tjalon (Model B) beserta lampiran-lampirannja Model-model B1, C dan D serta Model-model E1 sampai dengan E5, surat keterangan tidak terlibat G-30-S/PKI dan surat keterangan Dokter Umum Pemerintah sampai dengan tanggal 13 Pebruari 1971.

Bersama ini dilampirkan djadwal waktu pengadjuan tjalon.

- (d). Dalam rangka keperluan adanya penertiban urutan Daftar Tjalon oleh Organisasi, maka dimungkinkan pula bagi Organisasi Golongan Politik/Golongan Karya untuk mengadakan perubahan-perubahan antara lain tentang tjara menulis nama tjalon, penggan-

tian nama tjalon dan urutan-urutan tjalon sampai dengan tanggal 13 Pebruari 1971.

Kesempatan untuk penertiban Daftar Tjalon ini bukannya berarti kesempatan untuk penambahan jumlah tjalon.

Apabila nama tjalon yang terdapat dalam daftar Tjalon tidak tjok dengan nama tjalon yang tertantum dalam Daftar Pemilih, hal ini akan diadakan konsultasi dengan Partai Politik/Golongan Karya yang bersangkutan.

- (c). Sesuai dengan jadwal waktu pengadjuan tjalon, maka penelitian surat-surat pentjalonan oleh Panitia Peneliti Pusat/Daerah dan KOPKAMTIB/LAKSUS KOPKAMTIB serta kesempatan bagi organisasi Golongan Politik/Golongan Karya yang dikembalikan/ditolak pengadjuan tjalonnya untuk memperbaiki atau menggantinya berlangsung dari tanggal 14 Djanuari sampai dengan tanggal 27 Pebruari 1971.

Untuk mempertjepat pemeriksaan maka penelitian dapat dilakukan setjara serentak oleh Instansi-instansi tersebut.

Setelah diadakan pembijtaraan dengan PANGKOPKAMTIB mengenai pendelegasian wewenang dari LAKSUS KOPKAMTIB kepada Dan Taktis Operasionil LAKSUS PANGKOPKAMTIB Daerah, maka pendelegasian wewenang tersebut tidak dapat, sehingga penelitian tjalon anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II tetap dilaksanakan oleh LAKSUS KOPKAMTIB.

10. **Pertanyaan :**

- a. Suatu kenyataan bahwa pengiriman kartu suara terlambat lk. 1 bulan dari ketentuan permulaan masa pentjalonan.

Untuk mengatasi keterlambatan pengiriman surat-suara yang akan datang, apakah Pemerintah sudah mempertimbangkan tjara-tjara yang lebih praktis dalam pengiriman surat suara tersebut pada TPS-2.

Misalnya Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau mengusulkan

agar selambat-lambatnja dua bulan sebelum pemungutan suara, surat suara itu sudah dapat diterima di TPS-2.

- b. Sedapat mungkin dihindarkan adanya TPS keliling, mengingat problema tehnik terutama sekali menjangkut penghitungan suara yang dilakukan sesaat setelah pemungutan suara.
Untuk Pulau-pulau yang tersebar dari letaknya berdjauhan satu sama lain hendaknja didirikan TPS masing-masing.

Djawaban :

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 112/LPU/Tahun 1970 telah ditetapkan tentang Surat Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Untuk mengatasi keterlambatan pengiriman surat suara ke Daerah-daerah akan ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut :

- (1). Pentjetakan surat suara untuk semua djenis Badan Perwakilan Rakyat dan semua Daerah Pemilihan diselenggarakan setjara terpusat oleh Lembaga Pemilihan Umum;
- (2). Surat Suara disampaikan oleh Lembaga Pemilihan Umum langsung kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan untuk luar negeri kepada Panitia Pemungutan Suara di Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia;
- (3). Surat Suara harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II selambat-lambatnja 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga tersedia tjukup waktu bagi Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk mengirimkannya kepada Panitia-panitia Pemungutan Suara dalam wilayah kerdja masing-masing dalam keadaan

dibungkus dan disegel, diperintji untuk tiap-tiap Tempat Pemberian Suara (T.P.S.) dengan ditulis keterangan di luar bungkusan tentang djumlah isinja, jaitu sebanjak pemilih jang akan dilajaninja ditiap Tempat Pemberian Suara (T.P.S.) ditambah 10% (sepuluh prosen).

- b. Mengingat keadaan geografis dan tidak memungkinkan tersedianja tenaga-tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di dua belas Ketjamatan da'am wilayah Kabupaten Bulongan Propinsi Kalimantan Timur, maka pada prinsipnja didaerah tersebut dapat diadakan Tempat Pemberian Suara Mobil asal kerahasiaan dan securitynja terdjamin.

11. Saran :

Mengusulkan agar supaja diadakan latihan gabungan pemungutan suara jang diikuti oleh semua unsur termasuk unsur keamanan diluar Tempat Pemungutan Suara.

Dan pada waktu pelaksanaannja supaja Komisi III DPR-GR dapat diundang untuk menjaksikan latihan tersebut.

Tanggapan :

Diperkirakan keinginan Saudara-saudara jang terhormat ini dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum pada media bulan Pebruari 1971.

Pada waktunja akan disampaikan surat undangan kepada Komisi III DPR-GR untuk menjaksikan latihan jang dimaksud.

Demikianlah djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran Saudara-saudara jang terhormat.

Terima kasih.

Djakarta, 25 Djanuari 1971.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

t.t.d.

AMIRMACHMUD

PENDJELASAN/DJAWABAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS SARAN-SARAN/KRITIK-KRITIK DARI KOMISI III BAGIAN B
DAN KOMISI II DPR-GR TERHADAP PERAGAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA JANG
DISELENGGARAKAN DI COMPLEX PTIK
PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 1971 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT
KERDJA PADA TANGGAL 8 APRIL 1971

**PENDJELASAN/DJAWABAN MENTERI DALAM NEGERI/KE-TUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM ATAS SARAN-SARAN/KRITIK-KRITIK DARI KOMISI III, BAGIAN B DAN KOMISI II DPR-GR TERHADAP PERAGAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA JANG DISELENGGARAKAN DI COMPLEX PTIK TJIPUTAT PADA
TANGGAL 17 FEBRUARI 1971 DISAMPAIKAN DALAM
RAPAT KERDJA PADA TANGGAL 8 APRIL 1971.**

Memperhatikan saran-saran/kritik-kritik dari jth para anggota Komisi III, Bagian B dan Komisi II DPR-GR terhadap peragaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara jang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum di Complex PTIK Tjiputat pada tanggal 17 Pebruari 1971 untuk memenuhi permintaan dari jth Komisi III Bagian B dan Komisi II DPR-GR, maka segala sesuatu mengenai pengaturan tentang lay-out daripada Tempat Pemungutan Suara, tata-tjara Pemungutan Suara dan Tata-tjara Penghitungan Suara pada kesempatan ini kami djelaskan sebagai berikut :

- I. 1. Mengenai lay-out Tempat Pemungutan Suara telah dikelua-kan Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indone-sia Nomor 2/PPI/Tahun 1971 jaitu tentang Tata-Susunan Tempat Pemungutan Suara jang memuat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan tempat atau letak Tempat Pemungutan Suara, bentuk,

susunan dan ukuran dari :

- a. Tempat untuk KPPS,
- b. Tempat untuk para pemilih,
- c. Bilik/bilik-bilik pemberian suara,
- d. Tempat untuk kotak-kotak suara.

Pada Pedoman ini disertai juga 2 (dua) lampiran, yaitu Lampiran I tentang Gambar/Bagan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pada Lampiran II mengenai bentuk Bilik (bilik-bilik) Pemberian Suara.

2. Mengenai pengaturan tentang Tata-tjara Pemungutan Suara telah pula dikeluarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Nomor 3/PPI/Tahun 1971 yaitu tentang Tata-tjara Penjelenggaraan Pemungutan Suara.

Dalam Pedoman ini dimuat ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. Pembentukan Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- b. Tugas Ketua anggota-anggota Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara setjara umum, sebelum dan pada waktu pemungutan suara.
- c. Khusus mengenai wewenang Ketua KPPS
- d. Proses Pemberian Suara,
- e. Pemungutan Suara landjutan, ulangan dan susulan.
- f. Pemungutan Suara di Rumah Sakit, di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasjarakatan.

Pada Pedoman ini disertai pula lampiran mengenai Gambar/Bagan tentang Pembagian Tugas Dalam Pemungutan Suara Ketua KPPS, dan Petugas Keamanan serta Proses Pemberian Suara oleh Pemilih.

3. Sedangkan mengenai pengaturan tentang Tata-tjara Penghitungan Suara dalam waktu yang singkat akan dikeluarkan pula Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia mengenai persoalan tersebut.
- II.
1. Apabila diteliti kedua Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Tahun 1971 Nomor 2 dan 3 diatas, maka saran-saran/kritik-kritik terhadap lay-out TPS dan Tata-tjara Penjelenggaraan Pemungutan Suara, pada dasarnya sudah tertampung ketjuali mengenai saran Nomor 12 tentang lay-out TPS sebagaimana tertera dalam schetsa/lampiran saran-saran/kritik-kritik tersebut.
 2. Khusus mengenai lay-out ini kami tetap menetapkan komposisi sebagaimana tertantun dalam Lampiran I Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Nomor 2/PPI/ Tahun 1971.
Tempat untuk KPPS diletakkan lebih kurang pada jarak 5 meter dari bagian depan Bilik Pemberian Suara, maksudnja ialah agar supaya KPPS dapat mengawasi dan melihat setjara langsung keluar-masuknja pemilih sewaktu melakukan pemberian suara di Bilik Pemberian Suara.
Komposisi ini sesuai dengan maksud pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970.
 3. Khusus mengenai usul agar supaya wakil Parpol/Golkar diundang oleh KPPS pada waktu penghitungan suara, sudah ditampung dengan melalui surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 184/11/1971 tanggal 6 April 1971 yang ditudjukan kepada seluruh Pengurus Besar Parpol/Golkar.
Bahkan kepada organisasi diberi kesempatan pula untuk ikut serta mengawal hasil pemungutan suara yang berupa surat-surat suara, berita-berita Atjara dan tjatatan penghitungan suara

didalam kotak suara atas biaja sendiri.

Djakarta, 8 April 1971

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

PENDJELASAN/DJAWABAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN JANG
DIADJUKAN OLEH KOMISI III DPR-GR DALAM RAPAT KERDJA
PADA TANGGAL 8 APRIL 1971

PENDJELASAN/DJAWABAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN
JANG DIADJUKAN OLEH KOMISI III DPR-GR DALAM RA-
PAT KERDJA PADA TANGGAL
8 APRIL 1971

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat djawaban atas pertanjaan-pertanjaan/saran-saran jang diadjukan jang terhormat Saudara Pimpinan Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjanjum dalam suratnja tertanggal 18 Maret 1971.

Setelah kami peladjar setjara mendalam, maka bersama ini kami sadjikan pendjelasan/djawaban atas pertanjaan-pertanjaan/saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Pertanjaan :

Di PPD Tingkat I Sumatera Selatan ada permintaan pendjelasan mengenai "stembus accoord" sebagaimana jang dituangkan dalam pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969.

Apakah ada pendjelasan-pendjelasan lebih landjut mengenai "stembus accoord" tersebut.

Djawaban :

Dasar hukum tentang "stembus accoord" dalam pemilihan umum, yaitu penggabungan suara antara organisasi golongan Politik/Karya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi, ditentukan dalam pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969.

Mengenai tata tjara "stembus accoord" lebih landjut ditentukan dalam Sub III angka 4 Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 56/LPU Tahun 1970 tentang Tata tjara Pengadjuan Tjalon-tjalon bagi Anggota-anggota DPR/DPD I dan DPRD II serta kegiatan-kegiatan landjutannja.

Ketentuan itu menjebutkan, bahwa keinginan Penggabungan suara antara Parpol-parpol dan antara Parpol-Sekber Golkar harus sudah diinjatakan oleh organisasi-organisasi yang mengadakan tjalon dalam Surat Pentjalonan (Formulir MODEL B).

Formulir MODEL B yang disebut dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 dan diberikan tjontoh pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, serta lebih landjut diatur dalam pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1970, setjara terperintji mengatur/mendjelaskan tentang pelaksanaan tehnik-administratif mengenai "stembus accoord" itu.

Dalam hal ada keinginan penggabungan suara, maka pada waktu mengadakan Tjalon-tjalon harus disebutkan dalam Formulir MODEL B itu: Nama dan Nomor tanda gambar organisasi-organisasi yang mengadakan penggabungan suara dengan menjebutkan pula untuk badan perwakilan apa (DPR/DPD I/DPD II) dan dalam daerah pemilihan mana penggabungan itu diadakan.

Demikian pula harus disebutkan, wakil yang diperoleh karena penggabungan suara itu diberikan kepada organisasi mana diantara organisasi-organisasi yang mengadakan "stembus accoord".

Untuk dapat diketahui oleh para Pemilih tentang adanya "stembus accoord" antara Parpol-parpol atau antara Parpol-Sekber Golkar, maka pernyataan penggabungan suara itu disebutkan pula dalam Daftar Tjalon yang diumumkan dan dipakai dalam pemungutan suara (Daftar

Tjalon Tetap), jaitu ditjantumkan dibagian bawah daftar nama-nama tjalon dari organisasi-organisasi jang bersangkutan pada Daftar Tjalon Tetap.

Adapun mengenai tata-tjara pembagian kursi bagi organisasi-organisasi jang mengadakan "stembus accoord" untuk DPR diatur dalam pasal 93 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 dan untuk DPRD dalam pasal 98 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah tersebut. Pada hakekatnja effect daripada "stembus accoord" itu bagi organisasi-organisasi jang mengadakan penggabungan suara, ialah dalam memanfaatkan (memberikan kemungkinan hasil jang menguntungkan) sisa-sisa suara sesudah pembagian kursi tingkat pertama jang didasarkan atas dipenuhinja "kiesquotient"/Bilangan Pembagi Pemilihan.

Dengan digabungkannja sisa-sisa suara dari organisasi-organisasi jang mengadakan "stembus accoord" itu sesudah pembagian kursi tingkat pertama, mungkin gabungan sisa-sisa suara itu dapat mentjapai pula "kiesquotient", sehingga dapat menghasilkan tambahan kursi bagi organisasi-organisasi jang bergabung itu.

Sesudah pembagian kursi tingkat kedua ini, dalam pembagian kursi tingkat ketiga/terachir, penggabungan suara itu masih pula mempunyai kemungkinan memperoleh kursi lagi dari pembagian kursi terachir jang didasarkan atas "sisa suara terbanjak", jaitu sisa kursi jang masih ada diberikan kepada organisasi atau gabungan organisasi jang mempunyai sisa suara/gabungan sisa suara terbanjak.

2. **Pertanyaan :**

Pertanyaan Komisi III DPR-GR jang menjangkut wewenang LAKSUS dan ikut sertanja anggota ABRI dalam kegiatan Golongan Karya ditanggapi oleh (Sekretaris Umum) Lembaga Pemilihan Umum supaja hal itu ditanjakan lewat Komisi III DPR-GR kepada Menteri Hankam. Karena Lembaga Pemilihan Umum mendapat delegasi dari Presiden dalam pelaksanaan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 jo TAP MPRS No. XLII/MPRS/1968.

Kami ingin bertanja :

Bagaimana sebetulnja hubungan kerdja antara Lembaga Pemilihan Umum dengan Menteri selaku pembantu Presiden.

Djawaban :

Berdasarkan TAP MPRS No. XLII Tahun 1968 Presiden/Mandataris MPRS adalah Penanggung djawab atas penyelenggaraan Pemilihan Umum jang selambat-lambatnja telah terlaksana pada tanggal 5 Djuli 1971.

Untuk menjelenggarakan Pemilihan Umum tersebut sesuai dengan maksud pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 15 tahun 1969, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun mengenai hubungan kerdja Lembaga Pemilihan Umum selaku aparat Presiden/Mandataris MPRS didalam menjelenggarakan Pemilihan Umum dengan Menteri-menteri selaku Pembantu Presiden pada dasarnya memang erat sekali.

Hal ini terbukti bahwa Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan jang masing-masing terdiri dari :

Menteri Dalam Negeri sebagai anggota merangkap Ketua, Menteri Kehakiman dan Menteri Penerangan sebagai anggota merangkap wakil Ketua dan Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Perhubungan serta Menteri Luar Negeri masing-masing sebagai anggota.

Sedangkan Menteri-menteri lainnja jang tidak duduk dalam Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum pun kordinasi serta synchronisasi tugas tetap harus ditijptakan semaksimal dan sebaik mungkin guna kelantjaran tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sebagai tjontoh antara lain :

- Menteri Perhubungan dan Kepala Staf Angkatan Udara membantu pengiriman barang-barang ke Daerah-daerah dan djaringan telkom.
- Menteri Kehakiman membantu tentang penjusunan-penjusunan peraturan-peraturan.

- KOPKAMTIB membantu dibidang pengamanan.
- Menteri Penerangan tentang penjebar-luasan pengertian-pengertian Pemilihan Umum kepada masyarakat dan lain sebagainya.

3. Pertanyaan :

Mohon pendjelasan tentang alasan-alasan politis, juridis dan administratif dari Pemerintah/Lembaga Pemilihan Umum dalam melakukan pen-tjoretan atau penggeseran nomor urut nama-nama tjalon jang sudah diadjudkan.

Djawaban :

Penelitian terhadap tjalon-tjalon jang diadjudkan bermaksud untuk me-neliti apakah sjarat jang tertjantum dalam peraturan perundangan su-dah dipenuhi.

Dasar hukum jang dipergunakan :

- a. P.P. No. 1 tahun 1970 pasal 49 ayat (6);
- b. P.P. No. 1 tahun 1970 jo P.P. No. 2 tahun 1970 pasal 12 ayat (2) dan (3);
- c. Keputusan Presiden No. 39 tahun 1970.

Mengenai pengeluaran nama-nama tjalon dari daftar tjalon atau peng-geseran nomor urut nama-nama tjalon jang sudah diadjudkan disampai-kan pendjelasan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum maka djangka waktu terachir untuk penga-djudkan kelengkapan daftar tjalon adalah tanggal 25 Pebruari 1971, setelahnja diadakan 2 kali pengunduran jaitu pertama pada tanggal 13 Djanuari 1971 dan kedua tanggal 13 Pebruari 1971.
Setelah dilakukan penelitian terhadap daftar tjalon beserta per-sjaratan-persjaratan jang ditentukan berdasarkan peraturan per-undangan jang ada maka ternjata sesudah tanggal 25 Pebruari

1971 terdapat kualifikasi tjalon-tjalon sebagai berikut :

- 1). Tjalon-tjalon jang lengkap formulirnja.
- 2). Tjalon-tjalon jang tidak ada sama sekali formulirnja.
- 3). Tjalon-tjalon jang belum lengkap formulirnja.
- 4). Tjalon-tjalon jang sudah lengkap formulirnja akan tetapi tidak sempurna (misalnja bukan surat asli tapi foto copy dan sebagainya).
- 5). Tjalon jang penulisan namanja terdapat perbedaan dalam formulir-formulir jang bersangkutan.
- 6). Tjalon jang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan security perlu mendapatkan penjelesaian tersendiri.

b. Mengingat kondisi-kondisi jang demikian itu dihubungkan dengan dijadwal waktu penjusunan Daftar Tjalon Sementara jang sudah harus diumumkan pada tanggal 14 Maret 1971, maka setelah pada tanggal 14 Maret 1971 Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum bersama-sama dengan KOPKAMTIB melaporkan kepada Bapak Presiden, telah diambil keputusan sebagai berikut :

- 1). Tjalon-tjalon jang tidak ada formulirnja sama sekali diputuskan untuk dikeluarkan dari daftar pentjalonan dan pada masing-masing organisasi dapat mengajukan tjalon penggantianja paling lambat tanggal 9 Maret 1971.
- 2). Tjalon-tjalon jang belum lengkap formulirnja atau jang belum sempurna formulirnja, diberi kesempatan untuk melengkapi dan menjempurnakannja paling lambat sampai dengan tanggal 31 Maret 1971.
- 3). Terhadap tjalon-tjalon jang berbeda-beda penulisan nama serta gelarnja diminta untuk dapatnja Pimpinan Organisasi menjerahkannya kepada Panitia untuk mengubahnja sehing-

ga ada kesamaan pada semua formulir dari masing-masing tjalon.

Dan nama serta gelar jang akan diambil oleh Panitia sebagai ukuran adalah nama gelar jang terdapat dalam formulir C jang ditanda-tangani sendiri oleh tjalon jang bersangkutan.

4). Terhadap tjalon-tjalon jang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan security perlu mendapatkan penjelesaian, maka diambil djalan sebagai berikut :

(a). Seharusnja tjalon-tjalon tersebut berdasarkan faktor security dikeluarkan dari daftar pentjalonan, akan tetapi apabila setjara konsekwen dilakukan, maka akan timbul faktor politis psychologis jang kurang menguntungkan bagi organisasi-organisasi peserta Pemilihan Umum.

(b). Oleh karena itulah maka demi untuk tertjapainja keseimbangan antara faktor security dan faktor psychologis tersebut diatas diambil djalan pemetjahan sebagai berikut :

- tjalon-tjalon tidak akan dikeluarkan dari daftar tjalon.
- tjalon-tjalon tersebut digeser dibawah nama nama tjalon jang lulus dari penelitian security.

c. Khusus bagi Surat perizinan Pegawai Negeri dapat dijelaskan bahwa Ketua Lembaga Pemilihan Umum telah mengirimkan daftar pegawai negeri jang ditjalonkan kepada Menteri jang bersangkutan untuk dimintakan surat izin setjara collectief, izin mana paling lambat tanggal 9 Maret 1971 sudah dapat disampaikan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Akan tetapi tidak semua pegawai negeri nanti dapat diizinkan

oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan kebutuhan teknis dari Departemen yang bersangkutan, maka sudah barang tentu terhadap Pegawai Negeri yang tidak mendapatkan izin tersebut akan dikeluarkan pula dari daftar pentjalonan dan diberitahukan kepada organisasi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian organisasi tersebut dapat menundjuk pula tjalon penggantinya.

- d. Dengan adanya usul-usul dari organisasi-organisasi yang tjalon-tjalonnya ada yang digeserkan nomor urutnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diatas dan kemudian dimintakan untuk dikembalikan pada nomornya semula, setelah diadakan pembitjaaraan antara Pimpinan organisasi yang bersangkutan dengan Team Peneliti KOPKAMTIB dan Panitia Peneliti Pusat, sebagian dari tjalon-tjalon yang nomor urutnya digeserkan kebawah telah dikembalikan maksimal pada nomor urutnya yang semula, chususnja terhadap tjalon yang mempunyai kedudukan sebagai Ketua/Wakil Ketua organisasinya di Pusat ataupun di wilayah.

4. Pertanyaan :

Dalam salah satu rapat kerdja antara Komisi III DPR-GR dengan Lembaga Pemilihan Umum fihak Lembaga Pemilihan Umum telah mendjandjikan akan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang Kampanje. Apakah peraturan-peraturan tersebut sekarang sudah selesai/siap mengingat waktunya sudah dekat.

Bersediakah Pemerintah membitjarakan pokok-pokok diktum Peraturan tersebut dengan Komisi III DPR-GR.

Djawaban :

Peraturan-peraturan tentang Kampanje berdasarkan Keputusan Presiden No. 68 pasal 6 ayat (4), yang sudah dikeluarkan ialah mengenai Kampanje melalui Radio dan Televisi R.I.

Untuk Keputusan Menteri Penerangan No. 04/KEP/MENPEN/1971 dan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 05/KEP/MENPEN/1971.

Pengaturan lebih lanjut segera akan dikeluarkan.

5. **Pertanyaan :**

Berhubung adanya ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, mohon penjelasan lebih lanjut tentang :

- a. Siapa yang dapat mengemukakan keberatan atas Daftar Tjalon Sementara.
- b. Berhubung tjalon diadakan oleh Parpol/Golkar, kepada siapakah keberatan-keberatan tersebut diadakan.
- c. Bagaimanakah Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan menyelesaikan suatu keberatan tersebut.
- d. Bagaimanakah tjara Panitia Pemilihan untuk menghindarkan terjadinya anarki didalam penggunaan hak mengadakan keberatan.
- e. Keberatan-keberatan yang bagaimanakah yang dapat diadakan oleh orang yang bersangkutan dan yang dapat dipertimbangkan Lembaga Pemilihan Umum.

Djawaban :

- a. Sesuai dengan maksud pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, maka pada dasarnya setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas Daftar Tjalon Sementara.
Sebagaimana pedoman dalam melakukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 52 tersebut dengan kawat/telex/telkom Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 41/22/1971, tanggal 15 Maret 1971 telah diatur tjara pengadjuan dan bentuk keberatan sebagai berikut :

- (1). Setiap keberatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis.
- (2). (a) Bagi perorangan harus mentjantumkan nama, pekerjaan, alamat, terdaftar sebagai pemilih di desa mana, tanda tangan, terhadap tjalon mana keberatan diajukan dan disertai alasannya dengan dilampiri pembuktian yang meyakinkan.
- (b). Bagi organisasi yang mengajukan keberatan, syarat-syarat sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2)(a) diatas diajukan oleh pengurusnya.
- (3). Keberatan tersebut untuk masing-masing Daftar Tjalon Sementara diajukan kepada masing-masing Panitia yang bersangkutan selama jangka waktu 30 hari dan berakhir sampai dengan tanggal 13 April 1971.
- (4). Setiap pengadjuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan diatas harus ditolak.

b. Sudah terdjawab dalam djawaban huruf a ayat (3) diatas.

c. Setiap keberatan yang diajukan diteliti oleh Panitia Pemilihan masing-masing, apakah keberatan tersebut diajukan masih dalam batas-batas ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-undang No. 15 Tahun 1969 dan tata-tjarannya sesuai dengan maksud kawat/telex/telkom Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 41/22/1971, tanggal 15 Maret 1971 atau tidak.

Keberatan-keberatan yang memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, oleh Panitia Pemilihan masing-masing sesuai dengan maksud keberatan yang diajukan kemudian diambil suatu keputusan.

d. Kemungkinan akan timbulnya anarchi didalam penggunaan hak mengajukan keberatan bagi yang berkepentingan, dengan dikehuarkannya kawat/telex/telkom Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 41/22/1971 tanggal 15 Maret 1971

tersebut, kiranya dapat dihindari.

e. Sudah terdjawab dalam djawaban huruf a dan c diatas.

6. **Pertanjaan :**

Mohon pendjelasan tentang masalah Pengadilan Pemilihan Umum:

- a. Dasar hukum pembentukan Pengadilan tersebut.
- b. Susunan dari Peradilan Pemilihan Umum termasuk lembaga pemeriksaan dan penuntutan dilakukan oleh siapa.
- c. Hubungan antara Pengadilan Pemilihan Umum dan Pengadilan Negeri.

Djawaban :

Menanggapi pertanjaan huruf a, b dan c maka mengenai Pengadilan Pemilihan Umum ini kami jelaskan sebagai berikut :

Pengadilan Pemilihan Umum dalam arti khusus merupakan pengadilan tersendiri, lepas dari Pengadilan Negeri sebagaimana halnja dengan Pengadilan Landreform jang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1964 tidak diadakan.

Akan tetapi terhadap perkara-perkara pidana khusus jang menjangkut kedjahatan sebagaimana dimaksud pasal 26 dan 27 Undang-undang No. 15 Tahun 1969 telah diinstruksikan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia agar mendapat prioritas didalam pemeriksaan.

Instruksi Mahkamah Agung ini telah dikeluarkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 1970 tanggal 17 September 1970 jang dibuat untuk memenuhi surat Menteri Dalam Negeri No. SUS 1/3/25, tanggal 27 Agustus 1970, perihal :

Tugas Khusus Pengadilan Negeri untuk Pemilihan Umum.

7. **Pertanjaan :**

Usul :

- a. Pada dasarnya jang harus diatur oleh Pemerintah/Lembaga Pemi-

lihan Umum mengenai kampanye ialah isi dari kampanye tersebut baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Adapun mengenai tempat-tempat yang dipergunakan untuk kampanye, Komisi III mengusulkan hendaknja pada dasarnya semua tempat boleh/terbuka untuk kampanye.

- b. Supaja diadakan larangan terhadap gangguan yang dilakukan terhadap tanda-tanda gambar Parpol/Golkar, maupun sarana-sarana kampanye lainnja yang dipergunakan oleh Parpol/Golkar.

Djawaban :

- a. Mengenai tempat-tempat untuk Kampanje, pada dasarnya terbuka untuk umum. Tempat-tempat yang dilarang dipergunakan untuk Kampanje pemilihan umum, ialah gedung-geclung Pemerintah dan tempat-tempat ibadah.
Larangan tersebut ditentukan dalam pasal 9 Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1970.
- b. Usul agar supaja diadakan larangan gangguan terhadap tanda-tanda gambar dan sarana-sarana Kampanje lainnja, sebenarnya persoalan ini sudah tertampung dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969 yang menentukan hukuman pidana penjara selama-lamanja 5 tahun bagi mereka yang dengan sengaja mengatjaukan, menghalang-halangi atau mengganggu djalannja pemilihan.

Djakarta, 8 April 1971

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

D J A W A B A N
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN JANG
DIADJUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA
TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 19 APRIL 1971 NOMOR : C1.02/K/1179/DPR-GR/1971

DJAWABAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN
JANG DIADJUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI III DPR-GR
SEBAGAIMANA TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT
PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 19 APRIL 1971
NOMOR : CL.02/K/1179/DPRGR/1971

Bersama ini disampaikan dengan hormat djawaban-djawaban dan tanggapan atas pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran jang diadjukan oleh Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR Nomor CL. 02/K/1179/DPRGR/1971 tanggal 19 April 1971.

Mengenai pertanjaan-pertanjaan Nomor 4, 7, 14 dan 15 karena data-data jang lengkap belum diterima dari Daerah-daerah, maka djawaban terhadap pertanjaan-pertanjaan tersebut akan kami susulkan setjara tertulis.

1. Pertanjaan :

Dalam rangka Pemilihan Umum 1971 tahap pentjalonan anggota-anggota DPRD Tingkat II dari PNI Tjabang Purwakarta dan Subang (Djawa Barat) ternjata tjalon-tjalon itu dikeluarkan dari Daftar Tjalon Sementara (ditjoret), dengan alasan jang diperoleh dari Team Peneliti Tingkat II bahwa Pimpinan PNI Tjabang Purwakarta dan Subang itu belum

diadakan pelantikan.

Adapun sebenarnja bukan demikian halnja.

Semula PNI Tjabang Purwakarta - Subang pernah membekukan diri pada tahun 1965.

Kemudian mentjairkan diri lagi berturut-turut tahun 1967 dan 1970 dengan disaksikan oleh Muspida setempat, bahkan dengan pidato sambutan baik oleh Bupati Kepala Daerah waktu itu.

Berhubung dengan tindakan pengeluaran nama-nama tjalon dari Daftar Tjalon Sementara oleh Team Peneliti tersebut, kami mengharap dengan hormat kepada Saudara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum bersama-sama dengan Instansi lain jang berwenang agar daftar tjalon jang diadjukan oleh PNI Tjabang Purwakarta - Subang itu mendapat penjelesaian.

Djawaban :

Atas pertanyaan ini kami berikan pendjelasan bahwa PNI dalam pentjalonan anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta terpaksa tidak dapat diikut sertakan berhubung sampai batas waktu jang ditentukan jaitu tanggal 13 Pebruari 1971 ternyata eksistensi riil Tjabang PNI di Subang dan Purwakarta masih dalam penjelesaian dan belum memenuhi sjarat-sjarat untuk dapat diakui oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 49/11/1971 tanggal 21 Djanuari 1971.

Perlu kami djelaskan bahwa Pemerintah Daerah setempat telah menunjukkan pengertian dan memberikan bantuan dalam usaha PNI membentuk eksistensi riil Tjabangnja di Subang dan Purwakarta, namun demikian setjara objektif harus diterima kenyataan bahwa mereka sampai batas waktu jang telah ditentukan belum berhasil melaksanakannja.

2. Pertanyaan :

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum jang akan datang hendaknja alat pentjloblos tanda gambar itu nanti dapat diperbesar.

Djawaban :

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 37/LPU/Tahun 1971 tanggal 19 Maret 1971 telah ditetapkan tentang alat pentjoblos tanda gambar pada surat suara dan landasannya untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Alat pentjoblos tanda gambar dalam surat suara untuk pemberian suara dalam pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II tersebut mempunyai satu buah mata tusuk yang dibuat dari paku kasau atau bambu bagian yang berkulit yang berbentuk bulat panjang berujung runting dengan ukuran :

- a. Panjang minimal 12,5 cm,
- b. Garis Tengah 4 a 5 mm,
- c. Bagian yang diruntjingkan 3 a 5 mm,
- d. Panjang tali rami untuk pengikat 1,5 m.

Dengan garis tengah 4 a 5 mm, maka alat pentjoblos tersebut sudah sesuai dengan saran yang diajukan oleh Saudara yang terhormat.

3. Pertanyaan :

Tjalon yang berasal dari Guru S.D. yang ditjalonkan oleh Parpol/Golkar di Daerah, apakah Pemerintah (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum) sependapat dengan kami agar Pemerintah Daerah dapat mengidjinkan sebagai tjalon yang berasal dari Parpol/Golkar selama mereka tidak mengganggu tugas mereka sebagai pendidik.

Djawaban :

Pada prinsipnya para pegawai Negeri/Daerah termasuk guru-guru S.D. dapat ditjalonkan oleh Parpol/Golkar.

Hal ini sudah ditegaskan dalam Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 126/11/1971 tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan bahwa guru-guru S.D. dapat ditjalonkan baik oleh

Parpol maupun Golkar sepanjang menurut penilaian Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, kepentingan kedinasan dalam rangka men-
sukseskan program pemerintah tidak terganggu dengan adanya pen-
tja-lonan pegawai Negeri/Daerah tersebut.

Hal ini mengingat bahwa sesuai Keputusan Presiden No. 67 tahun 1970,
pegawai negeri yang ditja-lonkan harus dibebaskan dari jabatan organik-
nya semendjak namanya tertja-lantumkan dalam Daftar Tja-lon Tetap sampai
selesai-nya pemungutan suara.

Djelas bila ada yang tidak diizinkan, adalah semata-mata kepentingan dinas
dalam rangka men-
sukseskan dan memcnangkan Pantja-Krida.

4. **Pertanyaan :**

Bagi guru-guru yang tidak menanda tangani "Monolojalitas" di daerah-
daerah banjak yang dikenakan sanksi schorsing; kejadian ini kita dapati
terhadap guru-guru di Kabupaten Tjilatjap.

Tindakan pen-schorsan tersebut menurut hemat kami tidak berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri.

Apakah Saudara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan
Umum sependapat dengan kami tindakan-tindakan sementara pedjabat-
pedjabat Daerah terhadap guru-guru/Pegawai Negeri tersebut yang tidak
berdasarkan peraturan-perundangan itu segera ditja-but? Hal ini di-
maksudkan agar tidak menimbulkan kegelisahan masyarakat setempat.

Djawaban :

Karena pertanyaan ini kami anggap tidak menja-ngkut masalah pemilihan
umum, maka akan dijawab oleh Menteri Dalam Negeri bukan dalam
fungsi-nya sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

5. **Pertanyaan :**

Kami Komisi III/Komisi Pengawas terhadap pelaksanaan Undang-un-
dang No. 15 dan 16 tahun 1969 tentang pelaksanaan Pemilihan Umum
mengutjapkan penghormatan setinggi-tinggi-nya kepada Presiden Suharto
berkenaan dengan diadakannya meeting antara Presiden dengan Parpol-

parpol pada tanggal 7 April 1971 yang lalu dengan maksud untuk men-
sukseskan Pemilihan Umum yang akan datang. Alangkah baiknya jika
hasil meeting yang telah diadakan tersebut dikirimkan ke Daerah-daerah
agar dapat menambah ketenangan.

Djawaban :

Terima kasih atas saran baik Saudara Anggota yang terhormat dan akan
kami perhatikan.

Kesimpulan-kesimpulan dari Bapak Presiden atas hasil-hasil pertemuan
tersebut, telah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga
Pemilihan Umum baik setjara tertulis maupun lisan, begitu pula dalam
pidato T.V.R.I. tanggal 25 April 1971.

6. **Pertanyaan :**

Hari Pemilihan Umum tanggal 5 Djuli 1971 diadakan tanggal 3 Djuli
1971.

Pelantikan anggota DPR baru hasil Pemilihan Umum akan diadakan
pada tanggal 28 Oktober 1971.

Apa sebabnya penentuan tanggal pemungutan suara itu ditetapkan de-
ngan keputusan Menteri saja ?

Djawaban :

Dalam peraturan-perundangan tidak ada ketentuan yang menetapkan bah-
wa pemungutan suara untuk pemilihan umum dilakukan pasti pada
tanggal 5 Djuli 1971.

Sumber hukum yang menjebut tanggal 5 Djuli 1971 adalah pasal 1 Ke-
tetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 yang menentukan bahwa "Pemi-
lihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diseleng-
garakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal
5 Djuli 1971."

Djelas bahwa TAP MPRS tersebut mengandung pengertian bahwa
pemungutan suara dapat diselenggarakan sebelum tanggal 5 Djuli 1971.
Untuk menentukan siapa yang berwenang menetapkan tanggal yang pas-

ti sebagai hari pemungutan suara untuk pemilihan umum yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-undang Nomor 15 tahun 1969), bersama ini dikemukakan beberapa ketentuan peraturan-perundangan sebagai berikut :

- a. **Pasal 4 Tap M.P.R.S. No. XLII/MPRS/1968** menjabutkan "Menugaskan Pada Presiden/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan itu".
- b. **Pasal 8 Undang-undang No. 15 tahun 1969** menjabutkan dalam:
 - **Ajat (1) :** "Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah Pimpinan Presiden".
 - **Ajat (2) :** "Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang Pedjabat dapat ditundjuk oleh Presiden untuk melaksanakan Pimpinan pemilihan umum tersebut".
 - **Ajat (3) :** "Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri."
- c. **Pasal 4 ajat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970** menjabutkan :
"Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum melaksanakan Pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ajat (2) Undang-undang No. 15 tahun 1969".
- d. **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970** menjabutkan bahwa permulaan Pendaftaran Pemilih ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Dengan mengingat pasal-pasal Peraturan Perundangan diatas, penentuan tanggal permulaan Pemilihan Umum, jaitu permulaan Pendaftaran Pemilih yang merupakan tanggal permulaan (start) pelaksanaan pemilihan umum menurut undang-undang No. 15 tahun 1969 adalah mendjadi wewenang Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai Menteri Dalam Negeri.

Mengenai penentuan hari pemungutan suara pada tanggal 3 Djuli 1971 sebelum diputuskan telah dilaporkan kepada Presiden sebelumnya dan telah disetudjuinja.

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 menyebutkan: "Pemungutan suara dilakukan selambat-lambatnja 105 (seratus lima) hari sesudah penjurusan Daftar Tjalon tetap menurut pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini selesai ditempat-tempat Pemberian Suara jang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini".

Pengesahan/pengumuman Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II telah selesai tanggal 20 April 1971. Apabila pemungutan suara dilakukan pada tanggal 5 Djuli 1971 atau sebelum tanggal 5 Djuli 1971, hal ini tidak bertentangan dengan Tap. M.P.R.S. No XLII/MPRS/1968 juncto pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970. Untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu ditetapkan tanggal jang pasti sebagai hari Pemungutan Suara itu.

Dengan mengingat pasal-pasal Peraturan Perundangan sebagaimana tersebut diatas, maka Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum/Pedjabat jang ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan Pimpinan Pemilihan Umum sehari-hari dalam rangka tertib hukum mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan jang menetapkan tanggal jang pasti hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum 1971.

7. **Pertanyaan :**

Dikelurahan-kelurahan beberapa Ketjamatan Kabupaten Sleman jaitu: Kelurahan-kelurahan : Tambakredjo, Banjuredjo Ketjamatan Tempel. Kelurahan-kelurahan : Sendangarum, Sendangsari Ketjamatan Minggir, bahwa Rakjat dari Kelurahan-kelurahan dari kedua Ketjamatan tersebut oleh Penguasa setempat tidak diperbolehkan memilih dalam pemilihan umum jang akan datang dengan alasan bahwa mereka dikenakan karantina politik sebab setjara tidak langsung mereka tersangkut oleh G-30-S/PKI.

Jang sebenarnya mereka bukan PKI kebanyakan Rakjat Desa tersebut memeluk aliran sematjam kebatinan.

Berhubung dengan alasan tuduhan penguasa setempat terhadap Rakjat didesa dari kedua Ketjamatan tersebut kami minta pendjelasan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum bagaimanakah duduk perkara yang sebenarnya sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih mereka ?

Djawaban :

Karena pertanyaan ini kami anggap tidak menjangkut masalah pemilihan umum, maka akan dijawab oleh Menteri Dalam Negeri bukan dalam Kedudukan sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

8. **Pertanyaan :**

Tjalon-tjalon yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum mendapat idjin dari Menteri yang bersangkutan, kemudian tjalon itu mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri dengan segala resikonja.

Apakah tjalon-tjalon tersebut masih ada kemungkinan masuk dalam Daftar Tjalon Tetap yang akan datang.

Djawaban :

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 67 tahun 1970 juncto pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970, maka bagi pegawai negeri yang ditjalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan/Permusjawaratan Rakjat diperlukan adanya persetudjuan dari pedjabat yang berwenang. Djika seorang pegawai negeri yang ditjalonkan tidak disetudjui, kemudian minta berhenti sebagai pegawai negeri dan ternyata diluluskan, maka pegawai tersebut ditjantumkan namanya dalam daftar Tjalon Tetap, sepanjang tjalon yang bersangkutan termasuk kategori pending matters diumumkannja Daftar Tjalon Sementara.

Diantara tjalon-tjalon pegawai negeri untuk keanggotaan DPR yang tidak memperoleh persetudjuan dari pedjabat yang berwenang ternyata ada empat orang yang termasuk kasus sebagaimana diuraikan diatas. Keempat orang tjalon tersebut telah dimasukkan dalam Daftar Tjalon Tetap yang telah disahkan dan diumumkan pada tanggal 20 April 1971,

karena baik organisasi yang mentjalonkan maupun yang bersangkutan menjatakan sanggup untuk diberhentikan sebagai pegawai negeri.

9. **Pertanyaan :**

Untuk menentukan tjalon yang akan dinjatakan terpilih apakah yang dipakai sebagai pedoman formulir B-1 ataukah B-2 ?

Djawaban :

Untuk menentukan tjalon yang akan dinjatakan terpilih untuk pemilihan anggota DPR, yang dipakai sebagai pedoman ialah Daftar Tjalon menurut formulir Model B-2, jaitu Lampiran Daftar Tjalon Tetap Pemilihan Anggota DPR (alokasi) Daerah Tingkat II (Lampiran Model F1). Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 yang menyebutkan : "Djumlah yang diperoleh suatu Organisasi diberikan kepada Daftar Tjalon Organisasi tersebut dalam Daerah Tigkatn II, dimana Organisasi itu memperoleh suara terbanjak pertama

Selanjutnja ayat (4) antara lain menyebutkan : "Apabila suatu Organisasi tidak menjediakan Daftar Tjalon untuk suatu Daerah Tingkat II, sedangkan Organisasi tersebut memperoleh djumlah wakil di Daerah Tingkat II itu maka organisasi itu dapat mengemukakan Daftar Tjalon Susulan menurut ketentuan dalam Bab V Peraturan Pemerintah ini".

Pasal 94 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 didasarkan atas ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 15 tahun 1969 yang berbunyi :

"Tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnja mempunyai seorang wakil" dan ketentuan dalam sub 5 Pendjelasan Undang-undang tersebut yang antara lain menyebutkan : ", dan tiap-tiap Daerah Tingkat II mempunyai sekurang-kurangnja seorang wakil".

Ketentuan-ketentuan selanjutnja tentang tjara pembagian djumlah 360 kursi kepada Daerah Tingkat II Daerah Tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. **Pertanyaan :**

Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada semua Gubernur/Kepala Daerah menginstruksikan bahwa semua pegawai vertikal yang terletak di daerah yang ditjalankan untuk anggota DPRD memerlukan idjin dari Gubernur Kepala Daerah.

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh Lembaga Pemilihan Umum bahwa belum semua Menteri sempat mendelegir wewenangnja kepada bawahan yang berada di daerah:

Sampai sekarang banyak pegawai-pegawai vertikal yang ditjalankan untuk DPRD itu belum mendapat idjin dari Gubernur Kepala Daerah, walaupun dari sementara tjalon-tjalon ada yang sudah mendapat idjin dari Djawatannja masing-masing. Mohon pendjelasan.

Djawaban :

Berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 126/11/1971 tanggal 6 Maret 1971, maka pegawai negeri yang ditjalankan untuk keanggotaan DPR yang belum melengkapi surat persetujuan dari pejabat yang berwenang oleh Panitia Pemilihan Indonesia dimintakan persetujuan/penolakan setjara kolektif dari Menteri yang bersangkutan, sedangkan persetujuan/penolakan bagi pegawai negeri/daerah yang ditjalankan untuk keanggotaan DPRD I dan DPRD II di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah/Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Telegram tersebut dijustu untuk mempertjepat proses penyelesaian dan membantu Organisasi-organisasi.

Untuk persetujuan/penolakan pegawai negeri dari Instansi/Djawatan vertikal yang ditjalankan. Kepala Daerah terlebih dahulu menga'akan konsultasi dengan Kepala Instansi/Djawatan vertikal yang bersangkutan. Yang sudah diselesaikan setjara vertikal tetap berlaku.

Adapun kriteria dalam menentukan pemberian persetujuan/penolakan tersebut yang diutamakan ialah pertimbangan kepentingan kedinasjar dalam rangka mensukseskan program pemerintah.

Dengan demikian maka pegawai-pegawai daerah yang belum mendapat

idjin dari Gubernur Kepala Daerah tetapi sudah ada idjin dari Kepala Djawatannya, masih diperlukan konfirmasi dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

11. **Pertanyaan :**

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum bahwa dipusat tidak dilakukan tindakan pengeluaran nama tjalon dari Daftar Tjalon Sementara (pentjoretan).

Apakah tindakan dipusat itu berlaku juga didaerah ?

Djawaban :

Sesuai dengan Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 131/11/1971 tanggal 6 Maret 1971, maka tjalon-tjalon yang karena alasan politis-ideologis harus dikeluarkan dari Daftar Tjalon (ketjuali yang terlibat langsung maupun tidak langsung G-30-S/PKI) tetap dimasukkan dalam Daftar Tjalon Sementara dengan ketentuan nomor urutannya digeser kenomor urut dibawah nama-nama tjalon-tjalon yang lulus dari penelitian Pangkoptamtib dan Laksuskoptamtibda. Dengan demikian jelas bahwa prinsip pengeluaran dari Daftar tjalon atas dasar pertimbangan politis-ideologis tidak ada.

Ketentuan ini berlaku pula bagi Daerah-daerah.

Pengeluaran nama-nama dari Daftar Tjalon hanya dilakukan apabila:

- a. Tjalon mengundurkan diri;
- b. Tjalon ditarik oleh Organisasi yang mentjalonkan;
- c. Tjalon adalah Pegawai Negeri/Daerah yang njata-njata tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang atau Gubernur Kepala Daerah/Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan;
- d. Karena formulir-formulir kelengkapan pentjalonannya sama sekali tidak ada;
- e. Tjalon-tjalonnya tidak melengkapi/menjempurnakan formulir pentjalonannya sampai batas waktu yang ditentukan ;
- f. Karena ternyata terlibat langsung maupun tidak langsung pembe-

berontakan G-30-S/PKI.

2. **Pertanyaan :**

Perhitungan suara dan pembagian kursi-kursi pada tingkat kedua (stem-bus-accoord) apakah technisnja sudah dapat dipahami betu'-betul oleh Panitia-panitia tingkat I kebawah ?

Untuk itu kami menjarankan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum agar senantiasa diadakan pengetjekan ke Daerah-daerah agar tidak menjulitkan atau menimbulkan kekeliruan.

Djawaban :

Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia baik setjara kontinju dan bekalma mat-pun setjara insidentil setiap kali diperlukan selalu mengadakan checking dan rechecking mengenai pelaksanaan technis peraturan perundangan pemilihan umum dengan mengadakan Rapat-rapat Kerdja Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, briefing-briefing, konsultasi-konsultasi, checking on the spot serta memberikan Pedoman-pedoman/Petunjuk-petunjuk tertulis yang disertai bagan-bagan, chart-chart atau bentuk visualisasi lain.

Dalam hal-hal yang tersebut diatas termasuk djuga mengenai Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pembagian Kursi untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.

Mengenai hal itu bahkan sudah didjelaskan pula dalam Santiadji Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia dalam bulan April 1970 dan kemudian diulangi dan diperdalam Raker-raker berikutnya.

(Dipersilahkan melihat antara lain tabel dalam Buku Bekal Pemilu Halaman 180c yang diterbitkan dalam bulan April 1970).

Pada saat ini oleh Lembaga Pemilihan Umum cq Panitia Pemilihan Indonesia sedang disiapkan pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk yang lebih terperinci lagi bagi petugas-petugas dalam melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara dan ketentuan-ketentuan tentang Pembagian kursi dan lain sebagainya.

13. **Pertanyaan :**

Menurut berita yang kami dengar dari Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat bahwa pemungutan suara pada tanggal 3 Djuli 1971 yang akan datang seolah-olah ada usaha setempat untuk pemungutan suara yang akan diadakan dikantor-kantor Pemerintah atau Djawatan vital. Apabila TPS-TPS akan diadakan dikantor-kantor Pemerintah, hendaknja memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :

1. Tjalon pemilih sekurang-kurangnja 200 orang.
2. Permintaan dibuatnja TPS khusus itu diajukan setjara tertulis kepada PPD II.
3. PPD II yang memutuskan.
4. Prosedure-prosedure administratif (dengan formulir A4) harus dipenuhi.
5. Pegawai-pegawai tetap diberikan kebebasan untuk memilih di kantor atau di TPS-nja sendiri.
6. Sebagaimana di TPS-TPS lain, Parpol supaya diundang mengikuti djalannja pemungutan suara dan penghitungan suara.

Djawaban :

Berdasarkan Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Nomor 56/22/1971 tanggal 14 April 1971 pada prinsipnja dapat dibenarkan penambahan TPS di unit-unit kerdja/kantor vital dan yang dianggap perlu. Karena pembentukan TPS khusus dikantor dan djawatan vital menimbulkan konsekwensi keuangan, maka biaya penambahan TPS tersebut tidak disediakan, dan diadnjurkan agar pihak yang mengajukan permintaan TPS khusus tersebut menjediakan biaya yang diperlukan.

Lokasi TPS diusulkan oleh TPS kepada PPD II dan penentuan lokasi TPS ditentukan oleh PPD II.

Saran agar permintaan TPS khusus diajukan setjara tertulis kepada PPD II dan yang memutuskan PPD II adalah tepat.

Prosedur administratif misalnja penggunaan formulir Model A4 tetap

dipenuhi.

Maksud diadakan TPS khusus ialah agar para pegawai/karyawan yang bersangkutan dapat memberikan suaranya tanpa banjak waktu yang hilang, sehingga setelah memberikan suara dapat segera bekerdja kembali, karena sudah ditentukan bahwa hari Sabtu tanggal 3 Djuli 1971 (hari pemungutan suara) bukan merupakan hari libur.

Pada waktu penghitungan suara di TPS khusus tersebut wakil-wakil Parpol/Golkar akan diundang untuk mengikutinja.

14. Pertanyaan :

Di Kabupaten Bau-Bau Sulawesi Tenggara ada salah seorang Mantri Guru Sekolah Dasar telah menentukan diri Golongan Politik.

Kemudian oleh Inspeksi Sekolah Dasar di Daerah itu diberikan Surat Keputusan kepadanya surat pemetjatan dengan tidak hormat sebagai Guru dari Bupati setempat.

Apakah Saudara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sudah menerima laporan dari Daerah tersebut, mengenai kedjadian di Kabupaten Bau-Bau di Sulawesi Tenggara dan tindakan apakah yang akan dilakukan untuk menghindarkan kesimpang-siuran dalam hal yang serupa ?

Djawaban :

Pertanyaan ini akan dijawab oleh Menteri Dalam Negeri dalam kedudukan bukan sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum, karena persoalan yang ditanjakan tidak menjangkut masalah pemilihan umum.

15. Pertanyaan :

Kepala Desa Bontomansi Kabupaten Bantaeng dengan suratnja tertanggal 17 Pebruari 1971, telah menginstruksikan kepada Guru-guru, sjarat agar tidak meladeni orang-orang yang akan kawin bukan Golkar.

Apakah tindakan tersebut masih djuga dibenarkan.

Djawaban :

Konform tanggapan kami atas pertanyaan nomor 14 diatas, pertanyaan inipun akan dijawab oleh Menteri Dalam Negeri bukan sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum, karena masalahnya tidak menjangkut pemilihan umum.

16. **Pertanyaan :**

Didalam harian "KOMENTAR" jang terbit pada tanggal 14 April 1971 dimuat mengenai terbakarnya barang-barang Pemilihan Umum di Maluku.

Pertanyaan :

- a. Apakah berita tersebut sudah diketahui/sampai kepada Lembaga Pemilihan Umum ?
- b. Barang-barang apa saja jang telah terbakar ?
- c. Apakah kebakaran tersebut tidak berpengaruh pada pelaksanaan Pemilihan Umum jang akan datang ?

Djawaban :

Mengenai terbakarnya barang-barang Pemilihan Umum di Maluku kami djelaskan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 April 1971 kapal Daerah type D.310 jang memuat 36 peti surat suara masing-masing terdiri dari 12 peti surat suara warna kuning, 12 peti surat suara warna putih dan 12 peti surat suara warna biru menurut rentjana akan berangkat uari pelabuhan Tulehu ke Masehi djam 21.00.

Kapal tersebut disamping mengangkut 36 peti surat suara djuga mengangkut sedjumlah lebih kurang 22 orang penumpang.

Sebelum kapal berangkat, pada djam 19.30 terdjadilah kebakaran dikapal tersebut jang tidak dapat diatasi memadamkannya. Kebakaran tersebut terdjadi karena menjalanja bensin satu drum diatas geladak kapal.

Kapal Daerah lain type D.314 jang sedang bergandengan dengan kapal D.310 tersebut segera menjelamatkan diri dengan melepas-

kan tali tambatannya dan berusaha menolong dengan menarik kapal D.310, tetapi gagal karena api telah mendijilat badan-badan kapal dan kemudian tenggelam pada jarak lebih kurang setengah mil dari djembatan Tulehu.

2. Pada tanggal 8 April 1971 Bupati Kepala Daerah Maluku Tengah datang ke Tulehu.
Setelah diadakan pengetjekan kembali ternyata disamping 36 peti surat suara tersebut, djuga terdapat 8.850 lembar surat panggilan (Model G) untuk memberikan suara jang akan dikirim ke TPS Amahai dan sebuah motor tempel 40 pk merk SEA-HORSE.
3. Mengenai sebab-sebab terdjadinja kebakaran tersebut sedang dalam pengusutan instansi jang berwenang.
4. Segera setelah menerima laporan mengenai peristiwa tersebut, Lembaga Pemilihan Umum pada tanggal 13 April 1971 telah mengirimkan ke PPD I Maluku 36 peti surat suara sebagai pengganti surat suara jang hilang terbakar tersebut.
5. Untuk mentjegah djangan sampai terdjadi lagi kehilangan/kerusakan surat-surat suara dan barang-barang pemilihan umum lainnya seperti dalam peristiwa tersebut, kepada Daerah-daerah telah diinstruksikan agar diperhatikan pengamanan penjinpanannya (Kawat No. 189/11/1971 tanggal 17 April 1971).

Demikian djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran saudara-saudara jang terhormat.

Terima kasih.

Djakarta, 26 April 1971

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

t.t.d.

AMIRMACHMUD

263

DJAWABAN DAN TANGGAPAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN DAN LAPORAN
JANG DIADJUKAN OLEH KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA
TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PIMPINAN KOMISI III
DPR-GR TANGGAL 22 MEI 1971 NOMOR : C1.10/K/1391/DPR-GR/1971

**DJAWARAN DAN TANGGAPAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANJAAN—PERTANJAAN/SARAN—SARAN
DAN LAPORAN JANG DIADJUKAN OLEH KOMISI III DPR-
GR SEBAGAIMANA TERTJANTUM DALAM LAMPIRAN SU-
RAT PIMPINAN KOMISI III DPR-GR TANGGAL 22 MEI 1971
NOMOR C1.10/K/1391/DPRGR/1971.**

Bersama ini disampaikan dengan hormat djawaban dan tanggapan kami atas pertanjaan-pertanjaan/saran-saran serta laporan mengenai hal-hal jang menjangkut pelaksanaan persiapan pemilihan umum dibeberapa daerah jang diadjukan oleh Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal 22 Mei 1971 Nomor : C1.10/K/1391/DPRGR/1971 sebagai berikut :

A. Pertanjaan :

1. Menjambung pertanjaan Nomor 1 (pertanjaan tertulis dalam rapat kerdja pada tanggal 26 April 1971) apakah Lembaga Pemilihan Umum sudah menerima Daftar Tjalon Tetap dari P.N.I. Tjbang Subang — Purwakarta?
Oleh karena persjaratan jang dimintakan oleh Panitia Peneliti Tingkat II Subang — Purwakarta sudah dipenuhi dan segala per-

soalan terhadap P.N.I. Tjabang Subang – Purwakarta sudah clear dan mendapatkan penjelesaian oleh pihak Penguasa setempat baik tingkat KODIM maupun KOREM sebagaimana yang telah diutarakan dalam rapat kerdja Komisi III DPR-GR dengan Lembaga Pemilihan Umum pada tanggal 26 April 1971, apakah P.N.I. Tjabang Subang – Purwakarta itu masih diperbolehkan mengajukan Daftar Tjalon susulan ?

Djawaban :

Untuk memperdijelas djawaban kami pada tanggal 26 April 1971, dengan ini kami terangkan persoalan P.N.I. dalam proses pentja'lonan pemilihan anggota DPRD II Kabupaten Subang dan Purwakarta sebagai berikut :

- (a). Pada tanggal 13 Nopember 1970 tokoh-tokoh P.N.I. – D.P.D. Djawa Barat, antara lain Saudara Drs. Popo, Endang Karman, Nana Sukanta dan Utji Diredja (Subang) menemui DANDIM Subang dengan maksud untuk mendirikan kembali P.N.I. Tjabang Subang yang telah dua kali membubarkan diri.
Dalam hal ini DANDIM Subang menegaskan bahwa persoalan P.N.I. adalah persoalan intern partai dan Pemerintah Daerah Subang tidak akan menghalang-halangi apabila ada sesuatu Organisasi akan membentuk Tjabang-tjabangnja di Daerah sepanjang sjarat-sjarat dalam peraturan perundangan telah dipenuhi.
- (b). Pada tanggal 24 Desember 1970 Pimpinan Daerah P.N.I. Djawa-Barat disertai tokoh-tokoh P.N.I. Kabupaten Subang dan Purwakarta menemui DANDIM Subang kembali dan sekali lagi DANDIM mendjelaskan sebagaimana diuraikan diatas.
- (c). Pada tanggal 7 Pebruari 1971 P.N.I. Tjabang Subang sesuai dengan persetudjuan dari LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA Djawa

Barat melakukan pelantikan anak-anak Tjabangnja, yakni Pemanukan, Pegaden, Subang dan Kalidjati bertempat di Wisma Karya di Subang. Dalam pelantikan tersebut ternyata unsur Pimpinan dari Kalidjati tidak hadir.

Oleh Pimpinan P.N.I. Tjabang Subang dinjatakan bahwa pelantikan tersebut adalah sebagai realisasi hasil approach dengan DANDIM Subang – Purwakarta pada tanggal 24 Desember 1970. Setelah pelantikan tersebut DANDIM Subang menerima pernyataan-pernyataan dari unsur-unsur Pimpinan P.N.I. anak Tjabang Subang ialah Saudara Sukib dan Saudara Suchjar (Anak Tjabang Djabong) serta Saudara Turkim (Anak Tjabang Selahaur) yang disampaikan dengan suratnya tanggal 3 Pebruari 1971.

Ketiga unsur Pimpinan P.N.I. adalah tidak sepengetahuannya dan setjara tegas menolak penundjukkannya, tetapi oleh P.N.I. Tjabang Subang namanja tetap dimasukkan.

- (d). Pada tanggal 12 April 1971 DANDIM Subang – Purwakarta menerima Pimpinan P.N.I. Tjabang Purwakarta dan Subang antara lain Saudara Helmi (Purwakarta) dan Saudara Erman Masnadikarta (Subang) yang membawa dan menjerahkan daftar nama-nama anggota Tjabangnja.

Setelah daftar tersebut diterima dan kemudian diteliti oleh KODIM Subang – Purwakarta ternyata nama-nama yang tertjartum dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan sikap/kesediaan orang-orangnja, antara lain adanya surat-surat pernyataan dari orang-orang yang bersangkutan yang menerangkan bahwa tidak tahu menahu bahkan menolak dengan tegas ditjantumkannya menjadi anggota P.N.I.

- (e). DANDIM Subang - Purwakarta dengan suratnya tanggal 19 April 1971 Nomor R.012-5/4/1971 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah/Ketua PPD II Subang menjampaikan daftar tjalon P.N.I. Tjabang Subang untuk keanggotaan DPRD II Subang

sedjumlah 7 orang, jaitu Saudara M.O. Wiriasmita, E. Utjidiredja, Ana Rodjak, Erman Masnadikarta, Iding Sukara, Suchrin Martadiredja dan Drs. Hasanudin, dengan tjatatan pula bahwa "clearance" dari LAKSUS KOPKAMTIBDA Djawa Barat sudah ada, tetapi oleh DANDIM Subang - Purwakarta belum dapat dilaksanakan berhubung dengan persjaratan untuk eksistensi setjara riil bagi P.N.I. Tjabang Subang belum dipenuhi.

- (f). Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 jang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 telah ditingkatkan menjadi Undang-undang dan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1970 jang untuk djelasnja bersama ini kami lampirkan, maka sjarat-sjarat untuk pembentukan Tjabang suatu Organisasi belum dapat dipenuhi (jakni eksistensi setjara riil/living reality) dan oleh karenanja belum dapat diterima oleh Pemerintah Daerah setempat.

Nama-nama jang berdjumlah 50 orang jang ditjantumkan sebagai anggota Tjabang anggota-anggota P.N.I. Subang dan Purwakarta baru disampaikan kepada jang berwadjab pada tanggal 13 April 1971 (surat tersebut dan lampirannja bersama in kami lampirkan), sehingga melampaui batas waktu pentjalonan jang ditentukan (25 Pebruari 1971).

Berhubung dengan itu, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk mengadjukan susulan Daftar Tjalon.

2. Pertanyaan :

Sehubungan dengan pertanyaan Komisi III DPR-GR Nomor 9 jang diadakan dalam rapat kerdja tanggal 26 April 1971 kami ingin menanyakan lebih landjut penentuan tjalon terpilih itu apakah berdasarkan formulir B-1 ataukah B-2 ?

Djawaban :

Djawaban kami atas pertanyaan ini sesuai dengan djawaban kami pada

tanggal 26 April 1971 terhadap pertanyaan Nomor 9.

Sekali lagi kami jelaskan bahwa sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 1969 dan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1970, maka untuk menentukan tjalon yang akan dinjatakan terpilih untuk pemilihan anggota DPR, yang dipergunakan sebagai pedoman ialah Daftar Tjalon menurut formulir Model B-2, yaitu Lampiran Daftar Tjalon Tetap Pemilihan Anggota DPR (alokasi) Daerah Tingkat II (Lampiran Model F-1).

Untuk lebih djelasnja dipersilahkan Saudara anggota yang terhormat mempeladjadi kembali djawaban kami tanggal 26 April 1971 tersebut.

3. Pertanyaan :

Pada tanggal 3 April 1971 yang lalu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan Let.Kol. K. Mas'ud) dalam briefingnja kepada Kepala-kepala Desa, Ketua-ketua R.K., Pemuka-pemuka Masjarakat di Ketjamatan Pallangga/Gowa, menjatakan bahwa bilik (tempat) pentjoblosan surat suara nanti terpisah antara bilik untuk pemilihan Golkar dan bilik untuk pemilihan Parpol.

- a. Apakah benar bahwa ada pemisahan termaksud ?
- b. Kalau benar tidakkah pemisahan termaksud telah menghilangkan sifat rahasia dan sifat bebas dalam pemilihan.
- c. Kalau tidak harap briefing Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan dikoreksi.

Djawaban :

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan pemilihan umum yang ada, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 maupun instruksi-instruksi pelaksanaannja, tidak pernah ada ketentuan bahwa dalam pemungutan suara akan diadakan pemisahan bilik-bilik Pemberian Suara untuk memilih tjalon-tjalon dari Parpol dan Golkar, sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan Saudara anggota yang terhormat.

Sebagaimana diketahui tiap Tempat Pemungutan Suara rata-rata melajani 200 sampai dengan 300 pemilih.

Urutan untuk mentjoblos didasarkan atas urutan sipemilih datang di Tempat Pemungutan Suara, jaitu dengan memberikan nomor urut pada Surat Panggilannya.

Untuk mempertjepat pemberian suara, maka berdasarkan pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970, apabila perlu di TPS dapat diadakan lebih dari satu bilik Pemberian Suara menurut kebutuhan dengan berpedoman lebih kurang untuk 100 orang pemilih disediakan satu Bilik Pemberian Suara.

Penambahan Bilik Pemberian Suara tersebut diperuntukkan pula baik untuk memilih tjalon-tjalon dari Papol maupun Golkar setjara bersama-sama.

Kepada Ketua PPD I jang bersangkutan telah dikirimkan kawat tertanggal 3 Djuni 1971, No. 250/11/1971, agar tjara pembuatan Bilik Pemberian Suara dan tata-tjara pemberian suara tidak menjimpang dari peraturan jang berlaku.

Selandjutnja untuk penentuan persjaratan Bilik Pemberian Suara diperlihatkan Saudara anggota jang terhormat membatja Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Nomor 2/PPI/Tahun 1971.

4. Pertanyaan :

Di Ketjamatan Pammana Kabupaten Wadjo Sulawesi Selatan seorang Bintara Pembina Desa telah mensita satu Kalender jang bergambar Bulan-Bintang dan mengeluarkan (menggunting) tanda gambar itu serta merobek-robeknja dengan kata-kata "Ini sudah kampanye sebelum waktunya dan tanda-tanda gambar itu adalah tanda gambar jang melawan Pemerintah".

Kalau dengan memiliki Kalender bergambar Bulan-Bintang sudah dianggap kampanye sebelum waktunya (tanggal 27 April 1971 djam 00.00) dan harus dilarang, maka :

- a. Bagaimana pendapat Lembaga Pemilihan Umum terhadap pemasangan papan-papan tanda gambar dalam ukuran besar dari Golkar didjalan dalam Kota Makasar pada tanggal 16 April 1971 setjara

serentak ?

- b. Menjatakan bahwa suatu tanda gambar adalah dari golongan jang melawan Pemerintah.
Apakah tjara itu bukan suatu intimidasi, fitnahan dan penghinaan terhadap golongan itu ?
- c. Mohon tindakan Pembina Desa teisebut dikoreksi.

Djawaban :

Pada prinsipnja tiap pemasangan papan tanda gambar Organisasi dalam rangka kampanye sebelum waktu jang ditetapkan (tanggal 27 April 1971 djam 00.00, jaitu permulaan masa kampanye), tidak dibenarkan. Khusus mengenai kedjadian jang dikemukakan oleh Saudara anggota jang terhormat dikota Makasar akan kami check lebih landjut, demikian pula mengenai utjapan dan tindakan Bintara Pembina Desa tersebut akan kami teruskan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk mendapat penjelesaian seperlunja. Karena satu Ketjamatan itu terdiri dari banjak desa, maka guna memudahkan pengechekkan kina-nja Saudara anggota D.P.R. jang terhormat dapat memberikan keterangan tentang : Nama/Pangkat Babinsa jang bersangkutan dan nama Desa-nja serta tanggal kedjadian tersebut.

5. Pertanjaan :

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Pemilihan Umum sudah semakin dekat waktunja.

Berhubung dengan itu kami ingin tanjakan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri/Selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum :

Apakah usaha-usaha Pemerintah untuk mentjegah adanja aktivitas oknum-oknum ABRI/HANSIP baik dengan pakaian dinas maupun pakaian sipil jang mempengaruhi dengan tjara-tjara halus atau kasar agar rakjat masuk golongan atau menusuk tanda gambar tertentu?

Djawaban :

Dengan memperhatikan pembedangan tugas antar Departemen, maka persoalan yang Saudara ajukan akan kami teruskan ke Departemen Pertahanan Keamanan.

6. Pertanyaan :

Hasil yang terakhir dari LAKSUS/PPD I sebagai Tjalon Tetap dari 11 orang tjalon Golkar di Daerah Kabupaten Teluk Tjenderawasih Propinsi Irian Barat hanya satu orang yang ditjoret (dikeluarkan dari Daftar Tjalon).

Lainnya disetudji, sedang dari :

- P.N.I. 3 orang ditjoret dan hanya 1 orang disetudji
- N.U. tidak ada yang ditjoret dan 2 orang disetudji
- PARKINDO semua ditjoret.
- KATOLIK semua ditjoret.
- PARMUSI semua ditjoret.
- P.S.I.I. semua ditjoret.

Dapatkan Pemerintah (Saudara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum) memberikan penjelasan/keterangan mengapa sampai terjdadi demikian ?

Djawaban :

Pertanyaan ini tidak begitu jelas, tetapi kami dapat menduga bahwa tentunya yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah persoalan pemilihan anggota DPRD II, sebab untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD I jumlah tjalon yang dapat diajukan oleh tiap Organisasi/Kesatuan Masyarakat untuk tiap Daerah Pemilihan adalah sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah wakil yang ditentukan untuk Daerah Pemilihan yang bersangkutan, yaitu setiap Daerah Pemilihan (Daerah Tingkat II) diwakili seorang wakil untuk DPR dan untuk DPRD I sebanyak djatah yang ditetapkan untuk masing-masing Daerah Pemilihan.

Persoalan pengeluaran tjalon-tjalon anggota DPRD dari Daftar Tjalon adalah wewenang penuh Ketua Panitia Pemilihan Daerah yang bersang-

kutan berdasarkan hasil penelitian dari Panitia Peneliti Daerah dan LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA.

Sebagai tambahan, khusus mengenai pentjalonan anggota DPR dari Daerah Irian Barat untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 10/PPI/Tahun 1971 tanggal 24 Mei 1971, telah disahkan dan diumumkan dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 47 Tahun 1971 Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan anggota DPR dari Daerah Irian Barat untuk tiap-tiap Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II, jang bersama ini kami lampirkan.

Kami mengharapkan keterangan lebih lanjut tentang :

- Berapa jang diajukan dan berapa jang ditjoret.
- Siapa nama jang ditjoret?
- Keterangan-keterangan tersebut diperlukan untuk memudahkan checking dan untuk memperlengkapi pertanyaan hingga tidak menimbulkan impressie jang keliru.

7. Pertanyaan :

Didaerah-daerah terdjadi hal-hal jang tidak memungkinkan Parpol memberikan penggantian tjalon-tjalon :

a. Di Sumba Timur.

Pemberitahuan kepada Parpol-parpol di Sumba Timur tentang laranganpentjalonan oleh Parpol-parpol bagi pegawai Departemen Dalam Negeri diterima tanggal 24 Pebruari 1971 atau satu hari sesudah penutupan pentjalonan sehingga tidak dapat mengganti.

b. Di Kalimantan Timur.

Pemberitahuan penolakan diterima oleh Gubernur Kepala Daerah pada hari penutupan perbaikan Daftar Tjalon tanggal 13 Pebruari 1971 sehingga tidak ada waktu mengganti.

c. Di Kalimantan Timur djuga pegawai-pegawai bukan Otonom ada

jang ditolak pentjalonannja dengan alasan tidak ada idjin, sedang batas persetudjuan Instansi tanggal 17 Maret 1971.

Karena hal tersebut diatas letak kesalahannja ada pada Instansi Pemerintah apakah dalam hal-hal seperti itu masih ada kemungkinan/kesempatan untuk mengajukan susulan Daftar Tjalon?

Djawaban :

Berhubung dengan telah disahkan dan diumumkannja Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II (tanggal 20 April 1971) maka tidak dimungkinkan lagi mengajukan susulan Daftar Tjalon.

Apabila sesuatu Organisasi di Daerah ikut pemilihan umum dan ada beberapa tjalonnja jang dikeluarkan dari Daftar Tjalon karena antara lain tidak memperoleh idjin, dan kemudian Organisasi tersebut memperoleh sedjumlah kursi jang lebih besar daripada tjalon jang diadakan, maka sesuai dengan pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 Organisasi itu dapat mengajukan Daftar Tjalon Susulan.

8. Pertanyaan :

Dasar atau segi hukum apakah jang digunakan oleh Pemerintah untuk mengadakan de-parpolisasi jang sekarang berdjalan bagi Pegawai Negeri?

Djawaban :

Analoog dengan djawaban kami pada tanggal 26 September 1970 terhadap pertanyaan anggota-anggota DPR jang terhormat Saudara T.B. Anis Fuad S.M. dan kawan-kawannja, maka tjukup djelaslah kiranja bahwa usaha daripada Pemerintah adalah untuk mentjegah agar seorang pedjabat negeri dalam melaksanakan tugasnja tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik jang tidak sesuai dengan martabat dan kedudukannja sebagai pegawai negeri.

Dasar pemikiran daripada usaha tersebut adalah karena sangat besarnja peranan pedjabat negeri dalam mewujudkan stabilisasi Nasional dan pembangunan jang disebabkan oleh kedudukan pedjabat negara tersebut

sebagai pelaksana-pelaksana kebidjaksanaan Pemerintah, jang dalam kedudukannya sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintah itu wadjiblah tiap pedjabat negeri tetap berdiri diatas semua kepentingan golongan, agar dengan demikian dapat diwujudkan prinsip "strong, stable and clean government".

Maka bagi pedjabat negeri tidaklah ada alternatif lain, ketjuali setjara konsekwen melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai aparatur Pemerintah dan berpegang teguh kepada semangat dan norma-norma Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan memahami benar-benar tudjuan-tudjuan Nasional dan tjara-tjara mentjapainja.

9. Pertanyaan :

Apakah organisasi Golongan Karya dapat disamakan dengan Pemerintah dan Pemerintah sama dengan Golkar, karena pegawai-pegawai Pemerintah dengan menggunakan kedudukan dan alat-alat atau pasilitas Pemerintah melakukan Kampanje untuk Golkar.

Djawaban :

Organisasi Golongan Karya tidak dapat disamakan dengan Pemerintah tetapi Organisasi Golongan Karya adalah Organisasi jang dalam kedudukan dan peranannya sebagai kekuatan sosial politik sama dengan organisasi-organisasi Golongan Politik.

Pemerintah tidak pernah mengeluarkan peraturan tentang pegawai-pegawai negeri jang berkampanje dengan menggunakan kedudukannya sebagai pegawai negeri serta menggunakan alat-alat/fasilitas Pemerintah.

10. Pertanyaan :

Saudara Sumono Hadisubroto B.Sc. Pegawai kantor Urusan Perumahan Kotamadya Surabaya, mula-mula diidjinkan oleh Walikota untuk ditjalonkan oleh P.N.I. sebagai Anggota DPRD Tingkat II sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 24 Pebruari 1971 (salinan terlampir). Tetapi kemudian dengan surat Keputusan No. 119/U.P. tanggal 28 April 1971 ia diberhentikan karena ditjalonkan oleh P.N.I.

Dapatkah Pemerintah memberikan pendjelasan atas kedjadian ini?

Djawaban :

Sesuai dengan surat keterangan dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 24 Pebruari 1971, bahwasanja Saudara R. Sumono Hadisubroto B.Sc. bersedia untuk diberhentikan dari djabatannja sebagai karyawan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya apabila ditjalonkan, maka atas dasar pernjataan tersebut jang bersangkutan di – berhentikan dari djabatannja.

11. Pertanyaan :

Tanggal 28 Maret 1971 Kepala Ketjamatan Tambariri di Daerah Propinsi Sulawesi Utara memberhentikan seorang Kepala S.M.P. Keresten bersubsidi dengan alasan melanggar Peraturan Pemerintah No. 6/1970, melanggar monolojalitas dengan bukti-bukti ia masih berpartai dan menjadi tjalon Partai dalam Pemilihan Umum.

Menurut pendapat kami :

- a. Kepala Ketjamatan bukanlah Kepala Daerah Otonom.
- b. Peraturan Pemerintah No. 6/1970 tidaklah mengatur "monolojalitas".
- c. Pemberhentian Guru Sekolah Landjutan adalah wewenang Departemen P & K. Sebab Sekolah Landjutan sampai sekarang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik in Otonom maupun in medebewind.
- d. Djadi ada 3 kesalahan.

Berhubung dengan kedjadian-kedjadian tersebut diatas kami ingin mendapat pendjelasan/keterangan dari Pemerintah (Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum) sampai dimanakah kebenarannja, dan apabila benar, usaha tindakan apakah jang dilakukan Pemerintah untuk menertibkan ?

Djawaban :

Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara telah kami instruksikan untuk mengadakan penertiban kembali dengan kawat tertanggal 3 Djuni 1971 No. 251/11/1971.

12. Pertanyaan :

Di Tjiparaj Bandung Ketua R.T. dan Ketua R.W. diharuskan masuk Golkar dan harus menanda-tangani pernyataan seperti terdjadi di Tjiparaj.

Apabila mereka tidak mau menanda-tangani surat pernyataan, maka mereka diberi formulir pengunduran diri sebagai Ketua R.T. atau Ketua R.W. dan formulir tersebut harus diserahkan kepada Kepala Desa, Ketua Golkar desa dan Koramil setempat. Kalau didasarkan pada "monoloyalitas" maka Ketua R.T. dan Ketua R.W. tidak dapat diminta, karena mereka bukan Pegawai Negeri.

Apakah hal tersebut dapat dibenarkan ?

Kalau tidak apakah tindakan Pemerintah untuk menertibkannya ?

Djawaban :

Dalam praktek kehidupan sosial dinegara kita sudah diakui bahwasanja Pengurus R.T. dan R.W. merupakan aparat penjalur terbawah kebidjaksanaan Pemerintah kepada masjarakat dan penampung aspirasi masjarakat.

Oleh karenanja diharapkan agar mereka bersikap loyaal terhadap kebidjaksanaan dan tindakan Pemerintah.

B. SARAN-SARAN

1. Saran :

Ada suatu kejadian di Kabupaten Sungai Ulu Ketjamatan Pendawan Kalimantan Selatan, seorang Pedjabat Daerah dari Golkar memberikan informasi kepada pemuka masjarakat diketjamatan, mengatakan bahwa Oknum-oknum Golkar jang tidak menyusuk tanda gambar (memilih tanda gambar Golkar) akan dipetjat da-

ri djabatannja.

Diminta kepada Lembaga Pemilihan Umum agar membuat surat edaran yang melarang adanya antjaman-antjaman seperti itu.

Tanggapan :

Azas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas dan rahasia, sehingga sipemilih memberikan suaranya/mentjoblos surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh siapapun.

Saran dari Saudara yang terhormat yang berhubungan dengan kasus yang terdjadi di Ketjamatan Pendawan Kalimantan Selatan, mendapat perhatian kami sepenuhnya.

2. Saran :

Menurut siaran R.R.I. tanggal 6 Pebruari 1971 djam 07.00 W.I.B. bahwa di Djawa Tengah ada bandjir dan didaerah bandjir tersebut akan diadakan T.P.S. Mobil (T.P.S. keliling).

Oleh karena bandjir sudah tidak ada dan karena urgensi untuk mengadakan T.P.S. Mobil dengan sendirinja sudah tidak ada lagi, hendaknja keputusan memperkenankan adanya T.P.S. Mobil tersebut ditindjau kembali.

Tanggapan :

T.P.S. Mobil sedjumlah 67 buah yang sudah ditentukan hanya akan diadakan di Kabupaten Bulongan Propinsi Kalimantan Timur dan 417 buah untuk Daerah Irian Barat didasarkan atas pertimbangan keadaan geografis dan demografis didaerah tersebut serta tidak tersedianja tenaga-tenaga K.P.P.S.

Lembaga Pemilihan Umum tidak pernah merentjanakan bahwa di Djawa Tengah akan diadakan T.P.S. Mobil tersendiri didaerah yang terkena bandjir.

Apabila disesuatu Daerah pada saat pemungutan suara mengalami bentjana alam, misalnja bandjir sehingga para pemilih tidak dapat mendatangi T.P.S.-T.P.S., maka ada beberapa kemungkinan

untuk mengatasinya jaitu dapat diadakan pemungutan suara lanjutan atau ulangan atau susulan (lihat Pedoman Ketua P.P.I. No. 3/PPI/1971), atau apabila keadaan tidak dapat diatasi dengan tjara-tjara tersebut diatas baru diadakan T.P.S. Mobil.

C. LAPORAN PERISTIWA-PERISTIWA DARI DAERAH

Terlebih dahulu kami jelaskan bahwa susunan nomor urut tidak sesuai dengan daftar pertanyaan/saran/laporan dari Komisi-III, karena untuk mempraktikkan dalam menjusun tanggapan terhadap laporan-laporan diadakan pengelompokan permasalahan, tanpa mengurangi isi dari laporan-laporan dari Saudara-saudara jang terhormat.

1. Di Daerah Wonogiri.

Didesa Semen Ketjamatan Djatisrono Kabupaten Wonogiri terdjadi tekanan dan paksaan serta penganiayaan terhadap orang bernama Suratno dan Sujat pada tanggal 27 dan 28 April 1971 oleh Koptu Samin dan Kamtib dari Jon 413 Kompi C dan Peltu Kasibun Dan Ramil Djatisrono.

Dalam peristiwa itu Koptu Samin melepaskan tembakan tiga kali dan menjuruh Kepala Desa membunjikan bunji kentongan.

2. Di Daerah Kabupaten Bojolali.

Pada tanggal 30 Maret 1971 terdjadi penganiayaan terhadap orang bernama Kaolan Kepala Pendidikan Masjarakat P & K Ketjamatan Banjudono oleh Letda (Pelda?) Samadi, karena Kaolan membawa tanda gambar P.N.I.

Kedjadian dikantor KODIM Bojolali.

3. Tjamat dan Komandan Koramil Ketjamatan Sawit Kabupaten Bojolali menurunkan papan tanda gambar P.N.I. Anak Tjabang Ketjamatan Sawit.

4. Di Daerah Djawa Barat ada tindakan :

1. Pengrusakan papan nama P.N.I. di Tjibadak terjadi pada tanggal 10 bulan dan tanggal 4 bulan 4 - 1971 oleh Peltu Superman.
2. Pemasangan tanda gambar "beringin" setjara paksa pada kendaraan yang lewat oleh HANSIP akan membawa suasana keruh.
3. Di Djonggol/Bogor Parpol-parpol tidak boleh berkampanje dan kepada P.N.I. ada tambahannya jaitu dengan disertai penodongan oleh petugas Koramil dengan antjaman : "P.N.I. menang atau kalah akan kami bunuh".
- 8.4. Madiun beberapa ranting Parkindo Kotamadya Madiun di-Golkar-kan oleh Kodim.
- 8.7. Pemaksaan masuk Golkar dan pemaksaan/penahanan terhadap petugas Bala keselamatan di Ketjamatan Pasang kaju Kabupaten Mamudju Sulawesi Tengah bulan Pebruari 1971 oleh oknum-oknum ABRI.
 Bentuk-bentuk : — harus mengambil kartu Anggota Golkar,
 — jang tidak mau diusir sebagai penduduk,
 — pemukulan dilakukan,
 — Guru-guru Bala keselamatan jang tidak mau diusir kekampung Simpulia Ketjamatan Heiwela Kabupaten Donggala,
 — opsir Bala keselamatan jang mendjadi tempat bertanja masjarakat setempat ditangkap dan ditahan.
- 8.12. Di Pulau Nias orang-orang Parkindo diwadajibkan lapor dan

terjadi penahanan-penahanan yang tidak wajar.

- 8.13. Pendeta Z. Nainggolan di Pakat, ditampar Kodim karena tidak mau masuk Golkar.
- 8.14. Di Rantepau Sulawesi Selatan ada pasar yang dapat ditjapai dengan dua jembatan/djalan : setiap orang mau masuk ke pasar harus menjatakan diri masuk Golkar.
Pada suatu kali salah satu orang tidak mau menjatakan diri masuk Golkar, yang oleh Kodim setempat orang tersebut ditampar.
Setelah diteliti orang tersebut adalah Anggota DPRD dari Parkindo dan karenanya Kodim minta maaf.

Tanggapan :

Kami utjapkan terima kasih atas laporan-laporan dari Saudara yang terhormat yang telah disampaikan kepada Pemerintah, dan akan kami teruskan ke Departemen HANKAM untuk ditanggapinja.

5. Laporan :

Didaerah Kabupaten Kudus.

Kepala Desa Abu Chasan dari desa Babo, Masito dari Karangmalang, dan Abdoel Rachman dari Kauman, diberhentikan sementara dari djabatan mereka oleh Bupati Kepala Daerah Kudus karena diragukan iktikat baiknja dalam mendjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tidak/kurang taat kepada pemerintahan atasan.
Sebetulnja hanya karena tidak mau menanda tangani pertanjaan "mono-lojalitas."

Tanggapan :

Kepala Desa sebagai pelaksana terbawah kebidjaksanaan Pemerintah

diharapkan agar lojal kepada politik Pemerintah sebab tanpa lojalitas itu tidak satu programpun dari pemerintah akan dapat terlaksana. Apabila seorang pedjabat tidak dapat lojal terhadap pemerintah karena kejakinan pribadinja dan sebagai pedjabat negeri tidak dapat membenarkan hal jang harus ia kerdjakan, maka lebih baik ia keluar dari dinas pemerintah, atau dengan perkataan lain berhenti sebagai pedjabat negeri.

Karena apabila ia tidak berhenti ia hanja akan menghambat pelaksanaan kebidjaksanaan pemerintah.

Tindakan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kudus adalah merupakan tindakan administratif jang menurut hukum mendjadi kewenangannja.

6. Laporan :

Didaerah Djawa Timur.

Di Kabupaten Djember ada pegawai negeri (bukan Otonom) jang ditjalonkan oleh Parpol, Bupati Kepala Daerah minta kepada Parpol jang bersangkutan :

- a. agar tjalon jang bersangkutan digeser kebawah,
- b. agar Parpol jang membuat pernjjataan tertulis, apabila Parpol tersebut mendapatkan hasil sedjumlah kursi sama dengan djumlah tjalon, maka terpilih jang digeser tadi harus direcall dan diganti dengan tjalon baru.

Tanggapan :

Ada kemungkinan bahwa pegawai negeri jang ditjalonkan oleh Parpol tersebut terkena alasan politis-ideologis berdasarkan Keputusan LAK-SUS KOPKAMTIBDA, sehingga sesuai dengan kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 131/11/1971 tanggal 6 Maret 1971 jang bersangkutan tetap dimasukkan dalam Daftar Tjalon dengan ketentuan nomor urutnja digeser kenomor urut dibawah nama-

nama tjalon-tjalon jang lulus dari penelitian LAKSUS KOPKAMTIBDA. Tersebut ad b akan dicheck kebenarannja.

Laporan :

Didaerah Sulawesi Selatan.

Pegawai-pegawai Otonom jang ditjalonkan oleh Parpol harus menang-gung resiko.

Tanggapan :

Pegawai Negeri jang ditjalonkan dapat tidak disetudjui oleh Pedjabat jang berwenang atas dasar kepentingan kedinasan.

Pegawai Negeri jang ditjalonkan dan tidak disetudjui, tetapi jang ber-sangkutan tetap minta dimasukkan dalam Daftar Tjalon dapat tetap dimasukkan dalam Daftar Tjalon dengan konsekwensi dapat diambil tindakan administratif karena mengabaikan disiplin dan norma-norma kepegawaian.

8.1. Laporan :

Tjamat Numfor Kabupaten Biak (Irian Barat) mengumumkan bahwa Parkindo sudah bubar.

Tanggapan :

Sesuai dengan laporan Saudara anggota jang terhormat, Tjamat Numfor hanja mengumumkan pembubaran Parkindo.

Kemungkinan pembubaran tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa partai tersebut telah membubarkan diri.

Laporan :

- 8.2** Didesa Pudjihardjo dan Swaru terdapat dua Djama'at Keristen Kabupaten Malang, melalui Tjamat, Koramil, Kepala Desa, 10.000 Umat Keristen dimasukkan Golkar.

- 8.3. W.N.I. keturunan Tionghoa (Tjina) di Probolinggo diwajibkan menandatangani formulir kesetiaan kepada Golkar dengan djalan dikumpulkan.
- 8.5. Dilaporkan dari Lampung bahwa banjak Desa jang mengumpulkan kartu penduduk dan dibubuhi stempel Golkar.
- 8.8. Surat keterangan bepergian dan lain-lain hanja diberikan oleh jang¹ berwenang apabila sudah menanda-tangani pernjataan sebagai penduduk Golkar KOKARMINDAGRI/PERTIWI; di Simalungun.
- 8.9. Pemberian pupuk hanja diberikan dengan sjarat seperti tersebut nomor 8.8.
- 8.10. Idjin penggilingan padi bisa ditjabut apabila tidak berbuat seperti nomor 8.8. dan 8.9.
- 8.11. Pemasangan papan nama Organisasi Golkar dikantor-kantor Instansi Pemerintah dimana Organisasi lain tidak mungkin memasang.

Tanggapan :

Terima kasih atas informasi Saudara anggota jang terhormat dan akan kami check kebenarannya.

8.6. Laporan :

Di Sumatera Utara pendaftaran KOKARMINDAGRI/PERTIWI dan simpatisan menjebut kesediaan untuk menusuk tanda gambar pohon beringin : Di Tandjungbalai, Simalungun dan lain-lain.

Tanggapan :

Keanggotaan KOKARMINDAGRI/PERTIWI menggunakan sistim pasip.

Bagi mereka yang menaruh simpati terhadap KOKARMINDAGRI/ PERTIWI dapat sadja menjatakan setjara sukarela akan menusuk tanda gambar pohon beringin.

8.15. Laporan :

Tanggal 3 April 1971 Departemen Penerangan mengadakan penjelasan atau briefing tentang Pemilihan Umum kepada Pegawai-pegawainja sebanjak 300 orang. Dalam briefing tersebut para pegawai disuruh mengisi formulir Partai mana jang akan dipilih dalam Pemilihan Umum nanti.

Setelah para Pegawai mengadakan protes maka pengisian formulir tersebut dibatalkan.

Tanggapan :

Laporan dari Saudara jang terhormat jang berhubungan dengan persoalan di Departemen Penerangan akan kami teruskan ke Departemen jang bersangkutan untuk ditanggapi.

Demikian djawaban dan tanggapan kami terhadap pertanjan-pertanjan/saran-saran dan laporan Saudara-saudara jang terhormat.

Terima kasih.

Djakarta, 11 Djuni 1971.-

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

DJAWABAN DAN TANGGAPAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ATAS PERTANJAAN-PERTANJAAN/SARAN-SARAN DAN LAPORAN
JANG DIADJUKAN OLEH KOMISI III DPR-GR
PADA TANGGAL 24 MEI 1971

**DJAWABAN DAN TANGGAPAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM ATAS PERTANJAAN—PERTANJAAN
/SARAN-SARAN DAN LAPORAN JANG DIADJUKAN OLEH
KOMISI III DPR-GR PADA TANGGAL
24 MEI 1971**

Bersama ini disampaikan dengan hormat djawaban dan tanggapan kami atas pertanyaan-pertanyaan/saran-saran serta laporan tambahan mengenai hal-hal jang menjangkut pelaksanaan pemilihan umum dibeberapa daerah jang diadjukan oleh Komisi III DPR-GR pada tanggal 24 Mei 1971 sebagai berikut :

A. PERTANJAAN

1. Pertanjaan :

Djawa Barat :

Di Kabupaten Bogor, Tjiandjur dan Sukabumi kampanye (vide keputusan Korem) hanja berlaku selama enam hari sehingga pada waktu utusan DPP-PNI datang kesuatu Ketjamatan untuk berkampanje tidak diperkenankan oleh fihak jang berwenang.

Apakah tindakan Korem tersebut bisa dibenarkan ?

Di Subang dan Purwakarta dan disuatu Ketjamatan di Tjiandjur P.N.I. dilarang mengadakan kampanje oleh Pedjabat setempat, didaerah tersebut sudah ditjairkan.

Mengharap pihak Lembaga Pemilihan Umum turun tangan.

Djawaban :

- a. Sesuai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, maka masa kampanye berlangsung selama 60 hari dan berakhir 7 hari sebelum pemungutan suara diadakan (tanggal 27 April 1971 sampai dengan tanggal 25 Juni 1971 jam 24.00).

Mengenai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bogor, Tjandjur dan Sukabumi akan kami teruskan ke Departemen Hankam. Untuk men-check tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka guna lebih memudahkan dalam memenuhi hasrat Saudara penanya Jth, kami akan sangat berterima kasih bila dapat diberi turunan dari pada keputusan Korem yang bersangkutan.

- b. Sesuai dengan jawaban kami terhadap pertanyaan nomor 1 yang diajukan oleh Komisi III DPR-GR sebagaimana tertantun dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal 22 Mei 1971 No. C1.10/K/1391/DPRGR/1971, apabila disesuatu Daerah eksistensi riil suatu organisasi tidak ada maka dengan sendirinya organisasi tersebut tidak dapat mengadakan pemberitahuan untuk menjelenggarakan kampanye.

Ketjuali apabila yang memberitahukan tersebut adalah organisasi yang lebih tinggi tingkatannya/tjabang lain yang eksistensi riilnya telah diakui.

2. Pertanyaan :

Pihak Golkar menjabarkan tanda gambar yang disebelah kiri kanan tertera gambar Presiden Suharto dan Sri Sultan.

Apakah itu dapat dibenarkan, chususnja mengenai gambar Presiden. Djika tidak, supaja pihak Lembaga Pemilihan Umum segera melarang penjabaran tanda gambar tersebut (sesuai bunji pasal

18 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 1969.

Djawaban :

Bahwasanja apa jang dimaksud pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 sebenarnja pasal jang mengatur tentang tanda gambar jang dipakai dalam pemilihan umum tidak boleh sama atau mirip dengan gambar perseorangan.

Mengenai penjebaran gambar Presiden tidak dilarang tetapi apabila penjebaran gambar presiden tersebut digabungkan dengan gambar seorang tjalon/tanda gambar sesuatu Organisasi dalam rangka kampanye, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

Chusus mengenai kasus jang terdjadi di Jogjakarta tersebut akan ditertibkan sebagaimana mestinja.

3. Pertanjaan :

Di Bolaang Mongondow para petani oleh Kepala Desa dipanggil untuk melakukan kerdja bakti.

Setelah selesai, tidak diberikan surat djalan kembali kalau tidak mau menerima kartu anggota Golkar.

Bukankah ini merupakan suatu paksaan?

Kalau benar paksaan, bersediakah Pemerintah/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengadakan penertiban?

Djawaban :

Terima kasih atas informasi Saudara anggota jang terhormat, dan akan kami check kebenarannja, apabila betul maka akan diadakan penertiban sebagaimana mestinja.

4. Pertanjaan :

Djawa Timur.

Di Desa Bosowo Ketjamatan Kandangan dan di Desa Tangkulan Ketjamatan Pago (dua-duanja di Kabupaten Kediri) kampanye

Parkindo dihalang-halangi oleh dua peleton Hansip dan Pamong Desa.

Mereka itu melarang orang-orang yang mau mendengarkan kampanye tersebut. Dapatkah hal itu dibenarkan ?

Kalau tidak, tindakan apakah yang dilakukan oleh Pemerintah/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk menertibkannya ?

Djawaban :

Apabila ada persoalan yang demikian, maka khusus di Jawa Timur ada Badan Kontak yang terdiri dari seluruh wakil-wakil Organisasi yang ikut pemilihan umum dan Muspida.

Kedjadian-kedjadian tersebut dapat langsung disalurkan melalui Badan Kontak tersebut, sehingga penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tjepat.

Masalah ini telah mendapat perhatian Pemerintah Daerah setempat.

5. Pertanyaan :

Hansip adalah rakjat yang ditugaskan dalam pertahanan sipil. Berarti mereka itu bukan ABRI dan bukan Pegawai Negeri.

Djadi sesungguhnya bebas untuk memilih dan dipilih, tetapi dalam kenjataanja Hansip dimasukkan dalam Sekber Golkar KINO Hankam.

Dapatkah Pemerintah/Ketua Lembaga Pemilihan Umum memberikan penjelasan.

Djawaban :

Sedjak tahun 1964 Hansip telah mendjadi anggota Sekber Golkar. Dengan Keputusan Ketua Sekber Golkar Nomor 507 tahun 1969 maka sedjak bulan Oktober 1969 telah diadakan regrouping Organisasi Sekber Golkar sehingga mendjadi 7 KINO jaitu :

1. PROFESI.

2. ORMAS HANKAM.
3. SOKSI
4. KOSGORO
5. M.K.G.R.
6. GAKARI
7. GERAKAN PEMBANGUNAN.

Mengingat sifat dan hakekat HANSIP maka dimasukkan dalam Sekber Golkar KINO ORMAS HANKAM.

6. Pertanyaan :

Dari beberapa sumber Pemerintah (antara lain Menteri Dalam Negeri sendiri) didapat pengakuan bahwa didaerah-daerah banjak tindakan penguasa/petugas jang digolongkan dalam istilah over acting.

Bagi seorang penguasa maka over acting itu pada hakekatnja berarti "suatu perbuatan jang melampaui batas kekuasaan" djadi sebetulnja strafbaar, tetapi hingga sekarang belum kami ketahui bahwa disamping pengakuan adanya over acting Pemerintah djuga mengambil tindakan terhadap penguasa/petugas tersebut (ketjuali beberapa di Sulawesi jang beritanya dimuat dalam surat-surat kabar beberapa hari jang lalu).

Bersediakan Pemerintah memberi pendjelasan, mengapa?

Djawaban :

Mengenai "over acting" sebagaimana dimaksud anggota jang terhormat, maka tindakan over acting itu belum tentu merupakan tindakan jang strafbaar, oleh karena hal ini kadang-kadang merupakan tindakan jang bersifat kebidjaksanaan.

B. LAPORAN :

Laporan :

Jogjakarta :

Golkarisasi terhadap warga negara keturunan Tjina masih diteruskan.

Tanggapan :

Menarik anggota atau kampanye dapat dilakukan oleh Organisasi terhadap semua lapisan masjarakat sepanjang dalam kegiatan-kegiatan itu tidak menjimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Laporan :

Rumah anggota DPR-GR Fraksi Parkindo/Sekretaris DPP PARKINDO di Bantul Jogja tanggal 27 April 1971 malam dinding pagar dan pohon-pohon yang ada dipekarangan dipenuhi dengan gambar-gambar pohon beringin.

Tanggapan :

Sesuai dengan pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 39/LPU/Tahun 1971, maka pemasangan dan atau pemantjangan alat peraga berupa selebaran, spanduk, plakat, lukisan, papan-papan gambar oleh sesuatu Organisasi pada bangunan, halaman dan atau pekarangan milik perseorangan harus sepengetahuan dan seijin dari penghuni dan atau pemilik bangunan, halaman atau pekarangan dimaksud.

Apabila penghuni dan atau pemiliknya menaruh keberatan supaya mengajukan keberatan tersebut kepada instansi yang berwenang.

3. Laporan :

Keluarga Sugaib juga didatangi kepala Dukuh bersama petugas Golkar untuk menampung keluarga tersebut dalam Golkar tetapi ditolak.

Tanggapan :

Memasuki keanggotaan Golkar adalah bersifat sukarela.
Seseorang yang ditawarkan untuk memasuki Golkar tersebut dapat saja menolak atau menerima.

4. Laporan :

Nj. Sugaib (isteri Anggota DPR-GR Sugaib) sebagai pegawai Djawatan Penerangan diwadjabkan mengisi formulir "monolojalitas" masuk Kokarpen, keluarga dari Parpol atau Ormas yang dianggap beraffiliasi Parpol tetapi tidak mengisi.

Sekarang sedang menunggu akibat negatif yang mungkin diterima sebagai resiko.

Tanggapan :

Kasus Nj. Sugaib tersebut akan kami teruskan ke Departemen Penerangan untuk ditanggapi.

Demikian jawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan/saran-saran dan laporan Saudara-saudara yang terhormat.

Terima kasih.

Untuk Pengesahan

Djakarta, 11 Djuni 1971.-

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

Sekretaris Umum

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

t.t.d.

t.t.d.

(SOENANDAR PRIJOSOEDARMO)

AMIRMACHMUD

T A N G G A P A N
MENTERI PENERANGAN ATAS LAPORAN JANG DIADJUKAN
OLEH KOMISI-III DPR-GR SEBAGAIMANA TERTJANTUM DALAM
LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PIMPINAN DPR-GR
TANGGAL 10 DJUNI 1971 NOMOR : C1.02/K/1494/DPR-G R/1971

TANGGAPAN
MENTERI PENERANGAN ATAS LAPORAN JANG DIADJUKAN
OLEH KOMISI III DPR-GR SEBAGAIMANA TERTJANTUM
DALAM LAMPIRAN2 SURAT PIMPINAN DPR-GR TGL. 10
DJUNI 1971, NO. C1.02/K/1494/DPR-GR/1971

Bersama ini disampaikan dengan hormat tanggapan kami atas laporan mengenai hal-hal jang menjangkut bidang Departemen Penerangan dalam pelaksanaan persiapan pemilihan umum jang diadjukan oleh Komisi III DPR-GR sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Pimpinan DPR-GR tanggal 10 Djuni 1971 Nomor : C1.02/K/1494/DPRGR/1971 sebagai berikut:

1. Laporan (no. 15 - Doc. No. 1589/Kom.III/71/014-K).

Tanggal 3 April 1971 Departemen Penerangan mengadakan pendjelasan atau briefing tentang pemilihan umum kepada pegawai2nja sebanyak 300 orang.

Dalam briefing tersebut para pegawai disuruh mengisi formulir Partai mana jang akan dipilih dalam pemilihan umum nanti. Setelah para pegawai mengadakan protes maka pengisian formulir tersebut dibatalkan.

Pendjelasan

Dalam rangka santiadji mengenai pemilihan umum jang diadakan oleh

Badan Koordinasi Penerangan Pemilu (Bakopen Pemilu) kepada pejabat2 teras dan pegawai2 Departemen Penerangan mulai tanggal 27 Maret 1971 di Deppen, telah disampaikan kepada para peserta santiadji formulir Angket Pemilihan Umum yang diberikan kepada para peserta santiadji yang diadakan di-daerah2 oleh Team Bakopen Pemilu untuk mengetahui sampai sed jauh mana pengertian2 tentang Pemilu diketahui oleh masyarakat.

Angket Pemilihan Umum tersebut berisi enam matjam pertanjaan, dan dibelakang pertanjaan2 tersebut ditjantumkan pula kemungkinan2 djawatan2 yang harus dipilih/diisi oleh peserta yang bersangkutan. Pertanjaan No. 5 dari Angket Pemilu tersebut, -- yang dipersoalkan dalam laporan tersebut diatas ---, berbunji sebagai berikut :

"Kepada siapa suara saudara nanti diberikan pada saat pemungutan suara ?

Djawaban2 yang tertjantum dibelakang pertanjaan tersebut untuk dipilih/diisi sbb. :

- Kepada tjalon perseorangan.
- Kepada Sekber Golkar.
- Kepada Partai Politik
- Tidak diberikan kepada siapapun."

Dalam angket tersebut tidak ada tertjantum pertanjaan/djawaban, yang menjatakan terhadap Partai mana akan diberikan pada pemungutan suara nanti, seperti yang dilaporkan oleh Komisi III DPR-GR itu. Karena pada Santiadji di Deppen tanggal 3 April formulir angket yang dibagikan itu ternjata agak berlainan dari angket2 yang telah di-bagi2-kan sebelumnja seperti tersebut diatas (jaitu supaja nama dari pengisi formulir disebutkan), maka oleh Pimpinan Team Santiadji setelah diketahuinja hal itu diputuskan, agar pertanjaan No. 5 tersebut tidak didjawab, tetapi pertanjaan2 lainnja tetap didjawab, agar dapat diketahui sampai dimana pengetahuan pejabat2/pegawai2 Deppen tentang Pemilu.

2. Laporan (No. 4-Doc.No.1601/Kom.-III/71-013).

Nj. Sugaib (isteri anggota PDR-GR) sebagai pegawai Djawatan Penerangan diwajibkan mengisi formulir "monolojalitas masuk Kokarpen, keluar dari Parpol atau Ormas yang dianggap beraffiliasi Parpol, tetapi tidak mengisi.

Sekarang sedang menunggu akibat negatif yang mungkin diterima sebagai resiko.

Pendjelasan :

Dalam bulan Mei 1971 seluruh karjawan Djapenkab Bantul dengan berpedoman pada :

1. Pantja Bhakti Deppen.
2. Code Kehormatan Deppen.
3. Tri Prasetya Deppen.
4. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1970.

dengan sukarela dan penuh keinsjafan telah menjatakan diri keluar dari partai/ormas yang beraffiliasi kepada parpol. Satu2nja karjawan yang tidak menjatakan diri keluar dari Parpol adalah Nj. Sugaib, yang dinjatakannya setjara tertulis tertanggal 17 Mei 1971.

Tidak wadjarlah kiranja untuk memberikan perhatian khusus kepada soal ini, apalagi untuk mem-besar2kannya.

Laporan yang menjatakan bahwa "sebagai pegawai Djawatan Penerangan diwadj'bkkan mengisi formulir 'monolojalitas' masuk Kokarpen, agaknya tidak benar, karena Kokarpen baru didirikan pada tanggal 17 Mei 1971 di Pusat (Djakarta).

Djakarta, 17 Djuni 1971.

MENTERI PENERANGAN R.I.

t.t.d.

BOEDIARDJO

Laksamana Madya Udara

PANTJA BHAKTI

DEPARTEMEN PENERANGAN

1. Memelihara dan menjuburkan djiwa dan roch perdjongan rakjat untuk melaksanakan tjita-tjita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideologi Negara jaitu Pantjasila, seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar.
3. Memperdalam kesadaran politik dan ketjerdasan membanding dari rakjat sebagaimana jang harus ada pada tiap2 warganegara jang mendjunjung tinggi dasar2 Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan musjawarah.
4. Memperkenalkan keluar negeri Negara Republik Indonesia serta tjita-tjita Persatuan Bangsa seluruh Indonesia.
5. Memberi penerangan kepada rakjat tentang politik Pemerintah (Kabinet) serta peraturan-peraturan jang dikeluarkan dan tindakan-tindakan jang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

KODE KEHORMATAN DJURU PENERANGAN

1. Djuru Penerang jakin akan kebenaran Pantjasila Negara.
2. Djuru Penerang setia dan tulus ichlas melaksanakan politik Pemerintah.
3. Djuru Penerang militant didalam djiwa, fikiran dan geraknja.
4. Djuru Penerang djudjur dalam perkataan dan perbuatan.

5. Djuru Penerang tabah dalam menghadapi tiap kesulitan dalam pekerdja-nja.
6. Djuru Penerang bidjaksana dalam pergaulan hidupnja dan mendjadi tjontoh dan tauladan bagi sekelilingnja.
7. Djuru Penerang adalah patriot sedjati.

Menanggapi pertanjaan tentang adanja gejala RRI dan TVRI memihak Golkar dalam siaran2nja, dapat diterangkan sehagai berikut :

1. RRI dan TVRI merupakan dinas pemantjar siaran jang sekalipun dikuasai Pemerintah, djuga diwadjibkan untuk memperhatikan hukum2 jang ber'aku dalam bidang aktualitas pekabaran. Ini berarti bahwa RRI dan TVRI dalam bidang pemberitaan diwadjibkan pula untuk memperhatikan dalil "berita bagaimana jang pantas untuk disiarkan", sebagaimana jang berlaku pula bagi dunia persurat-kabaran. Untuk ini kiranja dapat diambil sebagai pokok pedoman ialah berita jang hangat jang diperkirakan mendapat perhatian rakjat banjak.
2. Atas dasar pedoman2 kebidjaksanaan ini maka bagi para reporter RRI ditugaskan untuk senantiasa mentjari berita2 jang hangat jang pantas untuk disiarkan, kalau perlu dengan bersaing dengan surat-kabar untuk "primeur" berita2 tersebut.
3. Apabila dalam pemberitaan RRI/TVRI banjak dimasukkan soal2 mengenai Golkar, hal ini kiranja hanja sekedar merupakan petundjuk bahwa alam berita pada waktu diadakan pemberitaan tersebut memang sedang dikuasai oleh Golkar.
4. Atas dasar jang sama, RRI dan TVRI djuga menjiarkan berita2 tentang kegiatan parpol dalam kampanye Pemilu bilamana hal itu memang memenuhi sjarat2 sebagai "Berita2 jang patut disiarkan" dan menurut

penilaian penanggung jawab RRI tidak mengandung unsur2 yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

5. Apa yang diketengahkan sebagai siaran RRI atau TRI tentang Golkar yang dikatakan memihak tersebut karena ia semua merupakan siaran berita dan disiarkan tidak dalam rangka kampanye apapun ketjujuli di-kadji menurut syarat2 yang berlaku bagi berita yg pantas disiarkan.

P41899

89113513162



b89113513162a